



Katalog: 9102057



SENSUS EKONOMI 2016

ANALISIS HASIL LISTING

AGLOMERASI INDUSTRI MANUFAKTUR DI INDONESIA



BADAN PUSAT STATISTIK

SENSUS EKONOMI 2016

ANALISIS HASIL LISTING

AGLOMERASI INDUSTRI MANUFAKTUR DI INDONESIA



**SENSUS EKONOMI 2016 ANALISIS HASIL LISTING
AGLOMERASI INDUSTRI MANUFAKTUR DI INDONESIA**

ISBN : 978-602-438-178-3
No. Publikasi : 07340.1701
Katalog BPS : 9102057
Ukuran Buku : 17,6 x 25cm
Jumlah Halaman : xiv+92 halaman

Naskah :
Subdirektorat Pengembangan Model Statistik

Gambar Kulit :
Subdirektorat Publikasi dan Kompilasi Statistik

Diterbitkan Oleh :
© Badan Pusat Statistik

Dicetak Oleh :
CV NARIO SARI

*Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau
menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin
tertulis dari Badan Pusat Statistik*

TIM PENYUSUN

Pengarah

Sri Soelistyowati

Penanggung Jawab

Sentot Bangun Widoyono

Editor

Tri Nugrahadi

Penulis

Yeshri Rahayu

Dewi Lestari Amaliah

Maulana Faris

Yusuf Lubistoro

Ulya Zahrotun Niswah

Pengolah Data

Dewi Lestari Amaliah

Yusuf Lubistoro

Ulya Zahrotun Niswah

Desain dan Tata Letak Layout

Dimaz Faisal Rapif

Kontributor Data

Sekretariat SE2016

Kata Pengantar



Sensus Ekonomi 2016 (SE2016) merupakan sensus ekonomi keempat yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik sejak tahun 1986 sesuai amanat Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Pada tahun 2016 telah dilaksanakan salah satu tahapan SE2016 berupa listing atau pendaftaran usaha/ perusahaan (SE2016-L), yaitu pendataan secara lengkap seluruh kegiatan unit usaha/ perusahaan di wilayah Indonesia kecuali aktivitas pertanian, kehutanan, dan perikanan (Kategori A); aktivitas administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (Kategori O); dan aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja; aktivitas yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri (Kategori T). Ketersediaan data yang lengkap ini sangat penting antara lain untuk mengidentifikasi tingkat sebaran suatu aktivitas usaha yang potensial pada suatu wilayah, yang dikenal sebagai aglomerasi.

Publikasi Aglomerasi Industri Manufaktur di Indonesia ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai pola aglomerasi aktivitas usaha industri manufaktur, faktor-faktor pembentuk aglomerasi secara umum, dan kaitan antara pola aglomerasi kategori ini dengan pola aglomerasi kategori lain, seperti perdagangan, transportasi, dan keuangan. Diharapkan, informasi-informasi tersebut dapat bermanfaat bagi evaluasi dan perencanaan pembangunan khususnya industri manufaktur di Indonesia.

Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan publikasi ini, kami mengucapkan terima kasih. Semoga publikasi ini dapat bermanfaat.

Jakarta, Desember 2017
Kepala Badan Pusat Statistik

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Suhariyanto', written over a white background.

Dr. Suhariyanto

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR SINGKATAN	xi
BAB I	1
GAMBARAN USAHA INDUSTRI MANUFAKTUR	
• Peranan Industri Manufaktur dalam Perekonomian Indonesia	3
• Karakteristik Industri Manufaktur	8
BAB II	17
POLA AGLOMERASI INDUSTRI MANUFAKTUR	
• Konsep dan Metodologi Pengukuran	19
• Pola Aglomerasi Industri Manufaktur menurut Pulau	20
• Pola Aglomerasi Industri Manufaktur menurut Skala Usaha	22
• Pola Aglomerasi Industri Manufaktur menurut Sub-Kategori	29
• Pola Aglomerasi dan Master plan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)	42
• Pola Aglomerasi pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	45
BAB III	49
FAKTOR-FAKTOR PEMBENTUK AGLOMERASI INDUSTRI MANUFAKTUR	
• Ruang Lingkup	51
• Metode Analisis	51
• Faktor-faktor yang Memengaruhi Aglomerasi	52
BAB IV	57
KAITAN ANTARA POLA AGLOMERASI INDUSTRI MANUFAKTUR DENGAN POLA AGLOMERASI USAHA EKONOMI LAINNYA	
• Pola Aglomerasi Industri Manufaktur dan Perdagangan	61
• Pola Aglomerasi Industri Manufaktur dan Transportasi	62
• Pola Aglomerasi Industri Manufaktur dan Keuangan	63

BAB V 65
KESIMPULAN

DAFTAR PUSTAKA 69

LAMPIRAN 71

<https://www.bps.go.id>

Daftar Tabel

• Tabel 1.1	10
Sebaran Usaha/Perusahaan dan Tenaga Kerja Industri Manufaktur menurut Pulau, 2016	
• Tabel 1.2	11
Sebaran Usaha/Perusahaan Industri Manufaktur Skala UMB dan Tenaga Kerja (000 orang) menurut Pulau, 2016	
• Tabel 1.3	13
Sebaran Usaha/Perusahaan Industri Manufaktur Skala UMK dan Tenaga Kerja (000 orang) menurut Pulau, 2016	
• Tabel 1.4	14
Jumlah Usaha Industri menurut Tahun Mulai Beroperasi dan Skala Usaha, 2016	
• Tabel 1.5	15
Jumlah Usaha Industri menurut Pulau dan Tahun Mulai Beroperasi, 2016	
• Tabel 2.1	32
Distribusi PDB Nasional menurut Lapangan Usaha, 2014-2016 (Persentase)	
• Tabel 2.2	36
Pertumbuhan Volume dan Nilai Ekspor Alas Kaki Indonesia, 2010-2015	
• Tabel 2.3	47
Nilai Indeks Spesialisasi Industri menurut KEK Industri, 2016	
• Tabel 2.4	47
Industri yang Teraglomerasi menurut Subkategori Industri, 2016	
• Tabel 3.1	53
Nilai Tolerance dan VIF dari Variabel Independent	
• Tabel 3.2	53
Hasil Pengujian Simultan Model Awal	
• Tabel 3.3	53
Hasil Pengujian Parsial dari Model Awal	
• Tabel 3.4	53
Hasil Pengujian Parsial dari Model Terbaik	
• Tabel 3.5	53
Hasil Penghitungan Uji Kesesuaian Model	
• Tabel 3.6	54
Nilai Koefisien dan odds ratio Variabel Independent pada Model Terbaik	

Daftar Gambar

	• Gambar 1.1	4
Kontribusi Industri Manufaktur dalam Perekonomian 2016		
	• Gambar 1.2	6
Perkembangan Kontribusi Industri Manufaktur dalam Perekonomian 1986-2016		
	• Gambar 1.3	6
Kontribusi Industri Manufaktur menurut Pulau, 2016		
	• Gambar 1.4	7
Penyerapan Tenaga Kerja menurut Lapangan Usaha, 2016		
	• Gambar 1.5	8
Penyerapan Tenaga Kerja Industri Manufaktur menurut Pulau, 2016		
	• Gambar 2.1	20
Pola Aglomerasi Industri Manufaktur menurut Pulau, 2016		
	• Gambar 2.2	23
Pola Aglomerasi Usaha Industri Mikro menurut Provinsi, 2016		
	• Gambar 2.3	24
Pola Aglomerasi Usaha Industri Mikro menurut Kabupaten/Kota, 2016		
	• Gambar 2.4	26
Pola Aglomerasi Usaha Industri Kecil menurut Provinsi, 2016		
	• Gambar 2.5	26
Pola Aglomerasi Usaha Industri Kecil menurut Kabupaten/Kota, 2016		
	• Gambar 2.6	27
Pola Aglomerasi Usaha Industri Menengah menurut Provinsi, 2016		
	• Gambar 2.7	27
Pola Aglomerasi Usaha Industri Menengah menurut Kabupaten/Kota, 2016		
	• Gambar 2.8	28
Pola Aglomerasi Usaha Industri Besar menurut Provinsi, 2016		
	• Gambar 2.9	29
Pola Aglomerasi Usaha Industri Besar menurut Kabupaten/Kota, 2016		
	• Gambar 2.10	30
Pola Aglomerasi Industri Makanan menurut Pulau di Indonesia, 2016		
	• Gambar 2.11	30
Pola Aglomerasi Industri Minuman menurut Pulau, 2016		
	• Gambar 2.12	33
Pola Aglomerasi Industri Tekstil menurut Pulau, 2016		
	• Gambar 2.13	34
Pola Aglomerasi Industri Pakaian Jadi menurut Pulau, 2016		

	• Gambar 2.14	36
Pola Aglomerasi Industri Kulit, Barang dari Kulit, dan Alas Kaki menurut Pulau, 2016		
	• Gambar 2.15	37
Pola Aglomerasi Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan, dan Sejenisnya menurut Pulau, 2016		
	• Gambar 2.16	39
Pola Aglomerasi Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia menurut Pulau, 2016		
	• Gambar 2.17	39
Pola Aglomerasi Industri Farmasi, Produk Obat Kimia, dan Obat Tradisional menurut Pulau, 2016		
	• Gambar 2.18	40
PDB atas Dasar Harga Konstan Industri Kimia, Farmasi, dan Obat Tradisional, 2010-2016 (miliar rupiah)		
	• Gambar 2.19	41
Pola Aglomerasi Industri Karet, Barang dari Karet, dan Plastik menurut Pulau, 2016		
	• Gambar 2.20	42
PDB Industri Furnitur Indonesia, 2013-2016		
	• Gambar 2.21	43
Pola Aglomerasi Industri Manufaktur pada Wilayah MP3EI		
	• Gambar 2.22	46
Pola Aglomerasi Industri Manufaktur pada KEK, 2016		
	• Gambar 2.23	46
Distribusi PDRB Kota Bitung, 2016 (Persentase)		
	• Gambar 4.1	62
Sebaran Pola Aglomerasi Industri Manufaktur dan Perdagangan, 2016		
	• Gambar 4.2	63
Sebaran Pola Aglomerasi Industri Manufaktur dan Transportasi, 2016		
	• Gambar 4.3	64
Sebaran Pola Aglomerasi Industri Manufaktur dan Keuangan, 2016		

Daftar Singkatan

BPS	: Badan Pusat Statistik
KBLI	: Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
KEK	: Kawasan Ekonomi Khusus
MP3EI	: Masterplan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Ekonomi Indonesia
NTB	: Nusa Tenggara Barat
NTT	: Nusa Tenggara Timur
PDB	: Produk Domestik Bruto
PDRB	: Produk Domestik Regional Bruto
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
SDM	: Sumber Daya Manusia
SE2016-L	: Sensus Ekonomi 2016 – Listing
SI	: Spesialisasi Industri
TPT	: Tekstil dan Produk Tekstil
UNIDO	: <i>United Nations for Industry Development Organizations</i>
JABOTABEK	: Jakarta Bogor Tangerang Bekasi
SIKIM	: Sentra Industri Kecil Dan Menengah
KI	: Kawasan Industri
UMB	: Usaha Menengah Besar
UMK	: Usaha Mikro Kecil
UMKM	: Usaha Mikri Kecil Dan Menengah
KITE	: Kemudahan Impor Tujuan Ekspor
MEA	: Masyarakat Ekonomi ASEAN
PMK	: Penyakit Mulut dan Kuku
WWF	: <i>World Wild Fund for Nature</i>
VIF	: <i>Variance Inflation Vactor</i>
NEG	: <i>New Economic Geography</i>
IBS	: Industri Besar Sedang
KTI	: Kawasan Timur Indonesia
KBI	: Kawasan Barat Indonesia

bab

1



Gambaran Usaha Industri Manufaktur

Gambaran Usaha Industri Manufaktur

A. Peranan Industri Manufaktur dalam Perekonomian Indonesia

Pembangunan ekonomi khususnya industri manufaktur pada suatu negara menjadi pilar penting bagi terselenggaranya proses pembangunan di bidang-bidang lainnya. Pertumbuhan industri yang pesat dapat memacu dan mendorong pertumbuhan sektor lainnya seperti pertanian dan jasa. Sehingga tidak mengherankan bahwa industrialisasi menjadi salah satu kebijakan penting hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia.

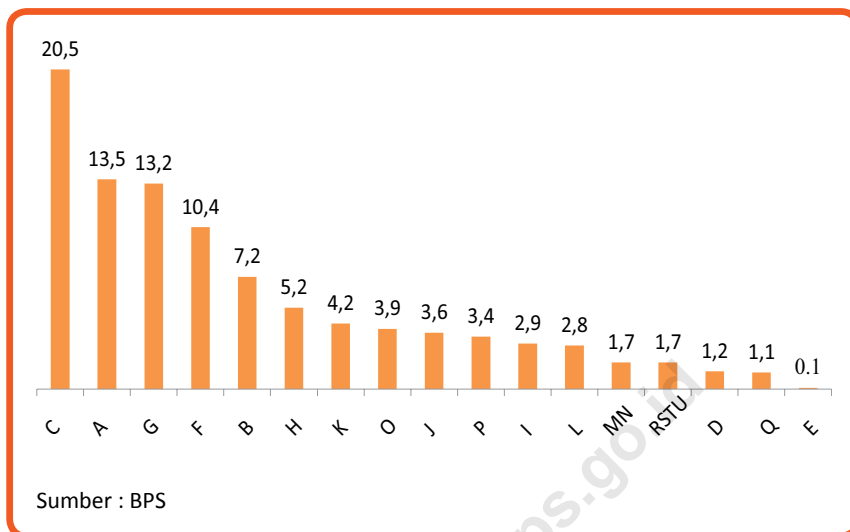
Industrialisasi di Indonesia telah menunjukkan hasilnya. Sektor industri manufaktur telah menjadi *leading sector* dalam pembangunan ekonomi nasional karena memberikan sumbangan terbesar dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sumbangan ini tidak hanya melalui nilai tambah, lapangan pekerjaan maupun devisa, namun juga memberikan kontribusi ekonomi yang besar dalam transformasi kultural bangsa ke arah modernisasi kehidupan masyarakat yang menunjang pembentukan daya saing bangsa. Dalam bagian ini, peranan industri manufaktur dalam perekonomian Indonesia hanya difokuskan pada kontribusi dalam nilai tambah dan penyerapan tenaga kerja.

Pada tahun 2016, industri manufaktur merupakan kontributor terbesar dalam perekonomian Indonesia, yakni mencapai 20,5 persen, diikuti Pertanian (13,5 persen) dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil & Sepeda Motor (13,2 persen). Adapun kontribusi kategori-kategori lainnya bervariasi mulai dari 0,1 persen (Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi) hingga 10,4 persen (Konstruksi).

Kontribusi terbesar tersebut didukung oleh jumlah usaha di dalamnya. Hasil Listing Sensus Ekonomi 2016 (SE2016) mencatat bahwa jumlah usaha industri manufaktur mencapai 16,53 persen dari total usaha nonpertanian. Jumlah usaha pada kategori ini menempati urutan ketiga setelah Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil & Sepeda Motor (46,8 persen) dan Penyediaan Akomodasi & Penyediaan Makan Minum (16,72 persen).

Industri Manufaktur telah memberikan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sejak tahun 1991. Pada tahun 2016 kontribusinya mencapai 20,5%

Gambar 1.1
Kontribusi Industri Manufaktur dalam Perekonomian 2016



Keterangan:

Kategori A	Pertanian
Kategori B	Pertambangan dan Penggalian
Kategori C	Industri Pengolahan
Kategori D	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas, dan Udara Dingin
Kategori E	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi
Kategori F	Konstruksi
Kategori G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
Kategori H	Pengangkutan dan Pergudangan
Kategori I	Penyediaan Akomodasi & Penyediaan Makan Minum
Kategori J	Informasi & Komunikasi
Kategori K	Aktivitas Keuangan & Asuransi
Kategori L	Real Estat
Kategori M,N	Jasa Perusahaan
Kategori P	Pendidikan
Kategori Q	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial
Kategori R,S,U	Jasa Lainnya

Apabila dilihat dari perkembangan *share* PDB selama 30 tahun terakhir (Gambar 1.2), tampak bahwa struktur perekonomian di Indonesia mengalami pergeseran dari dominasi pertanian ke industri pengolahan.

Hal ini sesuai dengan transformasi struktural yang umum terjadi pada negara berkembang. Pergeseran ini terlihat dari kontribusi pertanian yang selalu tertinggi selama periode 1986 – 1989, kemudian

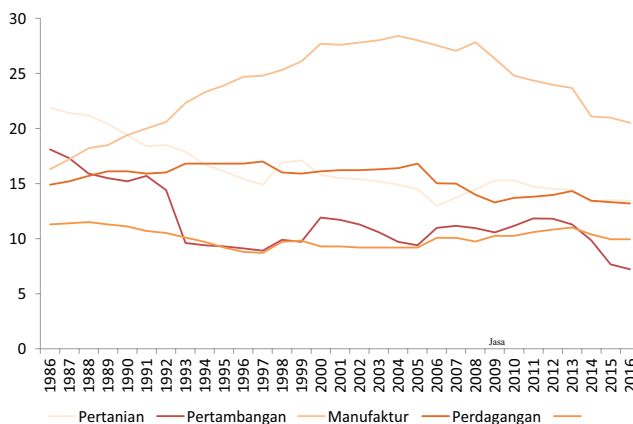
digantikan oleh industri manufaktur sejak tahun 1991 hingga kini. Merujuk kriteria dari UNIDO (*United Nations for Industry Development Organization*), Indonesia mulai memasuki kelompok negara semi industri (*semi industrialized country*) karena kontribusi terhadap PDB telah melampaui 20 persen. Peningkatan kontribusi industri manufaktur yang cukup tinggi sejak tahun 1991 (20 persen) hingga tahun 2000 (27,7 persen) merupakan dampak dari kebijakan di sektor industri yang berorientasi ekspor (*outward looking*), di mana ekspor produk industri ini lebih menjadi prioritas pemerintah dibanding produk minyak dan pertanian. Kebijakan ini dimulai sejak tahun 1985 melalui reformasi kepabeanan yang telah mengurangi *clearing time* dan biaya impor untuk bahan baku. Peningkatan nilai kontribusi tersebut semakin memantapkan peranan industri manufaktur sebagai *engine of growth* perekonomian Indonesia.

peningkatan kontribusi industri manufaktur dimulai dari tahun 1991

Dampak kebijakan di atas, jumlah perusahaan industri manufaktur khususnya berskala menengah/besar meningkat dari 16.494 menjadi 22.997 perusahaan dari tahun 1991 ke tahun 1996. Peningkatan terbesar terjadi pada industri makanan, minuman dan tembakau, diikuti industri tekstil, produk kulit, dan alas kaki.

Bahkan ketika terjadi krisis ekonomi 1998, kontribusi industri manufaktur masih sedikit meningkat meskipun jumlah perusahaan di hampir seluruh aktivitas usaha menurun. Peningkatan ini didukung oleh industri kayu dan industri besi dan logam dasar. Bahkan, jumlah perusahaan skala menengah/besar industri kayu meningkat cukup signifikan. Hal ini didorong oleh depresiasi Rupiah terhadap Dollar AS yang berakibat harga produk ekspor kayu naik dibanding sebelum krisis. Sehingga, banyak perusahaan menambah tenaga kerja untuk memenuhi peningkatan permintaan.

Gambar 1.2
Perkembangan Kontribusi Industri Manufaktur dalam Perekonomian, 1986 – 2016



Sumber : BPS

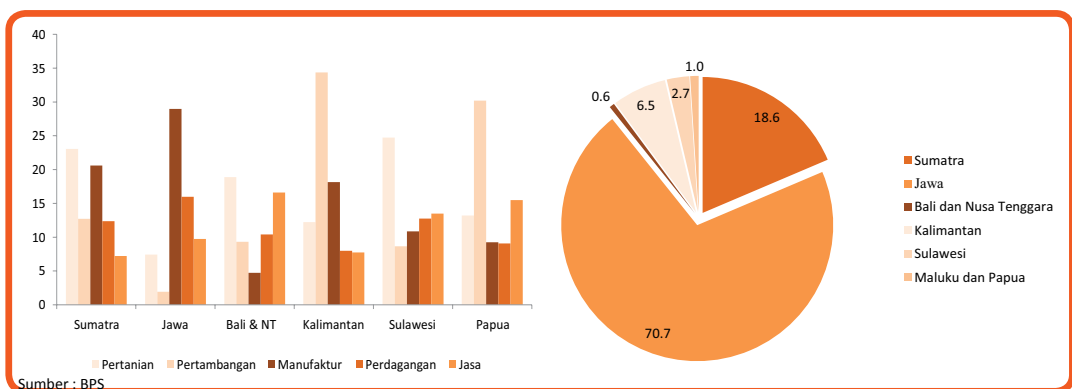
Pada awal reformasi, terjadi sedikit perlambatan kenaikan kontribusi. Diindikasikan bahwa kondisi ini disebabkan oleh penurunan jumlah perusahaan industri kayu sebagai dampak kebijakan pemerintah pada tahun 2001 yang membatasi jumlah penebangan untuk melindungi hutan. Selain itu, penurunan jumlah perusahaan juga terjadi pada industri tekstil. Akibat depresiasi Rupiah, harga bahan baku industri tekstil (yang sebagian besar masih diimpor) naik signifikan. Kenaikan harga ini sangat memberatkan perusahaan-perusahaan tekstil yang menggunakan bahan baku impor namun hanya menjual produk di pasar nasional.

Puncak kontribusi industri manufaktur terjadi pada tahun 2004 sebesar 28,4 persen atau meningkat dua kali dibanding tahun 1986 sejak kebijakan pemerintah mulai diimplementasikan. Sejak tahun 2005, kontribusi industri manufaktur menunjukkan tren penurunan (kecuali pada tahun 2008), meskipun nilai kontribusinya masih jauh di atas kontribusi kategori lainnya. Penurunan ini diindikasikan akibat peningkatan produk impor yang berdampak pada penurunan *market share* produk nasional.

Transformasi perekonomian Indonesia yang ditandai dengan peningkatan kontribusi industri manufaktur pada awal 1990-an dan penurunan pada beberapa tahun terakhir sesuai dengan pendapat Kuznet. Kuznet dalam Roosmawarni (2015), menyatakan bahwa proses transformasi struktural diawali dengan menurunnya kontribusi PDB sektor pertanian, diikuti oleh sektor industri yang pada awalnya akan naik namun kemudian akan turun.

Dilihat dari sebaran antar pulau, secara umum masing-masing kategori memiliki kontribusi yang berbeda pada suatu pulau. Misalnya, kontribusi pertanian paling dominan di Pulau Sumatra, Bali & Nusa Tenggara, serta Sulawesi. Industri manufaktur hanya dominan di Pulau Jawa, dan pertambangan mendominasi dua wilayah lainnya (Kalimantan, Maluku & Papua). Kontribusi kategori pertambangan di dua wilayah ini jauh melebihi kontribusi terbesar kedua, yaitu industri manufaktur di Kalimantan dan kategori jasa di Maluku & Papua. Adapun, kontribusi industri manufaktur di Maluku & Papua masih relatif kecil, hanya di bawah 11 persen.

Gambar 1.3.
Kontribusi Industri Manufaktur menurut Pulau, 2016



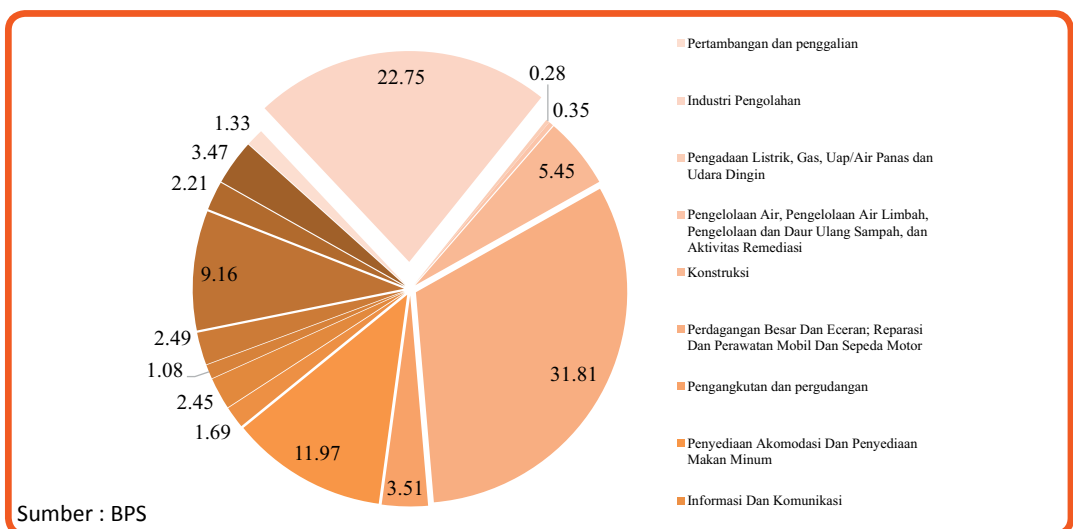
Pulau Jawa merupakan penyumbang terbesar industri manufaktur di Indonesia dengan kontribusi lebih dari 70 persen terhadap PDB nasional. Besarnya kontribusi ini menunjukkan bahwa saat ini industri manufaktur Indonesia masih terpusat di Jawa sebagaimana telah diuraikan di atas. Ketersediaan infrastruktur, sarana transportasi, tenaga kerja, dan pangsa pasar yang relatif besar merupakan sebagian dari faktor-faktor penting yang mendorong konsentrasi sektor ini di Pulau Jawa. Kontributor terbesar kedua adalah Sumatra (18,6 persen), sedangkan kontribusi terkecil diberikan oleh Maluku & Papua (1,0 persen), dan Bali & Nusa Tenggara (0,6 persen).

Keberadaan jumlah penduduk Indonesia yang besar membutuhkan terciptanya lapangan pekerjaan yang memadai melalui aktivitas usaha/perusahaan yang ada. Hasil SE2016-L mencatat bahwa untuk usaha/perusahaan non-pertanian, penyerapan tenaga kerja di Indonesia pada tahun 2016 sebanyak 70,32 juta pekerja, paling

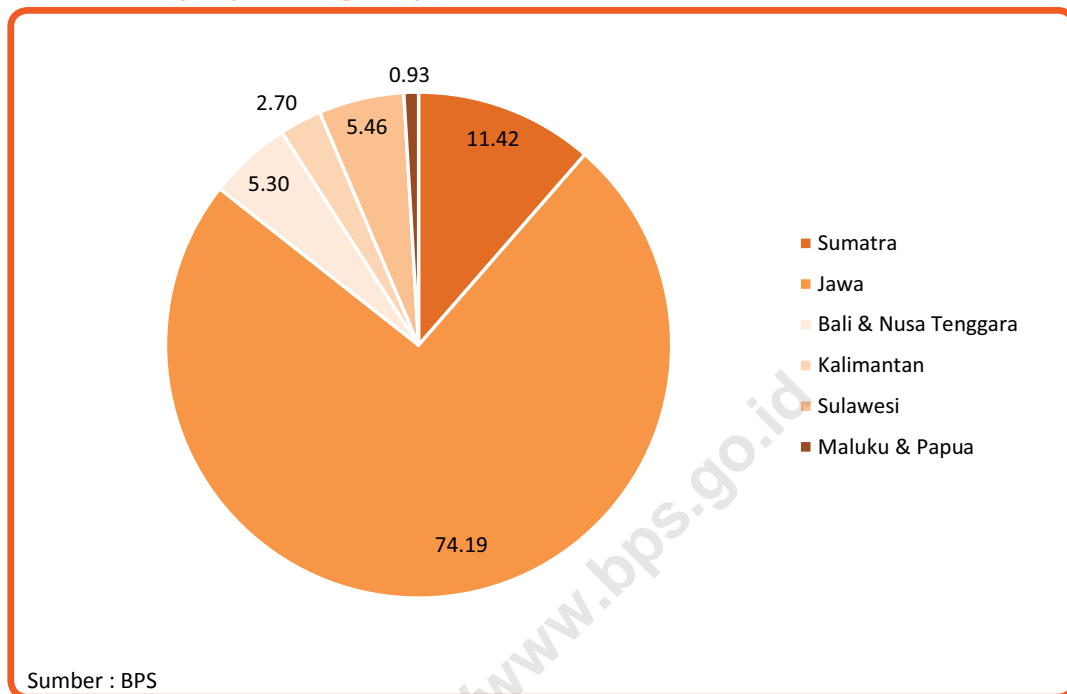
banyak terdapat pada Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (31,81 persen), diikuti Industri Manufaktur (22,75 persen), Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum (11,97 persen), dan jasa Pendidikan (9,16 persen). Informasi ini menunjukkan bahwa industri manufaktur tidak hanya andal dalam berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia, juga dalam penyerapan tenaga kerja.

Sama halnya dengan sebaran usaha/perusahaan, sebaran penyerapan tenaga kerja industri manufaktur juga masih terkonsentrasi di Pulau Jawa dengan penyerapan lebih dari 74 persen. Hal ini wajar, mengingat konsentrasi jumlah penduduk dan tenaga kerja terbesar terdapat di pulau ini. Meskipun jumlah usaha/perusahaan industri manufaktur paling banyak terdapat di Jawa Tengah, ternyata penyerapan tenaga kerja paling banyak terdapat di Jawa Timur (3,43 juta pekerja atau 21,42 persen dari total nasional). Jawa

Gambar 1.4
Penyerapan Tenaga Kerja menurut Lapangan Usaha, 2016



Gambar 1.5
Penyerapan Tenaga Kerja Industri Manufaktur menurut Pulau, 2016



Tengah hanya penyerap terbesar kedua, sebanyak 3,14 juta pekerja atau 19,64 persen, tidak berbeda jauh dengan Jawa Barat (3,06 juta pekerja atau 19,13 persen).

Hal ini disebabkan oleh jumlah usaha/perusahaan industri manufaktur skala besar di Jawa Timur dan Jawa Barat yang lebih banyak dibanding Jawa Tengah, masing-masing 2.933, 2.118, dan 1.426. Mengingat daya serap perusahaan skala besar paling banyak diantara skala lainnya, maka kuantitas perusahaan skala ini pada suatu daerah juga berpengaruh terhadap besaran penyerapan tenaga kerja di daerah tersebut.

B. Karakteristik Industri Manufaktur

Berdasarkan hasil SE2016-L, pada tahun 2016, jumlah usaha/perusahaan industri manufaktur di Indonesia tercatat sebanyak

4,4 juta usaha/perusahaan (sekitar 16,53 persen dari total usaha/perusahaan di Indonesia), meningkat dari 3,2 juta usaha/perusahaan pada tahun 2006 (hasil SE2006-L). Dengan kata lain, jumlah tersebut bertambah rata-rata setiap tahunnya sebesar 3,75 persen. Perkembangan jumlah penduduk dan tumbuhnya usaha modern turut memberikan andil meningkatnya aktivitas industri manufaktur di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.

Merujuk data pada Tabel 1.1., hingga tahun 2016, Pulau Jawa masih sebagai pusat konsentrasi industri manufaktur di Indonesia, terutama berada di Jawa Tengah (23,13 persen dari total nasional), Jawa Timur (19,49 persen), dan Jawa Barat (13,85 persen). Dominasi terbesar kedua adalah Sumatera, khususnya di Sumatera Utara (2,88 persen). Kondisi ini kontras

dengan sebaran usaha/perusahaan industri manufaktur di wilayah Maluku & Papua yang hanya 1,48 persen dari total nasional.

Konsentrasi industri manufaktur di Pulau Jawa diperkuat oleh penelitian Kuncoro (2002). Bahkan dalam penelitian tersebut, Kuncoro menyatakan bahwa konsentrasi tersebut membentuk pola dua kutub (*bipolar pattern*). Dua kutub tersebut adalah, di ujung Barat Pulau Jawa yang mencakup JABOTABEK (Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi) dan Bandung. Sedangkan di ujung Timur Jawa berpusat di kawasan Surabaya. Lebih lanjut penelitian tersebut menemukan bahwa telah terjadi suatu fenomena menarik di kutub Barat, yaitu perkembangan aktivitas industri manufaktur pada kota-kota inti (*core region*) seperti Jakarta dan Bandung cenderung menurun. Sebaliknya, aktivitas industri ini di daerah-daerah pinggiran (*fringe region*) seperti Bogor, Bekasi, dan Tangerang justru semakin meningkat.

Dominasi jumlah usaha di Pulau Jawa

menunjukkan ketimpangan sebaran usaha industri manufaktur yang tentunya dapat berdampak kurang baik terhadap keadilan pembangunan ekonomi di Indonesia. Untuk mengatasi hal ini, dalam RPJMN 2015-2019, salahsatu fokus pengembangan industri yang akan dilakukan Kementerian Perindustrian adalah pengembangan perwilayahan industri di luar Pulau Jawa. Kementerian Perindustrian (2016) berencana akan membangun 14 kawasan industri, yaitu:

1. Batu Licin, Kalimantan Selatan;
2. Ketapang, Kalimantan Barat;
3. Landak, Kalimantan Barat;
4. Kuala Tanjung, Sumatera Utara;
5. Sei Mangke, Sumatera Utara;
6. Tanggamus, Lampung;
7. Jorong, Tanah Laut, Kalimantan Selatan;
8. Teluk Bintuni, Papua barat;
9. Buli – Halmahera timur, Maluku Utara;
10. Bitung, Sulawesi Utara;
11. Palu, Sulawesi Tengah;
12. Morowali, Sulawesi Tengah;

Tabel 1.1

Sebaran Usaha/Perusahaan dan Tenaga Kerja Industri Manufaktur menurut Pulau, 2016

Provinsi	Total					
	Usaha	Distribusi Usaha	% thd Total Usaha	Tenaga Kerja	Distribusi Tenaga Kerja	% thd Tenaga Kerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sumatra	601.436	13,62	2,25	1.826.670	11,42	2,60
Jawa	2.839.276	64,29	10,63	11.871.101	74,19	16,88
Bali & Nusa Tenggara	368.355	8,34	1,38	847.315	5,30	1,20
Kalimantan	152.507	3,45	0,57	432.720	2,70	0,62
Sulawesi	389.432	8,82	1,46	873.010	5,46	1,24
Maluku & Papua	65.283	1,48	0,24	149.091	0,93	0,21
Jumlah	4.416.289	100	16,53	15.999.907	100	22,75

13. Konawe, Sulawesi Tenggara;
14. Bantaeng, Sulawesi Selatan.

Selain itu akan dibangun 22 Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKIM) selama 5 (lima) tahun dengan strategi mencakup:

1. Fasilitasi pembangunan 14 Kawasan Industri (KI) prioritas.
2. Membangun 22 Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKIM) yang terdiri dari 11 di Kawasan Timur Indonesia dan 11 di Kawasan Barat Indonesia,
3. Berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan dalam membangun infrastruktur utama, infrastruktur pendukung tumbuhnya industri, dan sarana pendukung kualitas kehidupan bagi pekerja.

Tenaga kerja merupakan salah satu komponen dalam aglomerasi. Komponen ini juga dapat dianggap sebagai suatu keuntungan yang dapat diperoleh ketika beberapa industri teraglomerasi. Dalam konsep aglomerasinya, Marshall memberikan istilah *“labor pooling”* yang disebabkan oleh perusahaan/industri yang berlokasi berdekatan satu dengan lainnya (Ellison, 2007). Hal ini diperjelas oleh Smith (1981), bahwa industri yang terkonsentrasi dapat menyebabkan berkumpulnya tenaga kerja dengan keahlian khusus yang sesuai dengan kebutuhan industri di sekitarnya. Hal ini tentunya dapat menghemat biaya pelatihan bagi para pekerja.

Pada bagian sebelumnya telah dikemukakan bahwa daya serap industri

manufaktur terhadap tenaga kerja relatif besar yakni terbesar kedua (22,75 persen) setelah usaha Perdagangan Besar dan Eceran. Sayangnya penyerapan ini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Pulau Jawa menjadi tempat mata pencaharian sekitar 11,87 juta orang atau hampir dua per tiga dari total tenaga kerja industri manufaktur di Indonesia. Kondisi sebaliknya, daya serap industri manufaktur di Maluku & Papua paling kecil, kurang dari satu persen.

Bila jumlah tenaga kerja dibandingkan dengan jumlah usaha/perusahaan, maka secara rata-rata setiap usaha/perusahaan menyerap 3,62 pekerja. Rata-rata ini paling besar di Jawa dan Sumatera (4,18 dan 3,04), sedangkan di pulau-pulau lain, rata-rata penyerapan per usaha/perusahaan relatif seimbang, berkisar antara 2,24 (Sulawesi) hingga 2,84 (Kalimantan). Hal ini lebih diakibatkan jumlah usaha/perusahaan berskala menengah dan besar yang berada di Jawa dan Sumatera lebih banyak dibanding pulau-pulau lainnya.

konsentrasi industri di Jawa membentuk pola bipolar di daerah Timur dan Baratnya

U s a h a / p e r u s a h a a n berskala menengah dan besar ditentukan berdasarkan jumlah tenaga kerja yang dimiliki suatu usaha/perusahaan. Berskala menengah bila jumlah tenaga kerja antara 20 hingga 99 orang, dan berskala besar bila bertenaga kerja sebanyak 100 orang atau lebih. Jumlah UMB industri manufaktur hanya sekitar 42 ribu usaha/perusahaan atau 10 persen dari total usaha/perusahaan non-pertanian berskala menengah dan besar di Indonesia, namun daya serap tenaga kerjanya relatif besar, yaitu 39,86 persen tenaga kerja di usaha skala

menengah dan besar. Bila dibandingkan dengan usaha industri manufaktur berskala mikro dan kecil, persentase UMB sangat sedikit (hanya 1 persen). Meskipun demikian, usaha/perusahaan ini mampu menyerap 41,56 persen tenaga kerja dalam industri manufaktur.

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa sebaran UMB industri manufaktur lebih dominan di Pulau Jawa, dan menyerap 81,45 persen dari total tenaga kerja industri manufaktur skala UMB. Sementara itu, jumlah industri manufaktur UMB di Maluku & Papua relatif sedikit yakni hanya 180 usaha/perusahaan (0,42 persen) dengan penyerapan tenaga kerja kurang dari satu persen.

Di Pulau Jawa, usaha/perusahaan UMB

lebih banyak di Jawa Barat (29,87 persen), diikuti Jawa Timur (27,27 persen), dan Jawa Tengah (17,89 persen). Sebaran usaha yang banyak berada di kedua ujung Pulau Jawa. Relevan dengan temuan Kuncoro (2002) sebagaimana dikemukakan di atas.

Di Jawa Barat, lebih dari 60 persen usaha/perusahaan UMB terkonsentrasi di Bandung, Bekasi, dan Bogor. Di Jawa Timur, sebaran usaha ini cenderung lebih merata antar daerah. Sekitar 39,30 persen UMB terkonsentrasi di Surabaya, Sidoarjo, dan Pasuruan. Sebaran yang lebih merata terdapat di Jawa Tengah. Konsentrasi terbesar usaha ini hanya berada di Semarang dan sekitarnya.

Tabel 1.2

Sebaran Usaha/Perusahaan Industri Manufaktur Skala UMB dan Tenaga Kerja (000 orang) menurut Pulau, 2016

Provinsi	UMB					
	Usaha	Distribusi Usaha	% thd Total Usaha UMB (non-pertanian)	Tenaga Kerja (000 orang)	Distribusi Tenaga Kerja	% thd Tenaga Kerja UMB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sumatra	4.517	10,64	1,01	701,91	10,56	4,21
Jawa	34.591	81,45	7,73	5.594,7	84,15	33,54
Bali & Nusa Tenggara	988	2,33	0,22	58,19	0,88	0,35
Kalimantan	904	2,13	0,20	151,70	2,28	0,91
Sulawesi	1.288	3,03	0,29	115	1,73	0,69
Maluku & Papua	180	0,42	0,04	26,72	0,40	0,16
Jumlah	42.468	100	9,49	6.648,20	100	39,86

Sumber : BPS

Selain memotret usaha/perusahaan industri manufaktur berskala menengah dan besar (UMB), SE2016-L juga mendata usaha/perusahaan industri manufaktur yang diklasifikasikan sebagai Usaha Mikro Kecil (UMK). Suatu usaha/perusahaan dikelompokkan sebagai berskala mikro bila hanya memiliki tenaga kerja antara satu hingga 4 orang, dan skala kecil bila terdapat tenaga kerja antara 5 hingga 19 orang.

Secara umum, UMK memiliki beberapa karakteristik yang mirip, antara lain:

1. Kurang jelasnya pembagian tugas antar bidang administrasi dan operasional. Kebanyakan industri kecil dikelola oleh perorangan yang merangkap sebagai pemilik sekaligus pengelola perusahaan, serta memanfaatkan tenaga kerja dari keluarga dan kerabat dekatnya.
2. Akses yang rendah terhadap lembaga-lembaga kredit formal sehingga mereka cenderung menggantungkan pembiayaan usahanya dari modal sendiri atau sumber-sumber lain seperti keluarga, kerabat, pedagang perantara, bahkan rentenir.
3. Umumnya tidak memiliki status badan hukum.

UMK sangat mendominasi aktivitas ekonomi industri manufaktur di Indonesia dengan jumlah usaha/perusahaan sebanyak 4,37 juta atau 99,03 persen, tapi hanya menyerap tenaga kerja sebanyak 9,3 juta orang atau 58,44 persen dari total

seluruh tenaga kerja industri manufaktur.

Sebanyak 64,12 persen industri manufaktur UMK berada di Pulau Jawa. Industri manufaktur skala ini mampu menyerap 67,12 persen tenaga kerja dari seluruh industri skala UMK nasional dan 11,7 persen tenaga kerja dari seluruh tenaga kerja pada usaha mikro dan kecil. UMK industri manufaktur di Maluku & Papua, jumlah industri skala ini hanya sebesar 65 ribu (1,5 persen) dengan penyerapan tenaga kerja 1,31 persen.

UMK sangat mendominasi aktivitas ekonomi industri manufaktur di Indonesia dengan jumlah usaha/perusahaan sebanyak 4,37 juta atau 99,03 persen, tapi hanya menyerap tenaga kerja sebanyak 9,3 juta orang atau 58,44 persen dari total seluruh tenaga kerja industri manufaktur.

Di Pulau Jawa, sebaran usaha/perusahaan skala UMK lebih banyak terdapat di Jawa Tengah (36,21 persen), diikuti Jawa Timur (30,36 persen), dan Jawa Barat (21,42 persen). Di Jawa Tengah, sebaran usaha/perusahaan ini hampir merata antar kabupaten/kota, dengan sebaran antara 0,36 persen di Salatiga hingga 6,53 persen di Kebumen.

Kondisi ini juga terjadi di Jawa Timur dengan sebaran antara 0,38 persen di Batu hingga 6,47 persen di Sumenep. Sedangkan, sebaran di Jawa Barat lebih terkonsentrasi di daerah Bandung dan Tasikmalaya (14,16 persen dan 12,31 persen).

Tabel 1.3
Sebaran Usaha/Perusahaan Industri Manufaktur Skala UMK dan Tenaga Kerja (000 orang) menurut Pulau, 2016

Provinsi	UMK					
	Usaha	Distribusi Usaha	% thd Total Usaha UMK non tani	Tenaga Kerja (000 orang)	Distribusi Tenaga Kerja	% thd Tenaga Kerja UMK (non-tani)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sumatra	596.919	13,65	2,27	1.124,77	12,03	2,10
Jawa	2.804.685	64,12	10,68	6.276,40	67,12	11,70
Bali & Nusa Tenggara	367.367	8,40	1,40	789,13	8,44	1,47
Kalimantan	151.603	3,47	0,58	281,02	3,00	0,52
Sulawesi	388.144	8,87	1,48	758,01	8,11	1,41
Maluku & Papua	65.103	1,49	0,25	122,38	1,31	0,23
Jumlah	4.373.821	100	16,65	9.351,71	100	17,43

Sumber : BPS

Informasi lain yang disajikan untuk menjelaskan karakteristik industri manufaktur di Indonesia adalah waktu dimulainya suatu usaha/perusahaan untuk memulai usaha atau beroperasi. Melalui informasi ini, dapat diketahui pada periode mana sajakah jumlah usaha/perusahaan industri manufaktur tumbuh pesat, yang dapat digunakan sebagai indikasi bahwa kondisi pada saat itu sangat kondusif bagi usaha/perusahaan untuk memulai usaha.

Dari pengelompokan periode mulai usaha yang disajikan pada Tabel 1.4, secara umum ditunjukkan bahwa pertumbuhan yang tinggi terjadi selama periode 2011-2015. Pertumbuhan yang tinggi ini terutama terjadi pada usaha mikro, dengan penambahan usaha sekitar 574 ribu usaha/perusahaan. Salah satu penyebab pesatnya pertumbuhan UMK adalah adanya krisis ekonomi global pada 2008. Krisis ekonomi global berdampak langsung pada usaha besar, terutama yang berhubungan dengan ekspor. Meskipun pertumbuhan ekonomi

Indonesia stabil pada angka 5 persen, krisis global tersebut tetap memberi dampak buruk terhadap UMB namun pada satu sisi justru menumbuhkan UMK di daerah. Pertumbuhan UMK di daerah juga didorong oleh program kredit UMKM yang diberikan oleh Bank Indonesia (BI).

Bila dilihat dari sisi besaran pertumbuhan usaha/perusahaan antar tahun, pertumbuhan industri manufaktur tertinggi terjadi pada periode 1996-2000. Hal ini cukup menarik karena merupakan periode terjadinya krisis ekonomi tahun 1998. Meskipun terjadi krisis ekonomi, tampaknya hal ini tidak berpengaruh terhadap usaha/perusahaan berkategori mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pratomo (2004) mencatat beberapa faktor yang menyebabkan bertambahnya pelaku UMKM setelah krisis ekonomi yaitu:

Tabel 1.4

Jumlah Usaha Industri menurut Tahun Mulai Beroperasi dan Skala Usaha, 2016

Tahun	UMK		UMB		Total
	Mikro	Kecil	Menengah	Besar	
<1980	206.212	17.242	1.746	1.241	226.441
1981 – 1985	99.520	10.147	1.026	511	111.204
1986 – 1990	218.681	20.136	1.740	843	241.400
1991 – 1995	195.290	22.291	2.271	1.146	220.998
1996 – 2000	519.400	52.529	4.324	1.524	577.777
2001 – 2005	451.139	46.252	4.426	1.515	503.332
2006 – 2010	797.953	77.102	6.374	1.767	883.196
2011 – 2015	1.372.422	108.691	8.929	2.453	1.492.495
2016	151.305	7.509	539	93	159.446
Total	4.011.922	361.899	31.375	11.093	4.416.289

Sumber : BPS

1. Produk UMKM umumnya merupakan barang konsumsi dengan elastisitas permintaan terhadap pendapatan yang rendah, sehingga ketika terjadi perubahan tingkat pendapatan (penurunan) akibat krisis ekonomi, tidak banyak berpengaruh terhadap permintaan barang yang dihasilkan.
2. Sebagian besar UKM tidak mendapat modal dari bank sehingga mereka terhindar dari beban biaya bunga tinggi akibat adanya peningkatan suku bunga ketika terjadi krisis di sektor perbankan.
3. Hambatan keluar-masuk dalam industri yang ditekuni pelaku UMKM hampir tidak ada.
4. Adanya krisis ekonomi menyebabkan sektor formal banyak memberhentikan pekerjanya. Para penganggur ini akhirnya memasuki sektor informal, melakukan kegiatan usaha yang umumnya berskala kecil, akibatnya jumlah pelaku UMKM meningkat.

Pada tahun 2001 – 2005, jumlah usaha/

perusahaan industri manufaktur yang memulai usaha sedikit menurun dibanding periode sebelumnya. Penurunan ini diindikasikan sebagai dampak dari kondisi keamanan dan politik yang kurang begitu stabil, yang ditandai dengan adanya perubahan pemerintahan. Kondisi kondusif yang mulai terjadi sejak 2005, mendorong para pengusaha kembali membuka usaha baru atau menghidupkan usahanya sebelumnya.

Penambahan jumlah usaha/perusahaan industri manufaktur baru yang terjadi selama periode 2011 – 2015, terjadi di seluruh pulau terutama di Jawa (sekitar 352 ribu usaha/perusahaan). Bahkan, di Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku & Papua, terjadi penambahan usaha/perusahaan sebanyak dua kali lipat. Penambahan yang cukup besar ini terutama mulai terjadi sejak periode 2006-2010. Hal ini menunjukkan bahwa iklim bisnis yang kondusif telah terjadi secara merata di seluruh Indonesia sejak terjadinya krisis ekonomi dan perubahan pemerintahan.

Tabel 1.5
Jumlah Usaha Industri menurut Pulau dan Tahun Mulai Beroperasi, 2016

Tahun	Sumatra	Jawa	Bali & Nusa Tenggara	Kalimantan	Sulawesi	Maluku & Papua
<1980	17.798	171.402	16.018	4.889	14.531	1.803
1981 – 1985	8.650	83.239	8.310	2.423	7.374	1.208
1986 – 1990	22.566	170.947	21.467	5.768	17.684	2.968
1991 – 1995	21.551	155.839	18.288	6.482	16.181	2.657
1996 – 2000	65.992	384.096	53.151	16.921	49.412	8.205
2001 – 2005	62.551	331.243	43.746	16.118	41.740	7.934
2006 – 2010	132.213	552.599	75.960	31.127	78.896	12.401
2011 – 2015	239.170	904.323	120.403	60.426	143.024	25.149
2016	30.945	85.588	11.012	8.353	20.590	2.958
Total	601.436	2.839.276	368.355	152.507	389.432	65.283

Sumber : BPS

bab
2



Pola
Aglomerasi Industri
Manufaktur

Pola Aglomerasi Industri Manufaktur

A. Konsep dan Metodologi Pengukuran

Berkumpulnya pengrajin batik yang ada di Pekalongan Jawa Tengah hingga pabrik-pabrik barang elektronik dan otomotif yang ada di Karawang Jawa Barat, merupakan dua contoh pemusatan usaha/perusahaan industri manufaktur pada suatu lokasi/wilayah di Indonesia. Terkonsentrasinya kegiatan-kegiatan ekonomi sejenis pada suatu wilayah sering dimaknai sebagai aglomerasi. Istilah aglomerasi muncul pertama kali pada tahun 1920 oleh Marshall yang mengatakan bahwa aglomerasi ekonomi terjadi ketika suatu industri memilih lokasi kegiatan produksi yang memungkinkan operasional perusahaan tersebut dapat berlangsung dalam jangka panjang. Hal tersebut akan menguntungkan masyarakat yang ikut mendirikan usaha di sekitar lokasi tersebut (Cholis, 2015). Sementara itu, Montgomery dalam Kuntjoro (2002) berpendapat bahwa penghematan aglomerasi merupakan penghematan yang diasosiasikan dengan pengelompokan perusahaan, tenaga kerja, dan konsumen secara spasial untuk meminimisasi biaya-biaya seperti biaya transportasi, informasi, dan komunikasi.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, aglomerasi industri dapat diartikan sebagai berkumpulnya atau terkonsentrasinya industri pada suatu lokasi/wilayah. Swardnidi (2016) menyebutkan bahwa aglomerasi industri merupakan salah satu indikator berkembangnya peranan industri manufaktur di suatu wilayah. Aglomerasi industri dianggap dapat meningkatkan efisiensi yang pada akhirnya meningkatkan daya saing industri manufaktur. Terdapat beberapa keuntungan dari aglomerasi, diantaranya sebagai berikut (Capello dalam Swardnidi, 2016):

1. Keuntungan internal untuk perusahaan, juga disebut *economic of scale*. Keuntungan ini disebabkan adanya proses produksi dalam skala besar sehingga menurunkan biaya per unit *output* (menurunkan *average cost*).
2. Keuntungan eksternal untuk perusahaan tetapi internal untuk sektor, atau disebut juga *localization economies*. Keuntungan

Aglomerasi industri manufaktur menggambarkan konsentrasi kegiatan ekonomi industri pada suatu lokasi/wilayah. Aglomerasi ini paling banyak terjadi di Pulau Jawa, baik menurut skala (mikro, kecil, menengah, besar) maupun jenis industrinya. Melalui program MP3EI dan KEK, telah terbentuk sentra-sentra industri manufaktur di luar Jawa.

ini diperoleh karena di daerah padat penduduk perusahaan-perusahaan beroperasi pada sektor yang sama. Sementara itu, skala ekonomis bergantung pada ukuran perusahaan atau pabrik-pabrik tersebut. *Localization* ditentukan oleh ukuran dari sektor di wilayah tersebut dengan berbagai pilihan terhadap tenaga kerja yang terampil dan *specific managerial* serta keahlian teknis yang tersedia.

- Keuntungan eksternal untuk perusahaan dan sektor atau disebut *urbanization economies*. Keuntungan ini disebabkan oleh kepadatan yang tinggi dan berbagai kegiatan produktif lain pada suatu daerah. Kondisi ini biasanya melambangkan daerah perkotaan.

Pada publikasi ini, aglomerasi industri diukur dengan menggunakan Indeks Spesialisasi Industri (SI). Adapun formula yang digunakan untuk menghitung indeks SI adalah (Capello, 2009):

$$SI_i = \frac{E_{ri}/E_{*i}}{E_{r**}/E_{**}}$$

di mana:

- E_{ri} : tenaga kerja industri di pulau/

provinsi i

- E_{*i} : total tenaga kerja di pulau/provinsi i
- E_{r**} : total tenaga kerja industri nasional
- E_{**} : total tenaga kerja nasional

Apabila $SI_i > 1$, suatu industri manufaktur secara relatif dianggap teraglomerasi pada wilayah i. Artinya, kategori industri manufaktur layak dikembangkan di wilayah ini. Sementara itu apabila $SI_i < 1$, maka industri tersebut secara relatif dianggap tidak teraglomerasi pada wilayah i. Artinya, kategori industri manufaktur kurang layak dikembangkan di wilayah ini. Lebih jauh, jika indeks spesialisasi bernilai di atas 4, maka aglomerasi di daerah tersebut dapat dikatakan kuat. Jika nilainya antara 2 sampai dengan 4, aglomerasi dikatakan sedang dan jika nilainya antara 1 sampai 2, maka aglomerasi dikategorikan lemah (Balassa dalam Swardnidi, 2016).

B. Pola Aglomerasi Industri Manufaktur menurut Pulau

Setelah dilakukan perhitungan terhadap aglomerasi industri manufaktur menurut pulau, diperoleh pola aglomerasi seperti digambarkan dalam peta berikut:

Gambar 2.1

Pola Aglomerasi Industri Manufaktur menurut Pulau, 2016



Gambar 2.1 memperlihatkan bahwa industri manufaktur paling banyak teraglomerasi di Pulau Jawa. Terdapat lima dari enam provinsi yang mengalami aglomerasi industri, yaitu Jawa Barat dengan nilai SI sebesar 1,1828, Jawa Tengah (1,4684), D.I. Yogyakarta (1,2478), Jawa Timur (1,0501), dan Banten (1,5912). Sementara itu, DKI Jakarta tidak mengalami aglomerasi industri (0,6102). Mengacu pada penafsiran indeks spesialisasi oleh Balassa, maka aglomerasi industri manufaktur di Pulau Jawa masih tergolong lemah.

Berdasarkan hal tersebut, juga dapat dikatakan bahwa industri manufaktur di Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Hal ini sejalan dengan hasil studi Kuncoro (2002) yang menemukan bahwa pusat konsentrasi industri manufaktur di Indonesia adalah di Pulau Jawa. Mulyadi (2017) mengemukakan bahwa terkonsentrasinya industri di Pulau Jawa masih akan terjadi hingga tahun 2025. Hal ini dikarenakan Pulau Jawa lebih siap menjadi lokasi pengembangan industri dari sisi sumber daya manusia, infrastruktur, dan sumber daya alam (www.kemenperin.go.id).

Saat ini industri manufaktur masih terkonsentrasikan di Pulau Jawa, namun tidak menutup kemungkinan akan muncul konsentrasi-konsentrasi industri manufaktur baru di luar Pulau Jawa. Hal ini sesuai rencana yang tercantum dalam program RPJMN 2015-2019 Kementerian Perindustrian yang menetapkan percepatan pembangunan 14 kawasan industri di luar

Pulau Jawa sampai dengan tahun 2019, sebagaimana telah dikemukakan pada Bab I. Di Pulau Sumatera, industri manufaktur teraglomerasi di Provinsi Kepulauan Riau dengan nilai indeks spesialisasi industri sebesar 1,2886 atau teraglomerasi lemah. Meskipun demikian, adanya konsentrasi industri manufaktur di Pulau Sumatera tersebut merupakan sinyal yang bagus apabila dikaitkan dengan fokus pengembangan industri di luar Pulau Jawa. Presiden RI dalam rapat terbatas tentang pelaksanaan proyek strategis nasional dan program prioritas di Kepulauan Riau pada Maret 2017 mengemukakan bahwa gugus pulau besar di Kepulauan Riau seperti Natuna, Anambas, Lingga, Karimun, Bintan, Batam, dan Tanjung Pinang akan dikembangkan sebagai sentra-sentra industri baru. Natuna misalnya, akan dikembangkan menjadi sentra industri kelautan dan perikanan serta migas, sedangkan Karimun akan dikembangkan menjadi sentra industri manufaktur.

Selain Jawa dan Sumatera, juga terdapat aglomerasi industri manufaktur di Sulawesi Tengah (nilai indeks 1,2409), dan di Nusa Tenggara Barat (nilai indeks 1,2134).

Selain Jawa dan Sumatera, juga terdapat aglomerasi industri manufaktur di Sulawesi Tengah (nilai indeks 1,2409), dan di Nusa Tenggara Barat (nilai indeks 1,2134). Meskipun aglomerasi di kedua provinsi ini tergolong lemah, namun hal ini menunjukkan bahwa industri manufaktur telah menjadi sektor unggul yang layak dikembangkan. Hal ini sejalan dengan rencana pemerintah yang akan menjadikan Sulawesi Tengah dan NTB sebagai dua sentra industri di luar Pulau Jawa.

Di Sulawesi Tengah, pemerintah tengah mengembangkan kawasan industri di Palu dan Morowali, dengan fokus pengembangan industri pengolahan nikel dan bijih besi, industri pengolahan kakao, rumput laut, dan rotan di Kota Palu, dan industri baja dan logam di Kabupaten Morowali. Sementara di NTB, pemerintah akan mengembangkan industri pengolahan tebu.

Di sisi lain, tidak terjadi aglomerasi industri manufaktur di Pulau Kalimantan, Maluku, dan Papua. Hal ini sesuai dengan rendahnya kontribusi kategori ini dibanding kategori lainnya. Sebagai contoh, pada tahun 2016, kontribusi industri manufaktur di Kalimantan Timur hanya sebesar 21,35 persen, jauh lebih rendah dibanding kontribusi pertambangan dan penggalian (48,44 persen).

Di Maluku, industri manufaktur hanya berkontribusi 5,44 persen. Bahkan kontribusi industri manufaktur di Papua sangat kecil, hanya 1,90 persen. Meskipun demikian, pemerintah terus berupaya untuk mengembangkan industri manufaktur di ketiga daerah tersebut dengan membangun kawasan industri di Bintuni (Papua Barat), Buli (Maluku Utara), Batu Licin (Kalimantan Selatan), Ketapang (Kalimantan Barat), Landak (Kalimantan Barat), dan Jorong (Kalimantan Selatan).

C. Pola Aglomerasi Industri Manufaktur menurut Skala Usaha

1. Industri Manufaktur Skala Mikro

Bila ditinjau dari sisi jumlah, industri manufaktur skala mikro (jumlah tenaga kerja satu hingga empat orang) sangat mendominasi aktivitas ekonomi industri

manufaktur di Indonesia. SE2016 mencatat sebanyak 4,01 juta usaha/perusahaan atau 90,84 persen, dan menyerap tenaga kerja sebanyak 6,42 juta orang atau 40,16 persen dari total tenaga kerja industri manufaktur.

Sehingga industri ini juga memiliki peranan penting dalam menunjang perekonomian negara. Dominasi usaha ini disebabkan oleh kemudahan dalam membangun usaha skala ini, tanpa perizinan yang rumit, dan bahkan cukup dengan tenaga sendiri atau keluarga. Sehingga, ketika kondisi perekonomian kondusif, jumlah industri ini dapat tumbuh pesat.

Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang terkait langsung dengan UKM, Pemerintah telah menyusun tiga butir kebijakan pokok di bidang ekonomi. Pertama, peningkatan layanan jasa keuangan khususnya untuk pelaku UKM, yang meliputi perbaikan layanan jasa perbankan, pasar modal, *multifinance*, asuransi. Kebijakan pokok kedua, peningkatan infrastruktur layanan jasa keuangan, berupa akses pasar, layanan penagihan dan pembayaran, kemudahan investasi dan menabung, serta dukungan umum atas pelaksanaan transaksi perdagangan.

Peningkatan layanan jasa dan infrastruktur pendukungnya tidak akan berarti banyak tanpa upaya pembenahan menyeluruh untuk meningkatkan kemampuan *entrepreneurship* pelaku UKM. Kebijakan pokok ketiga, meningkatkan kemampuan dan penguasaan aspek-aspek teknis dan manajemen usaha, pengembangan produk dan penjualan, administrasi keuangan, dan kewirausahaan secara menyeluruh.

Tulus Tambunan (2002) sebagaimana

dikutip oleh Choirul Djahhari (2004: 522), mengemukakan bahwa “Di Indonesia kebijakan terhadap UKM lebih sering dikaitkan dengan upaya pemerintah mengurangi pengangguran, memerangi kemiskinan dan pemerataan pendapatan. Karena itu pengembangan UKM sering dianggap secara tidak langsung sebagai kebijakan penciptaan kesempatan kerja, atau kebijakan redistribusi pendapatan”. Kebijakan UKM di Indonesia masih cenderung bersifat sosial dibanding untuk persaingan pasar secara makro.

Mengingat besarnya jumlah usaha ini dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia, maka Pemerintah harus mengetahui di daerah mana saja industri manufaktur skala mikro ini teraglomerasi, sehingga dapat disusun rencana pengembangan usahanya.

Gambar 2.2.
Pola Aglomerasi Usaha Industri Mikro menurut Provinsi, 2016



Dengan menggunakan penghitungan indeks SI, industri manufaktur skala mikro teraglomerasi di 12 provinsi (berwarna lebih tebal), yaitu Nanggroe Aceh Darussalam, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Bali, NTB, NTT, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Maluku. Nilai indeks SI tertinggi terdapat di Sulawesi Tengah (1,93).

Namun, menurut pengkategorian indeks SI dari Balassa, semua provinsi tersebut masuk pada golongan aglomerasi lemah dengan nilai indeks antara satu hingga dua.

Berdasarkan hasil SE2016, Provinsi Sulawesi Tengah tercatat memiliki 84,68 ribu usaha/perusahaan berskala mikro atau 91,67 persen dari 92,38 ribu usaha/perusahaan industri manufaktur di provinsi ini, dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 158,70 ribu pekerja. Dengan kata lain, setiap usaha rata-rata menggunakan hampir dua orang pekerja, umumnya merupakan pekerja keluarga.

Gambar 2.3 menyajikan pola aglomerasi industri manufaktur skala mikro pada level yang lebih rendah, yaitu kabupaten/kota, dengan menggunakan perbandingan pekerja nasional sebagai penyebutnya. Semakin gelap warnanya semakin besar aglomerasi yang terjadi. Diperoleh hasil bahwa, terdapat 182 kabupaten/kota yang mengalami aglomerasi industri dengan nilai indeks SI lebih dari satu, di mana 146 kabupaten/kota berkategori aglomerasi lemah dan sisanya 36 kabupaten/kota berkategori sedang.

Bila dibandingkan antara Gambar 2.2 dan 2.3, dapat diketahui bahwa aglomerasi yang terjadi pada suatu provinsi, tidak serta merta akan terjadi secara menyeluruh pada seluruh atau sebagian besar kabupaten/kota dalam provinsi tersebut, misalnya Aceh. Sebaliknya, pada level provinsi, suatu provinsi mungkin tidak teraglomerasi, namun dimungkinkan terdapat satu atau beberapa kabupaten/kota yang teraglomerasi pada level kabupaten/kota. Misalnya Kalimantan Barat, meskipun tingkat aglomerasinya tergolong rendah

Gambar 2.3.
Pola Aglomerasi Usaha Industri Mikro menurut Kabupaten/Kota, 2016



namun terdapat beberapa kabupaten/kota yang teraglomerasi industri. Dengan demikian, informasi pola aglomerasi sangat diperlukan hingga level kecil untuk diperoleh gambaran sejauhmana sebaran aglomerasi yang terjadi pada suatu wilayah.

Gambar 2.3., juga menunjukkan adanya enam kabupaten/kota yang memiliki tingkat aglomerasi yang relatif tinggi (dengan nilai indeks SI di atas tiga), yaitu Kabupaten Gayo Lues, Gunung Kidul, Maluku Tenggara Barat, Sumba Barat Daya, Kep. Talaud, dan Banggai Kepulauan.

Kabupaten Gayo Lues merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Aceh yang terkenal dengan pesona alamnya. Di kabupaten ini, industri skala mikro didominasi Industri Bahan Kimia dan

Barang dari Bahan Kimia, sekitar 80,29 persen (5,85 ribu usaha) dari keseluruhan industri pengolahan mikro di kabupaten.

Kabupaten Gunung Kidul (DI Yogyakarta) memiliki beragam potensi perekonomian, baik pertanian, industri (skala mikro), maupun keindahan alamnya. Industri pengolahan skala mikro lebih didominasi oleh industri makanan (77,54 persen atau 40,11 ribu usaha), bahkan industri jenis ini juga dominan (72,96 persen) dalam industri manufaktur di Kabupaten ini.

Dominasi industri makanan juga terdapat di Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Provinsi Maluku) yang secara geografis berbatasan dengan Australia dan Timor Leste. Terdapat sekitar 5,56 ribu usaha skala ini di Kabupaten ini, atau mendominasi sebesar 73,43 persen dari keseluruhan

industri. Kabupaten ini juga memiliki beragam potensi SDA yang mendorong perkembangan industri skala mikro.

Dominasi makanan ternyata juga terjadi pada kabupaten lain yang teraglomerasi, seperti Kabupaten Kepulauan Talud Provinsi Sulawesi Utara (90,96 persen atau 3,98 ribu usaha), dan Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah (82,84 persen atau 7,12 ribu usaha). Sedangkan Kabupaten Sumba Barat Daya (Provinsi Nusa Tenggara Timur) lebih didominasi oleh industri mikro tekstil (88,04 persen atau 9,86 ribu usaha), khususnya industri kain tenun ikat. Hal ini didorong oleh tingginya budaya dan karya seni tenun yang terdapat di masyarakat.

2. Industri Manufaktur Skala Kecil

Sebagaimana industri manufaktur berskala mikro, industri berskala kecil juga tersebar di seluruh wilayah Indonesia meskipun dalam jumlah yang lebih kecil. SE206-L mencatat, pada tahun 2016 terdapat 361,90 ribu usaha/perusahaan atau 8,19 persen dari total usaha/perusahaan industri manufaktur, dan menyerap tenaga kerja sekitar 2,93 juta orang (18,29 persen). Sehingga secara rata-rata, setiap usaha/perusahaan skala ini menggunakan delapan orang pekerja, baik pekerja keluarga maupun pekerja yang dibayar.

Agglomerasi industri skala ini ternyata hanya terdapat di enam provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Tengah. Berdasarkan pengkategorian Balassa,

Nusa Tenggara Barat menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang masuk dalam kategori aglomerasi sedang dengan nilai indeks SI sebesar 2,0266. Sedangkan kelima provinsi lainnya masih berkategori lemah.

Di Provinsi Nusa Tenggara Barat, terdapat 21,71 ribu usaha/perusahaan industri manufaktur berskala kecil atau 16,68 persen dari seluruh jenis skala perusahaan di provinsi ini dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 461,32 ribu orang atau 32,54 persen. Industri ini didominasi oleh industri pengolahan tembakau, sebanyak 17,72 ribu usaha atau 81,64 persen dari keseluruhan usaha industri pengolahan kecil di provinsi tersebut. Melihat potensi tersebut, pemerintah NTB mengeluarkan kebijakan untuk memperjuangkan RUU proteksi terhadap petani tembakau untuk mendorong industri tersebut agar terus berkembang.

Bila dikaji pada level kabupaten/kota, terdapat 73 kabupaten/kota yang teraglomerasi, di mana 61 kabupaten/kota berkategori lemah dan 12 kabupaten/kota berkategori sedang. Selain itu, terdapat empat kabupaten dengan nilai indeks SI di atas tiga, yaitu Kabupaten Temanggung (Jawa Tengah), Pamekasan dan Sumenep (Jawa Timur), dan Lombok Timur (NTB).

Sebagian besar wilayah geografis Kabupaten Temanggung berupa dataran tinggi dan pegunungan. Pertanian tembakau banyak ditemukan di wilayah ini dan sekitarnya, sehingga industri manufaktur skala kecil didominasi oleh pengolahan tembakau.

Dominasi usaha makanan tidak terjadi pada seluruh kabupaten yang teraglomerasi

Gambar 2.4
Pola Aglomerasi Usaha Industri Kecil menurut Provinsi, 2016

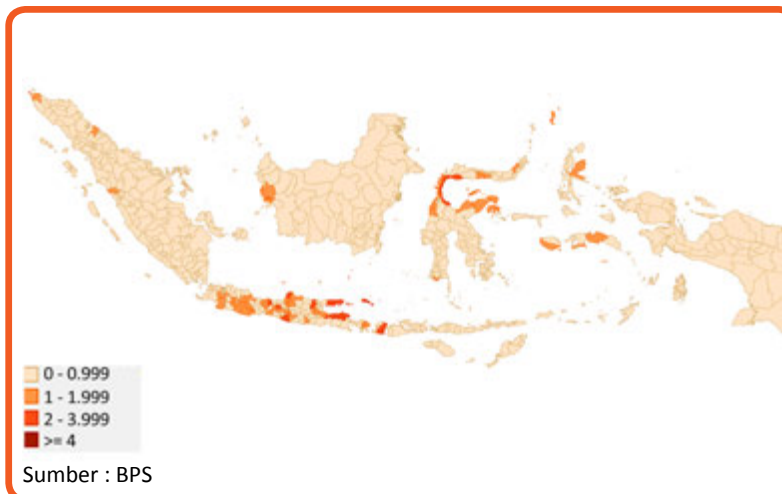


Pada tahun 2016, terdapat 11,45 ribu usaha pengolahan kecil tembakau atau sebesar 93,09 persen dari seluruh usaha industri kecil di kabupaten ini.

Dominasi industri pengolahan tembakau berskala kecil juga terdapat di Kabupaten Pamekasan, Sumenep dan Lombok Timur, masing-masing sebanyak 97,14 persen, 91,95 persen, dan 91,14 persen dari

keseluruhan industri kecil di kabupaten. Dengan demikian, aglomerasi yang terjadi lebih diakibatkan adanya konsentrasi industri pengolahan tembakau yang sangat dominan di ke-empat wilayah tersebut. Hal tersebut didukung oleh kondisi geografis dan lingkungan yang mendukung usaha pertanian tembakau.

Gambar 2.5
Pola Aglomerasi Usaha Industri Kecil menurut Kabupaten/Kota, 2016



Gambar 2.6
Pola Aglomerasi pada Usaha Industri Menengah Menurut Provinsi, 2016



3. Industri Manufaktur Skala Menengah

Berdasarkan kriteria BPS, industri ini memperkerjakan 20 hingga 99 orang, baik pekerja dibayar maupun keluarga. Pada tahun 2016, tercatat sebanyak 31,4 ribu usaha/perusahaan yang beroperasi di seluruh wilayah Indonesia. Penyerapan tenaga kerja skala ini paling kecil (7,33 persen) dibanding skala industri lainnya. Pemerintah seringkali mengelompokkan industri skala ini dengan skala usaha

mikro dan kecil (disebut sebagai UMKM) atau hanya dengan industri kecil (IKM), sehingga kebijakan yang disusun seringkali terintegrasi dengan industri skala lainnya. Sebagai contoh, Kebijakan Kementerian Perindustrian untuk memacu kemajuan IKM nasional guna meningkatkan devisa dan penyerapan tenaga kerja, antara lain berupa program Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), pembiayaan penjaminan asuransi, jasa konsultasi, serta pemberian bantuan mesin produksi.

Gambar 2.7
Pola Aglomerasi pada Usaha Industri Menengah Menurut Kabupaten/Kota, 2016



Gambar 2.6 di atas menunjukkan adanya aglomerasi skala ini di lima provinsi, yakni Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, keempatnya dengan kategori lemah, dan Banten dengan kategori sedang. Meskipun berskala sedang, namun jumlah industri manufaktur di Banten untuk skala ini relatif sedikit. Menurut hasil SE2016-L, di Banten hanya terdapat 3,29 ribu usaha/perusahaan atau hanya sekitar 3,25 persen, dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 138,61 ribu pekerja (29,7 persen). Para pekerja tersebut lebih banyak terserap di industri Industri Karet, Barang dari Karet, dan Plastik, dan industri pengolahan makanan yang mendominasi ragam jenis industri di provinsi ini (13,69 persen dan 11,75 persen).

Gambar 2.7 di atas menyajikan 141 kabupaten/kota yang teraglomerasi industri manufaktur menengah, di mana 95 kabupaten/kota berkategori lemah, 43 kabupaten/berkategori sedang, dan 3 kabupaten/kota berkategori kuat. Kabupaten yang termasuk kategori aglomerasi kuat adalah Kota Bandung, Kabupaten Pekalongan, dan Kabupaten Jepara.

Kota Bandung juga sering disebut Paris van Java karena memiliki usaha/perusahaan industri pakaian jadi yang cukup banyak. Terdapat 282 usaha/perusahaan industri jenis ini yang berskala menengah atau sekitar 30,72 persen dari usaha industri menengah di kota tersebut. Adapun Pekalongan dikenal dengan Batiknya. Industri tekstil teraglomerasi kuat di kabupaten ini, dengan 174 usaha/perusahaan menengah atau 53,7 persen dari industri menengah.

Kabupaten Jepara tidak hanya terkenal dengan kualitas kayunya, tapi juga ukirannya yang menjadi salah satu kekayaan

intelektual dengan kearifan lokal. Industri furnitur mendominasi industri kabupaten ini, khususnya pada skala menengah, dengan jumlah usaha 432 usaha/perusahaan (71,3 persen dari seluruh usaha industri menengah di kabupaten ini). Untuk menunjang industri ini, pemerintah kabupaten Jepara telah menargetkan pembangunan kawasan industri serta pelabuhan, yang dimulai pada tahun 2017. Selain itu pembangunan infrastruktur juga terus dilakukan untuk memberikan berbagai kemudahan agar industri ini terus maju.

4. Industri Manufaktur Skala Besar

Usaha/perusahaan skala ini memiliki jumlah pekerja 100 orang atau lebih. Industri ini teraglomerasi di delapan provinsi, yaitu Sumatera Utara, Riau, Lampung, Kepulauan Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten, di mana seluruhnya berkategori lemah. Sebagaimana dikemukakan di Bab I, jumlah usaha/perusahaan skala ini paling banyak terdapat di Jawa Barat. Sayangnya, sebagian besar usaha/perusahaan ini hanya berlokasi di enam kabupaten/kota saja, yaitu Kabupaten Bandung, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Majalengka, Kota Bandung, dan Kota Cirebon.

Gambar 2.8
Pola Aglomerasi Usaha Industri Besar
Menurut Provinsi, 2016



Sumber : BPS

Gambar 2.9
Pola Aglomerasi pada Usaha Industri Besar Menurut Kabupaten/Kota, 2016



Penghitungan indeks SI menurut kabupaten/kota di Indonesia pada industri manufaktur berskala besar menghasilkan adanya 73 kabupaten/kota yang teraglomerasi, yang seluruhnya berkategori lemah. Dari ke-73 kabupaten/kota tersebut, nilai indeks SI tertinggi terdapat di Kabupaten Padang Lawas Utara dan Padang Lawas (Sumatera Utara), Kayong Utara (Kalimantan Barat), dan Bolaang Mongondow Timur (Sulawesi Utara). Keempat kabupaten tersebut memiliki indeks SI yang sama, sebesar 1,56. Industri skala besar yang dominan pada Kabupaten Padang Lawas Utara, Padang Lawas, dan Kayong Utara adalah industri makanan, sedangkan di Kabupaten Mongondow Timur berupa industri logam dasar.

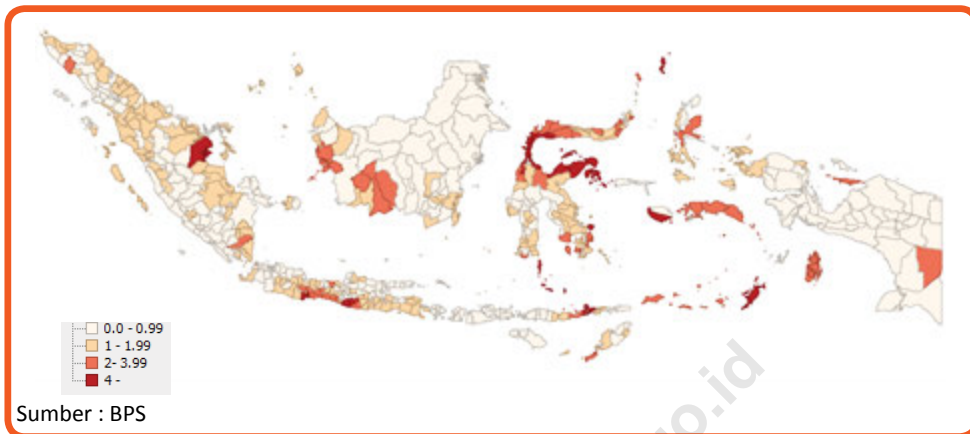
D. Pola Aglomerasi Industri Manufaktur menurut Sub-Kategori

Pada bagian ini disajikan bagaimana bentuk pola aglomerasi industri manufaktur yang dirinci menurut beberapa sub-kategori usaha utama.

1. Pola Aglomerasi Industri Makanan dan Minuman

Industri makanan (kode KBLI 10) mencakup kegiatan pengolahan produk pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi makanan, dan juga mencakup produk setengah jadi yang tidak secara langsung menjadi produk makanan tetapi mampu menghasilkan nilai tambah. Berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2015, klasifikasi industri makanan mencakup mulai dari produk hewan, ikan, dan produk-produk nabati yang lain. Contoh dari industri makanan misalnya industri pengolahan daging, industri pengolahan ikan, industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran, industri tahu, tempe, industri minyak dan lemak nabati dan hewani, industri susu, tepung, roti, kecap, hingga industri makanan hewan. Adapun peta aglomerasi industri makanan di Indonesia adalah sebagai berikut:

Gambar 2.10
Pola Aglomerasi Industri Makanan menurut Pulau di Indonesia, 2016



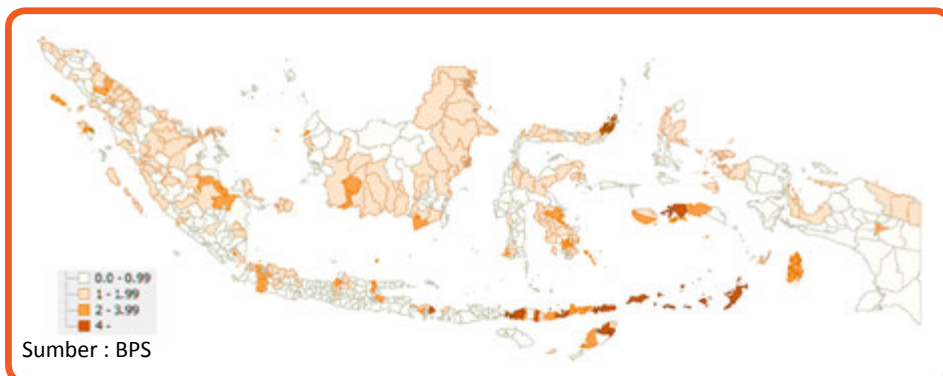
Gambar di atas menunjukkan adanya aglomerasi industri makanan di sebagian besar daerah Sumatera, Jawa, Sulawesi dan Maluku. Di Kalimantan, industri makanan teraglomerasi hanya di bagian barat dan selatan. Di Nusa Tenggara, aglomerasi industri makanan terjadi di wilayah timur. Sedangkan di Papua, industri makanan teraglomerasi hanya di sebagian kecil wilayah Papua dan Papua Barat.

Industri minuman (kode KBLI 11) mencakup

pembuatan minuman beralkohol dan tidak beralkohol, air minum dalam kemasan, air minum mineral, bir dan anggur, dan pembuatan minuman beralkohol yang disuling/didestilasi. Industri minuman tidak mencakup pembuatan jus buah-buahan dan sayuran, minuman dengan bahan baku susu, dan pembuatan produk teh, kopi, dan produk teh dengan kadar kafein yang tinggi.

Adapun pola sebaran aglomerasi industri ini sebagai berikut:

Gambar 2.11
Pola Aglomerasi Industri Minuman menurut Pulau, 2016



Sama halnya dengan industri makanan, aglomerasi industri minuman juga cukup tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku, terlihat bahwa sebagian besar daerah mengalami aglomerasi industri ini. Bahkan banyak daerah di NTT memiliki aglomerasi yang kuat. Di Pulau Jawa, industri minuman relatif teraglomerasi hanya di bagian barat dan timur pulau ini. Sedangkan di Papua, industri ini teraglomerasi di beberapa daerah yaitu Kabupaten Raja Ampat, Sorong, Teluk Wondama, Kota Sorong, Nabire, Kepulauan Yapen, Jayawijaya, Sarmi, Jayapura, dan Keerom.

Banyaknya konsentrasi industri makanan dan minuman di Indonesia diindikasikan terjadi karena produk makanan dan minuman merupakan kebutuhan primer yang memang dibutuhkan oleh sekitar 238 juta jiwa penduduk Indonesia (hasil Sensus Penduduk 2010). Selain itu, berbagai daerah di Indonesia memiliki kekhasan produk kuliner masing-masing yang diminati oleh masyarakat (*The Indonesia Institute*, 2017).

Dapat dikatakan bahwa industri makanan dan minuman merupakan subsektor yang cukup strategis. Menteri perindustrian, Airlangga Hartanto, mengatakan

Industri makanan dan minuman memiliki peranan penting. Kontribusinya terus meningkat antar tahun di tengah menurunnya kontribusi industri manufaktur secara umum. Selain itu, kontribusinya juga paling besar dibanding sub-kategori yang lain, yaitu 6,22 persen pada tahun 2016 bila dilihat dari kontribusinya terhadap PDB

bahwa industri makanan dan minuman diperkirakan akan mengalami pertumbuhan paling tinggi dan mampu menjadi salah satu motor penggerak yang mampu berkontribusi terhadap perekonomian nasional (Republika.co.id, 22/12/16).

Tidak hanya itu, menurut Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (Gapmmi), industri makanan dan minuman dinilai paling siap dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) (kemenperin.go.id).

Pada tahun 2015, pertumbuhan industri makanan dan minuman nasional mencapai 8,16 persen. Angka ini lebih tinggi dari pertumbuhan industri non-migas (5,21 persen). Angka ini mengalami peningkatan pada tahun 2016. Industri makanan dan minuman tumbuh sebesar 8,2 – 8,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya (*The Indonesia Institute*, 2017).

Ditinjau dari kontribusi terhadap PDB, industri makanan dan minuman memiliki peranan penting. Kontribusinya terus meningkat antar tahun di tengah menurunnya kontribusi industri manufaktur secara umum. Selain itu, kontribusinya juga paling besar dibanding sub-kategori yang lain, yaitu 6,22 persen pada tahun 2016.

Tabel 2.1
Distribusi PDB Nasional menurut Lapangan Usaha, 2014-2016 (Persentase)

Kategori	2014	2015	2016
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	13.18	13.04	12.82
B. Pertambangan dan Penggalan	9.28	8.54	8.22
C. Industri Pengolahan	21.65	21.54	21.39
Industri Batubara dan Pengilangan Migas	2.53	2.39	2.35
Industri Pengolahan Non Migas	19.12	19.15	19.04
1. Industri Makanan dan Minuman	5.87	6.02	6.22
2. Industri Pengolahan Tembakau	0.92	0.93	0.90
3. Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	1.37	1.25	1.19
4. Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	0.27	0.27	0.27
5. Industri Lainnya	10.68	10.68	10.46
D. Pengadaan Listrik dan Gas	1.10	1.06	1.06
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.08	0.08	0.08
F. Konstruksi	9.65	9.79	9.81
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13.75	13.45	13.31
H, I, J, K L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, Jasa Lainnya	28.82	29.36	29.74
A. NILAI TAMBAH BRUTO ATAS HARGA DASAR	97.51	96.86	96.43
B. PAJAK DIKURANG SUBSIDI ATAS PRODUK	2.49	3.14	3.57
C. PRODUK DOMESTIK BRUTO	100	100	100

Sumber : BPS

Merujuk pada banyaknya daerah yang mengalami aglomerasi industri makanan dan minuman, serta memperhatikan peranannya yang strategis terhadap perekonomian nasional, maka industri ini berpotensi untuk dikembangkan. Tentu dengan memperhatikan beberapa kondisi, misalnya meningkatkan daya saing produk, meningkatkan pengawasan terhadap produk guna menjamin keamanannya, pembinaan kepada usaha-usaha mikro dan kecil, pemberian informasi terkait produk baru, penggunaan teknologi baru, dan akses pasar baik pasar konvensional maupun e-market.

2. Pola Aglomerasi Industri Tekstil dan Pakaian Jadi

Industri tekstil (kode KBLI 13) mencakup

pengolahan, pemintalan, penenunan, dan penyelesaian tekstil dan bahan pakaian, pembuatan barang-barang tekstil bukan pakaian (seperti spre, taplak meja, gordena, selimut, permadani, tali temali, dan lain-lain). Industri tekstil tidak mencakup penanaman serat alami atau pembuatan serat sintetis dan pembuatan pakaian. Selanjutnya, industri pakaian jadi (kode KBLI 14) mencakup semua pekerjaan menjahit (baju siap pakai atau berdasarkan ukuran/pesanan), dalam semua bahan (seperti kulit, bahan baju, bahan rajutan atau tenunan dan lain-lain), dari semua jenis pakaian (seperti pakaian luar, pakaian dalam pria, wanita atau anak-anak, pakaian kerja, pakaian santai, dan lain-lain) dan asesoris, tidak ada perbedaan dalam pembuatan antara baju untuk anak-anak dan orang dewasa, atau

antara pakaian tradisional dan modern. Industri pakaian jadi mencakup industri bulu binatang (pakaian dari bulu binatang dan kulit yang berbulu). Industri tekstil dan pakaian jadi juga sering disebut sebagai industri tekstil dan produk tekstil (TPT).

Gambar di bawah menunjukkan bahwa industri tekstil teraglomerasi di Pulau Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan sebagian kecil di Bali, Maluku, Kalimantan, dan Papua. Di Sumatera, industri tekstil teraglomerasi di Pematang Siantar, Samosir, Toba Samosir, Tapanuli Utara, Lima Puluh Kota, Agam, Tanah Datar, Sawah Lunto, Pariaman, dan Ogan Ilir. Di Sulawesi, daerah yang mengalami aglomerasi industri tekstil adalah Gorontalo, Mamasa, Polewali Mandar, Wajo, Buton Tengah, Muna, dan Buton Selatan. Sementara itu di Bali dan Nusa Tenggara Barat, industri tekstil teraglomerasi di Klungkung, Karang Asem, Lombok Tengah, dan Bima. Di Maluku Tenggara Barat, konsentrasi

industri tekstil terdapat di Maluku Tenggara Barat. Adapun di Papua dan Kalimantan, industri ini teraglomerasi masing-masing di Deiyai dan Hulu Sungai Utara.

Selama ini, Pulau Jawa diklaim sebagai pusat industri tekstil. Namun demikian, berdasarkan data hasil SE2016-L, ternyata daerah-daerah di NTT juga menjadi daerah konsentrasi industri tekstil. Aglomerasi beberapa daerah di NTT tergolong kuat. Bahkan 20 dari 21 kabupaten/kota di NTT mengalami aglomerasi industri tekstil. Hal ini dimungkinkan terjadi karena NTT merupakan penghasil kain tenun ikat, di mana setiap daerahnya memiliki motif dan kekhasan kain.

Kondisi yang mirip juga terjadi di daerah-daerah lain di mana industri tekstilnya teraglomerasi. Daerah-daerah tersebut ternyata merupakan sentra-sentra penghasil kain khas daerah, misalnya Ulos di Samosir, Songket di Ogan Ilir, dan tenun sutera di Wajo.

Gambar 2.12
Pola Aglomerasi Industri Tekstil menurut Pulau, 2016



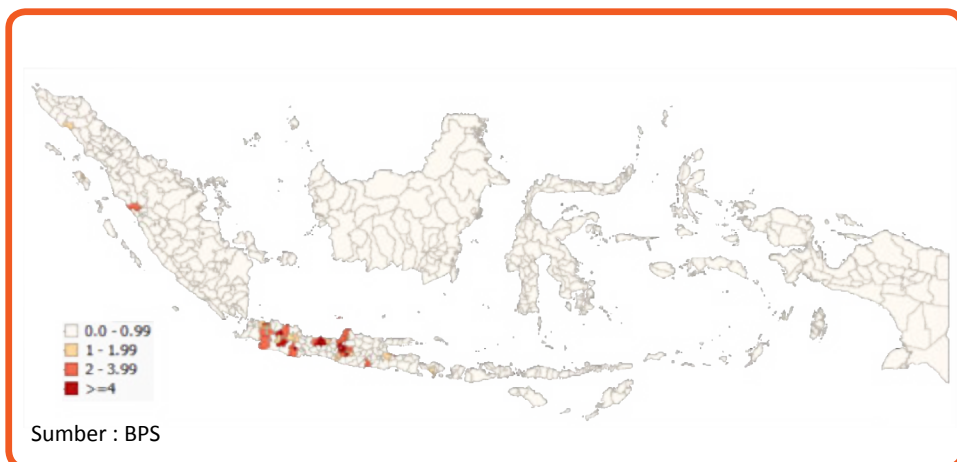
Gambar 2.13 menunjukkan bahwa Pulau Jawa masih menjadi pusat konsentrasi industri pakaian jadi, terutama di wilayah barat dan tengah. Di luar Jawa, hanya terdapat enam daerah yang mengalami aglomerasi industri ini, yakni di Aceh Barat, Gunungsitoli, Agam, Pariaman, Denpasar, dan Tabanan. Industri TPT diklaim sebagai industri yang potensial untuk dikembangkan karena produk yang dihasilkan (sandang) merupakan kebutuhan primer, selain kebutuhan akan produk tekstil non-sandang pun semakin meningkat. Industri TPT merupakan salah satu industri penting di Indonesia dan sebagai komoditas andalan industri manufaktur. Industri ini juga mempunyai peran strategis dalam proses industrialisasi, karena produk yang dihasilkan mulai dari serat sampai dengan barang konsumsi seperti pakaian mempunyai keterkaitan dengan sektor industri maupun sektor ekonomi lain di

tanah air (www.kemenperin.go.id).

Saat ini Indonesia merupakan salah satu negara yang strategis dan penting sebagai produsen tekstil dan produk tekstil. Devisa yang dihasilkan terbilang besar. Pada tahun 2016, industri TPT menyumbang devisa sebesar USD 11,87 miliar atau 8,2 persen dari total ekspor nasional (www.kemenperin.go.id)

Mengingat pentingnya industri TPT ini, pemerintah menjadikan industri TPT sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015 - 2035. Pemerintah senantiasa mendorong tumbuhnya industri TPT dengan meningkatkan daya saing dan produktivitas industri TPT melalui upaya mempermudah akses logistik dan memperkuat *branding* lokal. Selain itu, saat ini pemerintah tengah berupaya melindungi merk nasional dengan segera mengesahkan keikutsertaan Indonesia

Gambar 2.13
Pola Aglomerasi Industri Pakaian Jadi menurut Pulau, 2016



dalam Protokol Madrid, yakni protokol tentang sistem pendaftaran hak intelektual internasional (bisnis.com 26/9/2017).

Selain itu, untuk memperluas pasar ekspor, pemerintah berupaya untuk membuat perjanjian kerjasama bilateral dengan Amerika Serikat dan Uni Eropa.

3. Pola Aglomerasi Industri Kulit, Barang dari Kulit, dan Alas Kaki

Industri kulit, barang dari kulit, dan alas kaki (kode KBLI 15) mencakup pengolahan dan pencelupan kulit berbulu dan proses perubahan dari kulit jangat menjadi kulit dengan proses penyamakan atau proses pengawetan dan pengeringan serta pengolahan kulit menjadi produk siap pakai, pembuatan koper, tas tangan dan sejenisnya, pakaian kuda dan peralatan kuda yang terbuat dari kulit, dan pembuatan alas kaki.

Golongan pokok ini juga mencakup pembuatan produk dan sejenisnya dari bahan lain (kulit imitasi atau kulit tiruan), seperti alas kaki dari bahan karet, koper dari tekstil, dan lain-lain. Barang-barang dari kulit tiruan termasuk dalam cakupan.

Pada tahun 2016, Pulau Jawa masih menjadi

pusat konsentrasi industri kulit, barang dari kulit, dan alas kaki. Hal ini sebagaimana terlihat pada gambar 2.14. Bahkan, pada gambar tersebut terlihat bahwa di luar

Pulau Jawa, tidak ada satu pun daerah yang teraglomerasi industri ini. Di Jawa sendiri, aglomerasi industri ini terjadi paling banyak di Jawa bagian Barat, sebagian kecil di Jawa bagian Timur, dan dua kabupaten di Yogyakarta dan Jawa Tengah. Aglomerasi yang terjadi tergolong sedang dan kuat.

Di Jawa Barat dan Banten, aglomerasi industri kulit, barang dari kulit, dan alas kaki terdapat di Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Subang, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Garut, dan Kota Tasikmalaya.

Di Jawa Timur, industri ini teraglomerasi di Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Jombang, dan Kabupaten Magetan. Sementara itu di Jawa Tengah dan Yogyakarta, industri kulit, barang dari kulit, dan alas kaki teraglomerasi masing-masing di Kabupaten Kudus dan Kabupaten Bantul.

industri TPT merupakan salah satu industri penting di Indonesia dan sebagai komoditas andalan industri manufaktur. Industri ini juga memiliki peran strategis dalam proses industrialisasi dikarenakan produk yang dihasilkan mulai dari serat sampai dengan barang konsumsi seperti pakaian mempunyai keterkaitan dengan sektor industri maupun sektor ekonomi lain di Indonesia

Gambar 2.14
Pola Aglomerasi Industri Kulit, Barang dari Kulit, dan Alas Kaki menurut Pulau, 2016



Sama halnya dengan industri TPT, industri kulit, barang dari kulit, dan alas kaki juga merupakan kelompok industri pengolahan yang dikategorikan sebagai industri prioritas dalam pengembangan oleh pemerintah, dan juga termasuk kelompok industri yang potensial sebagai penyumbang devisa negara karena sebagian produknya diekspor ke manca negara.

Khusus untuk industri alas kaki, Indonesia menempati posisi keempat besar produsen alas kaki di dunia setelah Tiongkok, India, dan Vietnam, dengan menguasai 4,4 persen pangsa pasar alas kaki dunia, di mana volume dan nilai ekspornya terus meningkat

dari tahun ke tahun, meskipun sejak tahun 2012 persentase pertumbuhannya tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya.

Guna mendukung pertumbuhan industri ini, serta mengatasi permasalahan yang dihadapi, pemerintah telah merumuskan beberapa insentif atau kebijakan, diantaranya menghilangkan prosedur karantina untuk kulit jadi, pengaturan ekspor kulit mentah sebagai bahan baku industri kulit yang berpihak kepada industri dalam negeri, menghapus regulasi impor dari semua negara tanpa mengurangi pencegahan masuknya Penyakit Mulut dan Kuku (PMK),

Tabel 2.2
Pertumbuhan Volume dan Nilai Ekspor Alas Kaki Indonesia, 2010-2015

Ekspor Alas Kaki	Tahun					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
volume (ton)	165989.1	198379.7	199135.5	212924.6	215018.8	235242.5
% pertumbuhan	34.58	19.51	0.38	6.92	0.98	9.41
nilai (000 USD)	2501849.6	3301942.6	3524592.2	3860393.9	4108448.5	4507024.3
%pertumbuhan	44.11	31.98	6.74	9.53	6.43	9.70

Sumber : BPS

pembuatan fasilitas pengelolaan limbah industri kulit oleh pemerintah daerah dan pusat, dan meningkatkan kemampuan SDM industri melalui pendidikan vokasi.

4. Pola Aglomerasi Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (tidak termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya

Industri kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furnitur) dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya (kode KBLI 16) mencakup pembuatan barang-barang dari kayu. Kebanyakan digunakan untuk konstruksi dan juga mencakup berbagai proses pengerjaan dari penggergajian sampai pembentukan dan perakitan barang-barang dari kayu, dan dari perakitan sampai produk jadi seperti kontainer kayu. Terkecuali penggergajian, industri ini terbagi lagi, sebagian besar didasarkan pada produk spesifik yang dihasilkan. Industri ini tidak mencakup pembuatan

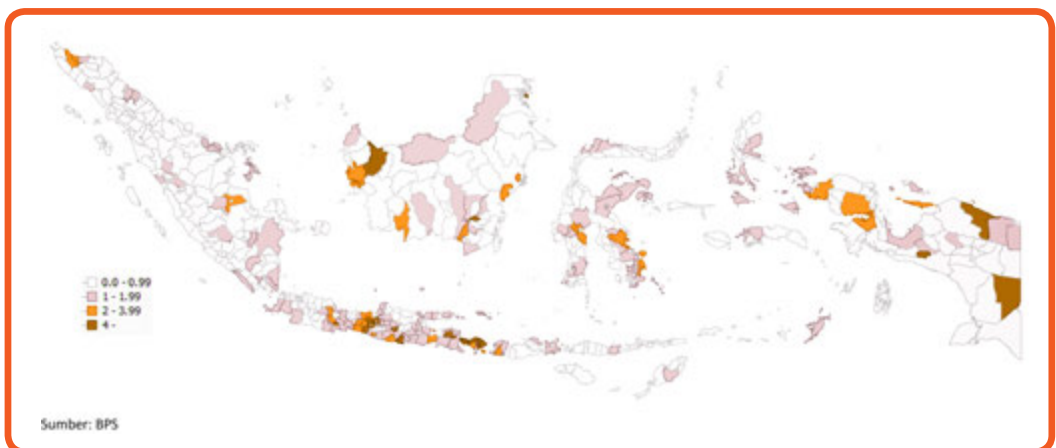
mebel, atau perakitan/pemasangan perabot kayu dan sejenisnya. Industri yang termasuk dalam kelompok ini contohnya industri kayu lapis, industri pengolahan rotan, dan industri pengolahan bambu.

Gambar di bawah menunjukkan bahwa industri ini secara umum tersebar di seluruh wilayah Indonesia, di mana Pulau Jawa paling banyak teraglomerasi, khususnya di Jawa bagian tengah dan timur. Industri ini berkembang baik di Indonesia karena ketersediaan bahan baku cukup memadai. Namun bahan baku yang digunakan berasal dari pulau-pulau lain seperti Kalimantan.

World Wide Fund for Nature (WWF) Indonesia, menyatakan bahwa cadangan hutan alami Indonesia merupakan yang terbesar di Asia dan kedua terbesar di dunia. Hutan-hutan ini juga letaknya tersebar di seluruh penjuru wilayah Indonesia (wwf.or.id). Dengan demikian, industri ini memiliki potensi dan layak untuk dikembangkan.

Gambar 2.15

Pola Aglomerasi Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan, dan Sejenisnya menurut Pulau, 2016



5. Aglomerasi Industri Bahan Kimia, Farmasi, dan Obat Tradisional

Industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia (kode KBLI 20) mencakup perubahan bahan organik dan non organik mentah dengan proses kimia dan pembentukan produk. Hal ini mencirikan/membedakan produksi kimia dasar yang membentuk kelompok industri pertama dari pembuatan produk antara dan produk akhir yang dihasilkan melalui pengolahan lebih lanjut dari kimia dasar yang merupakan kelompok-kelompok industri lainnya. Industri ini mencakup diantaranya industri bahan kimia, industri serat buatan, industri cat, industri sabun, deterjen, dan kosmetik, industri damar buatan, industri plastik dan karet buatan dalam bentuk dasar, dan industri pupuk.

Dengan melihat persebarannya, Industri bahan kimia dianggap memiliki peluang yang terbuka lebar untuk dapat terus dikembangkan dimasa mendatang.

Sementara itu, industri farmasi, produk obat kimia, dan obat tradisional (kode KBLI 21) mencakup pembuatan produk farmasi dasar dan preparat farmasi. Industri ini mencakup antara lain preparat darah, obat-obatan jadi, preparat diagnostik, preparat medis, obat tradisional jamu, suplemen kesehatan, dan produk botanikal untuk keperluan farmasi.

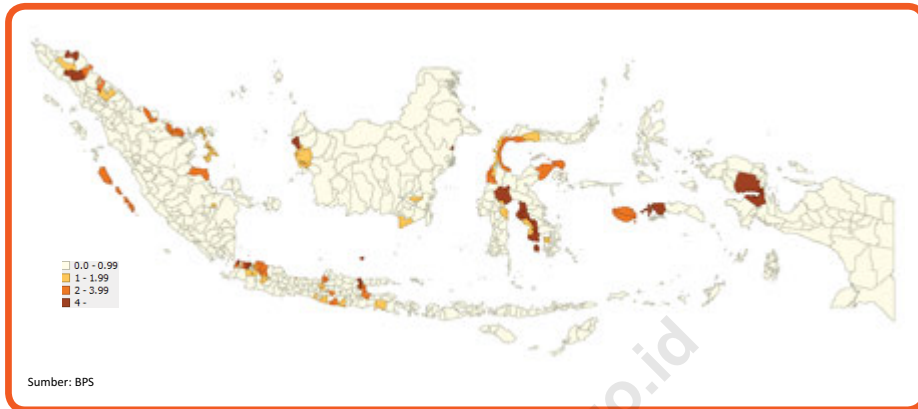
Di Indonesia, aglomerasi kedua golongan industri ini masih terjadi secara dominan di Pulau Jawa. (Gambar 2.16 dan 2.17). Untuk industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia, aglomerasi lebih terjadi di sebagian

besar wilayah barat dan timur Pulau Jawa. Selain Pulau Jawa, aglomerasi industri jenis ini juga terjadi di Sulawesi (dengan kategori sedang dan kuat), dan bagian utara menuju sepanjang timur pulau Sumatera (kecuali Kepulauan Mentawai). Bahkan Aceh dan Teluk Bintuni telah ditetapkan pemerintah sebagai daerah fokus pembangunan industri petrokimia atau pupuk oleh pemerintah (kemenperin.go.id).

Di Kalimantan, hanya terdapat lima daerah yang mengalami aglomerasi industri ini yakni Mempawah, Kubu Raya, Hulu sungai Tengah, Tanah Laut, dan Bontang. Adapun di bagian timur Indonesia, aglomerasi yang terjadi hanya pada daerah-daerah tertentu seperti Buru, Buru Selatan, Seram Bagian Barat, dan Teluk Bintuni.

Dengan tersebarnya konsentrasi industri kimia di Indonesia, maka industri ini dianggap memiliki peluang yang terbuka lebar untuk terus dikembangkan di masa mendatang. Selain didukung oleh ketersediaan tenaga kerja, sumber daya alam yang menjadi bahan baku juga tersedia melimpah. Selain itu, rantai produksi industri kimia juga berkaitan erat dengan sektor ekonomi produktif, seperti pangan, sandang, dan papan, serta penyediaan bahan baku berbagai industri hilir, antara lain industri elektronik dan otomotif.

Gambar 2.16
Pola Aglomerasi Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia menurut Pulau, 2016



Berbeda dengan industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia di atas, aglomerasi industri farmasi, produk obat dari bahan kimia, dan obat tradisional hampir seluruhnya terdapat di Pulau Jawa. Di luar Pulau Jawa, hanya terdapat pada tiga daerah, yaitu Aceh Barat Daya (Provinsi Aceh), Lebong (Bengkulu), dan Deiyai (Papua).

Meskipun hanya teraglomerasi pada daerah tertentu, industri ini juga memiliki prospek yang terbilang cerah. Produksi nasional telah mampu menyediakan 70 persen dari kebutuhan dalam negeri. Nilai pasar produk

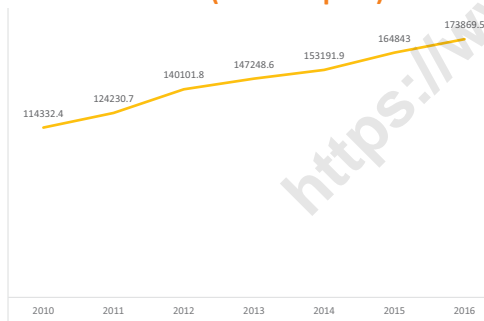
farmasi di Indonesia sekitar USD 4,7 miliar atau setara dengan 27 persen dari total pasar farmasi di ASEAN (sp.beritasatu.com). Sementara itu, menurut data IMS Health, pasar industri farmasi tumbuh 7,49 persen hingga kuartal ke empat tahun 2016, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (4,92 persen). Salah satu faktor pendukung tumbuhnya industri farmasi adalah meluasnya jangkauan pelayanan BPJS, yang telah mencapai 66 persen dari seluruh penduduk Indonesia pada tahun 2017 (ekbis.sindonews.com).

Gambar 2.17
Pola Aglomerasi Industri Farmasi, Produk Obat Kimia, dan Obat Tradisional menurut Pulau, 2016



Dalam Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional 2015-2035, industri farmasi, kosmetik, dan alat kesehatan termasuk ke dalam industri prioritas yang dikelompokkan ke dalam kelompok industri andalan, karena berperan besar sebagai penggerak utama (*prime mover*) perekonomian di masa yang akan datang. Selain, memperhatikan potensi sumber daya alam sebagai sumber keunggulan komparatif, suatu industri andalan juga memiliki keunggulan kompetitif yang mengandalkan sumber daya manusia yang berpengetahuan dan terampil, serta ilmu pengetahuan dan teknologi.

Gambar 2.18
PDB Atas Dasar Harga Konstan Industri Kimia, Farmasi, dan Obat Tradisional, 2010-2016 (miliar rupiah)



Sumber: BPS

Gambar di atas memperlihatkan peningkatan *output* industri kimia, farmasi, dan obat tradisional terus terjadi dalam kurun waktu enam tahun terakhir, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 7,27 persen per tahun. Sehingga kontribusi industri ini terhadap PDB juga terus meningkat.

Pada tahun 2016, kontribusi industri ini menempati urutan keempat terbesar setelah industri makanan dan minuman; industri barang logam, komputer, barang

elektronik, optik, dan peralatan listrik; serta industri alat angkutan

6. Aglomerasi Industri Karet, Barang dari Karet, dan Plastik

Industri karet, barang dari karet, dan plastik (kode KBLI 22) mencakup pembuatan barang plastik dan karet. Industri ini dicirikan dengan penggunaan bahan baku karet dan plastik dalam proses pembuatannya. Contoh, industri ban, industri karet remah, industri barang dari plastik, untuk bangunan, pengemasan, industri pipa, dan industri plastik lembaran.

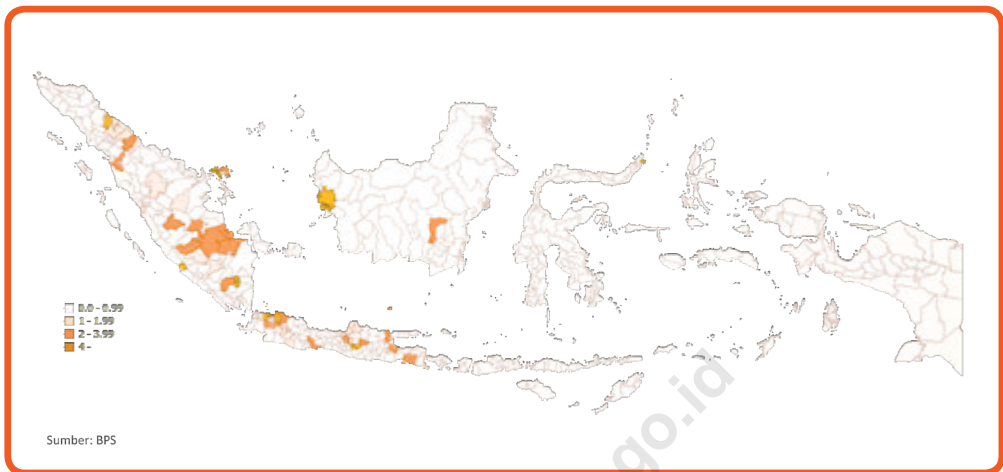
Di Indonesia, industri karet, barang dari karet, dan plastik teraglomerasi terutama di Sumatera dan Jawa, dan sebagian kecil di daerah Kalimantan dan Sulawesi. Di Sumatera, aglomerasi industri ini terdapat di Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, dan Bengkulu. Sementara, di Jawa, aglomerasi industri ini tersebar hampir di seluruh provinsi seperti DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Di Kalimantan dan Sulawesi, aglomerasi industri ini terdapat di Kubu Raya, Barito Selatan, dan Bitung.

Dalam Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional 2015-2035, industri karet merupakan salah satu industri yang diprioritaskan untuk dikembangkan, karena termasuk industri vital (dalam ruang lingkup hulu, antara, hingga hilir), dibutuhkan oleh industri lain, dan memiliki ragam produk. Sebagai contoh, industri plastik kemasan dibutuhkan untuk makanan dan kosmetik, elektronik, otomotif, serta industri lainnya.

Industri karet juga cukup berperan penting

Gambar 2.19

Pola Aglomerasi Industri Karet, Barang dari Karet, dan Plastik menurut Pulau, 2016



terhadap penerimaan devisa. Pada tahun 2016, ekspor industri ini sebesar 5,68 persen dari total ekspor nasional, menempati urutan ke empat setelah sawit, tekstil dan produk tekstil, dan produk hasil hutan. Kontribusi karet dan produk karetpun bahkan lebih besar dibandingkan industri elektronik dan otomotif.

7. Pola Aglomerasi Industri Furnitur

Industri furnitur (Kode KBLI 31) mencakup pembuatan mebel dan produk yang berkaitan, yang terbuat dari berbagai bahan kecuali batu, semen, dan keramik. Pengolahan yang digunakan dalam pembuatan mebel adalah metode standar, yaitu pembentukan bahan dan perakitan komponen, termasuk potongan, pencetakan, dan pelapisan. Perancangan produk, baik untuk estetika dan kualitas fungsi adalah aspek yang penting dalam proses produksi.

Aglomerasi industri furnitur di Indonesia paling banyak terdapat di Pulau Jawa, terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di luar Jawa, industri ini juga banyak

teraglomerasi di wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Papua. Sementara itu, di Sumatera, Kalimantan, dan Maluku, hanya sedikit ditemukan daerah yang industri furniturnya teraglomerasi.

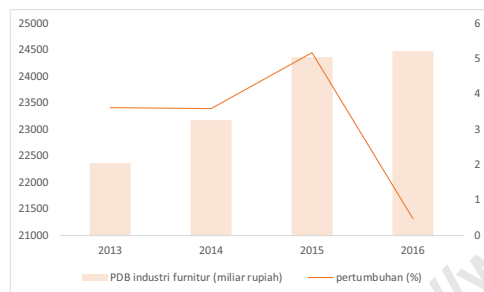
Produk furnitur di Indonesia memiliki banyak ragam corak/motif yang dapat dibedakan antar daerah sehingga dapat menunjukkan ciri khas suatu daerah. Hal ini lebih dipengaruhi oleh karakteristik budaya suatu daerah. Sehingga keragaman produk ini dapat menjadi modal *competitive advantage* industri furniture dalam meningkatkan kinerjanya.

Kinerja industri furnitur terhadap perekonomian terus meningkat dari tahun ke tahun, dengan rata-rata pertumbuhan pertahun sebesar 3,22 persen dalam empat tahun terakhir. Penurunan pertumbuhan pada tahun 2016 dibanding tahun sebelumnya, antara lain diakibatkan oleh dua hal, yaitu adanya tiga perusahaan besar mebel yang pindah dari Mojokerto dan Semarang ke Vietnam, kedua adanya

hambatan ekspor dan produksi mebel akibat regulasi pemerintah yang mencapai 70 persen (www.himki-indonesia.com).

Produk industri furnitur juga diekspor dengan tujuan utama Amerika Serikat, Jepang, Tiongkok, Korea, Arab Saudi, dan Inggris, dengan kontribusi sebesar 1,15 persen terhadap total ekspor non-migas pada tahun 2016.

Gambar 2.20
PDB Industri Furnitur Indonesia, 2013-2016



Sumber : BPS

E. Pola Aglomerasi dan Master Plan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)

MP3EI merupakan dokumen kerja yang berisikan arahan pengembangan kegiatan ekonomi utama. Melalui MP3EI, diharapkan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi akan menempatkan Indonesia sebagai negara maju pada tahun 2025 dengan pendapatan per kapita yang berkisar antara USD 14.250 – USD 15.500 dengan nilai total perekonomian (PDB) berkisar antara USD 4,0 – 4,5 triliun. Melalui MP3EI, program pembangunan di Indonesia dibangun berdasarkan koridor ekonomi dengan mengacu pada potensi dan keunggulan masing-masing wilayah yang tersebar di seluruh Indonesia.

MP3EI menetapkan enam koridor ekonomi dengan masing-masing tema pembangunan sebagai berikut:

1. Koridor Ekonomi Sumatera memiliki tema pembangunan sebagai “Sentra Produksi dan Pengolah Hasil Bumi dan Lumbung Energi Nasional”
2. Koridor Ekonomi Jawa memiliki tema pembangunan sebagai “Pendorong Industri dan Jasa Nasional”
3. Koridor Ekonomi Kalimantan memiliki tema pembangunan sebagai “Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Tambang & Lumbung Energi Nasional”
4. Koridor Ekonomi Sulawesi memiliki tema pembangunan sebagai “Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Migas, dan Pertambangan Nasional”
5. Koridor Ekonomi Bali-Nusa Tenggara memiliki tema pembangunan sebagai “Pintu Gerbang Pariwisata dan Pendukung Pangan Nasional”
6. Koridor Ekonomi Papua-Kepulauan Maluku memiliki tema pembangunan sebagai “Pusat Pengembangan Pangan, Perikanan, Energi, dan Pertambangan Nasional”

Pelaksanaan MP3EI dilakukan untuk mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi melalui pengembangan delapan program utama yang terdiri dari 22 kegiatan ekonomi utama. Kedelapan program utama tersebut adalah pertanian, pertambangan, energi, industri, kelautan, pariwisata, telematika, dan pengembangan kawasan strategis. Strategi pelaksanaan MP3EI dilakukan dengan mengintegrasikan tiga elemen utama yaitu:

1. Mengembangkan potensi ekonomi

Gambar 2.21
Pola Aglomerasi Industri Manufaktur pada Wilayah MP3EI



wilayah di enam koridor ekonomi Indonesia;

2. Memperkuat konektivitas nasional yang terintegrasi secara lokal dan terhubung secara global;
3. Memperkuat kemampuan SDM dan IPTEK nasional untuk mendukung pengembangan program utama di setiap koridor ekonomi.

Seperti yang telah dikemukakan di atas, bahwa salah satu program utama dalam pelaksanaan MP3EI adalah industri. Oleh karena itu, informasi mengenai aglomerasi industri pada wilayah-wilayah koridor ekonomi dapat menjadi khasanah informasi mengenai daerah konsentrasi industri pada suatu koridor. Adapun pola aglomerasi industri manufaktur pada wilayah MP3EI tersaji dalam gambar berikut.

Berdasarkan gambar di atas, tampak bahwa koridor ekonomi Jawa memang menjadi pusat industri nasional, yang ditunjukkan dengan banyaknya aglomerasi industri manufakturnya. Hal ini sejalan dengan hasil studi Kuncoro (2002), bahwa daerah industri manufaktur yang utama

di Indonesia berlokasi di Jawa. Dalam studinya tersebut, Kuncoro menemukan bahwa aglomerasi di Jawa hanya terjadi di bagian barat dan timur Pulau Jawa. Namun demikian, data hasil SE2016-L menunjukkan bahwa pola tersebut tidak terlihat lagi. Pada tahun 2016, sebagian besar kabupaten yang ada di Pulau Jawa mengalami aglomerasi industri manufaktur, baik itu di barat, tengah, maupun timur. Dengan demikian, dalam kurun waktu 14 tahun telah terbentuk kantong-kantong industri yang pesat di Jawa.

Teraglomerasinya industri manufaktur di koridor ini juga sudah sesuai dengan fokus dan kegiatan utama MP3EI di Jawa, yakni industri, khususnya industri makanan dan minuman, tekstil, permesinan, transportasi, perkapalan, alutista, dan telematika.

Hasil SE2016-L telah memperkuat adanya aglomerasi industri-industri di beberapa daerah di Jawa. Sebagai contoh, pada bagian sebelumnya dalam bab ini telah disebutkan bahwa Jawa menjadi pulau yang mendominasi industri makanan dan pakaian jadi. Di Kabupaten Bekasi, Industri

mesin dan perlengkapan teraglomerasi dengan kuat (nilai indeks SI sebesar 12,05), serta industri alat angkutan teraglomerasi kuat di Kabupaten Karawang dan Bekasi.

Meskipun industri menjadi fokus utama kegiatan ekonomi di koridor ekonomi Jawa, MP3EI sebenarnya juga mendorong pengembangan industri di luar Jawa. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Riyadi (2014) bahwa MP3EI akan mengurangi dominasi Jawa dalam perindustrian nasional yang awalnya 60 persen menjadi berkurang di bawah 50 persen. MP3EI juga akan memberikan arahan untuk mengembangkan kawasan industri di luar Pulau Jawa (www.wartaekonomi.co.id).

Hasil SE2016-L (sebagaimana disajikan pada Gambar 2.21), juga telah menunjukkan adanya kantong-kantong industri tersebut. Misalnya, di Sumatera, industri manufaktur teraglomerasi di bagian utara, tengah, dan selatan Pulau Sumatera, yang tersebar di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan dan Lampung.

Di Sulawesi, industri manufaktur lebih terkonsentrasi di bagian tengah menuju utara, tepatnya pada beberapa daerah di Sulawesi Utara dan Tengah. Sementara itu, di bagian tenggara pulau juga terlihat adanya beberapa daerah yang mengalami aglomerasi industri, meskipun tidak sebanyak di bagian tengah dan utara.

Selain di Jawa, Sumatera dan Sulawesi, daerah-daerah lain yang relatif mengalami aglomerasi industri adalah Bali dan Nusa Tenggara. Di Bali, aglomerasi terutama terdapat di Jembrana, Tabanan, Gianyar,

Bangli, dan Karangasem, yang didominasi oleh industri kayu. Hal ini sesuai dengan keunggulan provinsi ini berupa karya seni berbahan kayu yang sudah diakui dunia, selain keunggulan pariwisatanya. Tidak mengherankan bila komoditas produk kerajinan kayu telah menjadi salah satu komoditi ekspor utama dari Bali.

Di Nusa Tenggara, daerah-daerah yang mengalami aglomerasi industri cukup tersebar mulai dari wilayah barat sampai timur. Di NTB, aglomerasi terjadi di Lombok Tengah dan Lombok Timur. Sementara di NTT, sebanyak 21 kabupaten/kotanya mengalami aglomerasi industri terutama tekstil.

Di wilayah Maluku (termasuk Maluku Utara), beberapa daerah industri manufakturnya teraglomerasi, seperti Tidore Kepulauan, Buru Selatan, Seram Bagian Barta, Maluku Tengah, Maluku Barat Daya, Maluku Tenggara Barat, dan Kepulauan Aru. Umumnya jenis industri yang teraglomerasi adalah makanan dan minuman. Sementara di Papua terdapat dua daerah aglomerasi, yaitu Kabupaten Sorong (Papua Barat) dan Boven Digoel (Papua), dengan jenis industri makanan dan bahan galian bukan logam.

Di Kalimantan, hanya terdapat dua daerah yang mengalami aglomerasi, yaitu di bagian barat (Kabupaten Kubu Raya di Kalimantan Barat) dan selatan (Kabupaten Hulu Sungai Utara di Kalimantan Selatan) pulau ini. Di kedua daerah tersebut, industri yang teraglomerasi adalah industri kayu, barang dari kayu, dan barang anyaman dari bambu, rotan, dan sejenisnya. Hal ini didukung oleh ketersediaan bahan baku yang diperlukan industri ini.

F. Pola Aglomerasi pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) adalah kawasan yang dipersiapkan untuk memaksimalkan kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi. KEK ditujukan untuk mempercepat perkembangan daerah sebagai model terobosan pengembangan kawasan untuk pertumbuhan ekonomi, antara lain industri manufaktur, pariwisata, dan perdagangan.

KEK dikembangkan dengan empat sasaran, yaitu:

1. Meningkatkan penanaman modal melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geo-ekonomi dan geo-strategis;
2. Optimalisasi kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi;
3. Mempercepat perkembangan daerah melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru untuk keseimbangan pembangunan antar wilayah; dan
4. Mewujudkan model terobosan pengembangan kawasan untuk pertumbuhan ekonomi, antara lain industri manufaktur, pariwisata, dan perdagangan, sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan.

KEK terdiri atas beberapa zona yaitu pengolahan ekspor, logistik, pengembangan teknologi, industri, pariwisata, energi, dan ekonomi lainnya. Zona industri

diperuntukkan bagi kegiatan industri yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi, serta agroindustri dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri yang produksinya untuk ekspor dan/atau untuk dalam negeri. KEK industri diharapkan menciptakan keterkaitan (linkage) yang kuat dan sinergi antara sub-sektor, baik industri kecil, menengah, dan besar dengan berbagai sektor ekonomi lainnya. Dengan demikian, KEK dapat menjalankan perannya sebagai sebuah rantai pasok.

Daerah-daerah yang menjadi KEK industri manufaktur adalah KEK Arun Lhokseumawe, mencakup Kabupaten Aceh Utara dan Kota

Lhokseumawe, KEK Sei Mangkei (Kabupaten Simalungun), KEK Tanjung Api-api (Kabupaten Banyuasin), KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan (Kabupaten Kutai Timur), KEK Bitung (Kota Bitung), KEK Palu (Kota Palu), dan KEK Sorong (Kabupaten Sorong).

Pengembangan KEK industri diharapkan mampu menjadi booster pertumbuhan industri di daerah-daerah terkait. Sentra-sentra Industri sudah sewajarnya terkonsentrasi di wilayah yang memang dikembangkan sebagai KEK industri. Dengan demikian, pengembangan KEK akan tepat pada sasarannya terutama untuk poin 1 dan 2 di atas. Oleh karena itu, pola aglomerasi industri manufaktur pada KEK industri manufaktur menjadi hal yang menarik untuk diulas.

Pengembangan KEK industri diharapkan mampu menjadi booster pertumbuhan industri di daerah-daerah terkait

Gambar 2.22
Pola Aglomerasi Industri Manufaktur pada KEK, 2016



Berdasarkan hasil perhitungan indeks spesialisasi industri sebagaimana dipetakan pada Gambar 2.22 dan dipertegas dengan Tabel 2.3, tampak bahwa industri manufaktur teraglomerasi pada KEK Bitung dan KEK Sorong dengan nilai indeks sebesar 1,21 dan 1,05 atau berkategori lemah.

Sedangkan bila dilihat dari penyerapan tenaga kerja, industri manufaktur merupakan terbesar kedua setelah kategori perdagangan, yakni sebesar 27,56 persen dari total tenaga kerja non-pertanian di Kota ini.

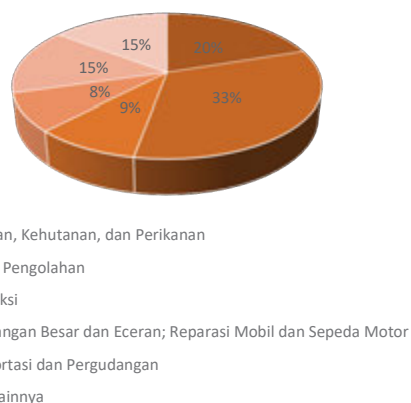
Tabel 2.3
Nilai Indeks Spesialisasi Industri menurut KEK Industri, 2016

No	KEK	Indeks SI
1	Arun Lhokseumawe	0,92
2	Sei Mangkei	0,69
3	Tanjung Api-api	0,62
4	Maloy Batuta Trans Kalimantan	0,40
5	Palu	0,42
6	Bitung	1,21
7	Sorong	1,05

Sumber: BPS, data diolah

Fokus industri di KEK Bitung adalah pengolahan hasil perikanan berorientasi ekspor yang berkualitas internasional, dan pengolahan kelapa beserta produk turunannya, mengingat luasnya pasar produk ini baik domestik maupun manca negara. Dampak dari konsentrasi ini, kontribusi yang diberikan terhadap PDRB Kota Bitung cukup besar, yaitu 33,04 persen sebagaimana disajikan pada Gambar 2.23

Gambar 2.23
Distribusi PDRB Kota Bitung, 2016 (Persentase)



Sumber: BPS Kota Bitung

Lain halnya dengan KEK Bitung, KEK Sorong lebih fokus pada pengembangan industri galangan kapal, agro industri, industri pertambangan, dan industri

logistik. Kabupaten Sorong sendiri diklaim akan menjadi pusat industri Provinsi Papua Barat (www.beritasatu.com). Jika melihat penyerapan tenaga kerjanya, industri manufaktur mampu menyerap 23,85 persen tenaga kerja non-pertanian. Dengan kata lain, 23 dari seratus orang penduduk Kabupaten Sorong bekerja pada sektor industri.

Gambar 2.22. dan diperkuat dengan Tabel 2.3 juga menunjukkan bahwa, lima dari tujuh KEK industri ternyata tidak mengalami aglomerasi industri manufaktur secara umum. Hal ini wajar, karena KEK ditentukan berdasarkan sumber daya alam dan keunggulan geografis. Sedangkan faktor konsentrasi industri belum menjadi salah satu pertimbangan ketika menentukan suatu kawasan KEK. Hal ini juga merupakan hasil kajian *Center for Strategic and International Studies* pada tahun 2015, bahwa pemerintah belum mempertimbangkan faktor keunggulan lokasi berdasarkan aglomerasi dalam menentukan kawasan yang menjadi KEK.

Meskipun demikian, diharapkan pada masa yang mendatang, setelah ditetapkannya suatu wilayah menjadi KEK industri, industri-industri baru akan terus tumbuh seiring dengan perizinan yang lebih mudah, ketersediaan akses dan fasilitas, dan berbagai keistimewaan lainnya. Dengan demikian manfaat yang diharapkan dari pengembangan KEK dapat terwujud.

Bila aglomerasi industri manufaktur pada kelima wilayah KEK dikaji lebih mendalam pada level dua digit KBLI, ternyata ditemukan adanya beberapa sub-kategori industri yang teraglomerasi, sebagaimana disajikan pada Tabel 2.5 di bawah ini. Sebagai contoh, Industri minuman; Industri bahan kimia, dan barang dari bahan kimia; Industri barang logam; dan Industri mesin dan perlengkapan teraglomerasi di KEK Arun Lhokseumawe. Sehingga, pemerintah dapat menyusun kebijakan yang fokus pada jenis-jenis industri tersebut guna peningkatan kinerjanya.

Tabel 2.4
Industri yang Teraglomerasi menurut Subkategori Industri, 2016

No	KEK	Subkategori yang Teraglomerasi
1	Arun Lhokseumawe	Industri minuman; Industri bahan kimia, dan barang dari bahan kimia; Industri barang logam; dan Industri mesin dan perlengkapan.
2	Sei Mangkei	Industri makanan dan minuman; Industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia; Industri karet, barang dari karet, dan plastik; dan Industri barang logam.
3	Tanjung Api-api	Industri makanan dan minuman; Industri produk dari batubara dan pengilangan minyak bumi; Industri karet, barang dari karet, dan plastik; dan Reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan.
4	Maloy Batuta Trans Kalimantan	Industri minuman; Reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan.
5	Palu	Industri minuman; Industri pencetakan dan reproduksi media rekaman; dan industri pengolahan lainnya

Sumber: BPS

bab 3



Faktor-Faktor
Pembentuk Aglomerasi
Industri Manufaktur

Faktor-Faktor Pembentuk Aglomerasi Industri Manufaktur

A. Ruang Lingkup

Analisis ini mencakup seluruh provinsi di Indonesia pada tahun 2016. Terdapat enam variabel yang digunakan, terdiri dari satu variabel dependent dan lima variabel *independent*. Adapun variabel dependent adalah status aglomerasi industri pada suatu provinsi, yang bernilai 1 jika terdapat aglomerasi industri manufaktur pada provinsi tersebut dan bernilai 0 jika tidak. Sedangkan variabel independent-nya adalah panjang jalan, indeks persaingan industri, jumlah tenaga kerja industri menengah dan besar, pertumbuhan ekonomi, dan kepadatan penduduk.

B. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan adalah analisis inferensia, yaitu suatu analisis yang menggunakan metode-metode untuk melakukan peramalan atau penarikan kesimpulan terhadap sebagian gugus data sehingga dapat digeneralisasi untuk keseluruhan gugus data induknya (Walpole, 1994). Analisis inferensia digunakan untuk mengetahui variabel apa saja yang memengaruhi status aglomerasi industri pada level provinsi. Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan analisis regresi logistik biner. Dari hasil analisis tersebut akan diperoleh kecenderungan status aglomerasi industri pada suatu provinsi terhadap nilai pada variabel *independent*-nya. Software yang digunakan adalah software SPSS versi 19.

Karena terdapat lima variabel *independent*, maka berlaku asumsi non-multikolinieritas, yaitu tidak adanya hubungan antar variabel *independent*. Asumsi tersebut dapat diuji dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) setiap variabel. Menurut Neter (1989), jika nilai VIF lebih dari 10, maka diduga terjadi multikolinieritas yang serius pada variabel tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan hubungan antar variabel *independent*, selanjutnya dilakukan pengujian keberartian parameter di dalam model dengan beberapa tahapan proses sebagai berikut:

Tiga faktor yang memengaruhi terjadinya aglomerasi manufaktur pada provinsi-provinsi di Indonesia adalah persaingan usaha, tenaga kerja industri besar dan sedang/menengah, dan pertumbuhan ekonomi. Setiap kenaikan 1 persen indeks persaingan usaha industri, tenaga kerja, maupun pertumbuhan ekonomi, akan meningkatkan kecenderungan suatu provinsi mengalami aglomerasi sebesar 4,3 kali; 4,34 kali; dan 2,44 kali.

1. Pengujian Ketepatan Model (*Goodness of Fit*)

Pengujian ketepatan model dilakukan untuk mengetahui apakah model yang terbentuk cocok digunakan. Uji ketepatan model yang dilakukan adalah uji Hosmer-Lemeshow. Hipotesis nol akan ditolak ketika nilai nilai p-value kurang dari 0,05. Jika hipotesis nol ditolak, artinya model yang terbentuk tidak cocok digunakan atau tidak fit. Sementara itu, jika hipotesis nol gagal ditolak, artinya tidak ada cukup bukti untuk menyatakan bahwa model tidak fit.

2. Pengujian Signifikansi Parameter secara Simultan

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen dalam penelitian secara bersama-sama (simultan) memiliki pengaruh terhadap status aglomerasi industri pada provinsi-provinsi di Indonesia. Hipotesis nol ditolak ketika nilai p-value kurang dari 0,05. Ditolaknya hipotesis nol berarti bahwa minimal terdapat satu variabel independen yang berpengaruh terhadap status aglomerasi industri pada level provinsi tahun 2016.

3. Pengujian Signifikansi Parameter secara Parsial

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui variabel *independent* mana saja dari seluruh variabel *independent* yang diajukan, memiliki pengaruh secara signifikan terhadap status aglomerasi industri. Hipotesis nol ditolak ketika nilai

p-value kurang dari 0,05. Ditolaknya hipotesis nol berarti bahwa variabel *independent* tersebut memiliki pengaruh yang nyata terhadap status aglomerasi industri pada level provinsi. Sementara itu, jika hipotesis nol gagal ditolak, artinya bahwa variabel tersebut tidak memiliki efek yang signifikan terhadap status aglomerasi industri pada level provinsi.

4. Penghitungan Odds Ratio

Setelah dilakukan pengujian-pengujian di atas, selanjutnya dilakukan interpretasi terhadap hasil model regresi logistik yang diperoleh. Interpretasi variabel *independent* dalam model regresi logistik dilakukan melalui *odds ratio*. Dengan *odds ratio*, dapat diketahui besarnya kecenderungan pengaruh setiap variabel *independent* terhadap status aglomerasi industri pada provinsi-provinsi di Indonesia.

C. Faktor-faktor yang Memengaruhi Aglomerasi

Sebelum melakukan analisis regresi, dilakukan pengujian multikolinieritas variabel *independent*, untuk mengetahui apakah terdapat hubungan linier antar variabel *independent* dalam model. Variabel yang memiliki multikolinieritas perlu dikeluarkan dari model. Berdasarkan hasil pengolahan sebagaimana tercantum pada Tabel 3.1, diketahui bahwa tidak terdapat variabel *independent* yang memiliki nilai VIF di atas 10. Dengan demikian, tidak terjadi multikolinieritas antar variabel *independent*-nya.

Tabel 3.1
Nilai *Tolerance* dan VIF dari Variabel *Independent*

Variabel <i>independent</i>	<i>Tolerance</i>	VIF
(1)	(2)	(3)
InIndeksPersaingan	0,933	1,071
InTK_IBS	0,347	2,882
InPj_Jalan	0,889	1,125
InKepadatan	0,686	1,458
PertumbuhanEkonomi	0,425	2,351

Selanjutnya, dari hasil pengujian simultan model regresi logistik yang telah terbebas dari multikolinieritas tersebut diperoleh nilai chi-square sebesar 24,321 dengan p-value sebesar 0,000. Dengan demikian, keputusan yang diambil adalah tolak H_0 , sehingga dapat disimpulkan bahwa minimal terdapat satu variabel *independent* yang berpengaruh terhadap status aglomerasi industri pada provinsi-provinsi di Indonesia.

Tabel 3.2
Hasil Pengujian Simultan Model Awal

Model	Chi-Square	Derajat Bebas	p-value
(1)	(2)	(3)	(4)
Model dengan variabel bebas	24,321	5	0,000

Karena pengujian simultan menunjukkan hasil yang signifikan, maka selanjutnya dapat dilakukan pengujian secara parsial. Hasil pengujian ini (Tabel 3.3) menunjukkan masih adanya beberapa variabel yang tidak berpengaruh secara signifikan (pada $\alpha = 10\%$) terhadap status aglomerasi industri pada provinsi-provinsi di Indonesia, yaitu variabel panjang jalan, dan kepadatan, sehingga perlu dilakukan pemilihan model terbaik.

Tabel 3.3
Hasil Pengujian Parsial dari Model Awal

Variabel <i>independent</i>	p-value
(1)	(2)
InIndeksPersaingan	0,090
InTK_IBS	0,029
InPj_Jalan	0,115
InKepadatan	0,316
PertumbuhanEkonomi	0,058

1. Pemilihan Model Terbaik

Metode pemilihan model terbaik yang digunakan dalam analisis ini adalah *backward elimination*. Metode ini menguji semua variabel *independent* terhadap variabel *dependent* secara bersama-sama, kemudian secara bertahap mengeliminasi variabel *independent* yang tidak signifikan. Metode ini akan memberikan hasil akhir berupa variabel-variabel yang layak masuk ke dalam model regresi logistik biner.

Model regresi logistik biner terbaik terbentuk pada step ke 3, yaitu setelah mengeliminasi variabel InKepadatan pada step 1 dengan p-value sebesar 0,316 dan variabel InPj_Jalan pada step 2 dengan p-value 0,144. Pada step 3 terdapat tiga variabel yang signifikan pada $\alpha = 10\%$. Hasil step 3 ini merupakan model terbaik yang parameternya akan dianalisis lebih lanjut. Berikut merupakan hasil pengujian parsial dari model terbaik yang diperoleh dengan metode *backward elimination*

Tabel 3.4
Hasil Pengujian Parsial dari Model Terbaik

Variabel <i>independent</i>	Koefisien	p-value
(1)	(2)	(3)
Intersep	-22,336	0,010
InIndeksPersaingan	1,455	0,057
InTK_IBS	1,468	0,017
PertumbuhanEkonomi	0,893	0,082

Hasil pengujian parsial yang ditampilkan pada Tabel di atas menunjukkan bahwa variabel Indeks Persaingan Industri (IPI), jumlah tenaga kerja IBS, dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap status aglomerasi industri pada provinsi-provinsi di Indonesia dengan tingkat signifikansi 10%. Ketiga variabel tersebut mampu memberikan R^2 sebesar 66,6% (*Nagelkerke R-Square*) dengan ketepatan klasifikasi mencapai 94,1%.

2. Uji Kesesuaian Model

Selanjutnya dilakukan pengujian kesesuaian model untuk mengetahui layak atau tidaknya model yang diperoleh untuk digunakan. Hasil penghitungan uji kesesuaian model menunjukkan $p\text{-value} = 0,551$. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dengan tingkat signifikansi 10%, model regresi logistik biner yang terbentuk layak digunakan

Tabel 3.5

Hasil Penghitungan Uji Kesesuaian Model

Uji (1)	Chi-Square (2)	Derajat Bebas (3)	p-value (4)
Hosmer-Lemeshow	6,869	8	0,551

3. Persamaan Regresi Logistik Biner

Dari hasil pengolahan dengan SPSS yang disajikan pada Tabel 3.6, diperoleh persamaan model regresi logistik biner sebagai berikut:

$$Y = \left\{ -22,336 + 1,455(\ln \text{IndeksPersaingan}) + 1,468 \ln \text{TK_IBS} + 0,893(\text{PertumbuhanEkonomi}) \right\}$$

Tabel 3.6

Nilai Koefisien dan odds ratio Variabel Independent pada Model Terbaik

Variabel Independent (1)	Koefisien (2)	Odds Ratio (3)
lnIndeksPersaingan	1,455	4,285
lnTK_IBS	1,468	4,340
PertumbuhanEkonomi	0,893	2,443

4. Interpretasi Koefisien dan Odds Ratio Masing-masing Variabel

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa aglomerasi industri manufaktur yang terjadi pada provinsi-provinsi di Indonesia diakibatkan oleh tiga faktor, yaitu tingkat persaingan yang terjadi pada suatu wilayah yang ditunjukkan oleh indeks persaingan industri. Faktor kedua adalah ketersediaan tenaga kerja, yang dalam hal ini direpresentasikan oleh jumlah tenaga kerja pada industri

manufaktur berskala besar dan sedang, serta faktor pertumbuhan ekonomi yang menggambarkan capaian perkembangan ekonomi pada suatu wilayah.

a. Indeks Persaingan Industri

Indeks persaingan industri digunakan untuk mengukur struktur pasar. Semakin besar nilai indeks, suatu pasar akan cenderung mendekati pasar persaingan sempurna. Sebaliknya, semakin kecil nilai indeks ini, pasar akan menuju pada bentuk pasar monopolistik (Kuncoro, 2009).

Ascani et.al (2012) mengatakan bahwa perusahaan akan cenderung lebih mudah terkonsentrasi di suatu wilayah bila pasar dalam keadaan monopolistik, karena suatu perusahaan dapat memperbanyak variasi produksinya (diversifikasi produk) dengan target pasar yang lebih spesifik.

Persaingan industri dalam suatu wilayah akan menjadi pertimbangan bagi suatu usaha/perusahaan baru untuk membuka usaha di wilayah tersebut. Biasanya, seorang pengusaha menghindari wilayah-wilayah yang telah terdapat jenis usaha yang sama dengan yang akan didirikannya. Namun di sisi lain, keberadaan usaha yang sama tersebut justru dapat meningkatkan daya saing bagi usaha/perusahaan lainnya dengan cara diversifikasi produk sebagaimana disampaikan Ascani di atas.

Berdasarkan hasil pengolahan, variabel indeks persaingan industri menunjukkan hubungan yang positif dengan nilai koefisien sebesar 1,455. Hal ini berarti bahwa, dengan tingkat signifikansi 10%, maka setiap kenaikan 1% indeks persaingan industri akan meningkatkan

kecenderungan suatu provinsi sebesar 4,3 kali (nilai *odds ratio*) untuk mengalami aglomerasi industri pada wilayahnya.

Hubungan yang positif ini diindikasikan karena cakupan dalam penelitian ini adalah seluruh industri manufaktur sehingga banyak jenis industri yang termasuk di dalamnya. Hal ini menyebabkan banyak industri yang saling membutuhkan antara satu dan lainnya dalam proses produksi. Sebuah usaha industri memproduksi barang, kemudian barang tersebut digunakan oleh perusahaan lain sebagai bahan baku dalam proses produksinya.

b. Tenaga Kerja Industri Besar dan Sedang

Jumlah tenaga kerja industri besar sedang menggambarkan bagaimana kondisi pasar tenaga kerja yang ditawarkan oleh suatu wilayah. Semakin tinggi jumlah tenaga kerja akan membuat perusahaan untuk melakukan aglomerasi di daerah tersebut. Nilai koefisien variabel tenaga kerja sebesar 1,468 menggambarkan bahwa tenaga kerja menjadi variabel yang sangat berpengaruh dalam aglomerasi industri pada provinsi-provinsi di Indonesia. Setiap kenaikan tenaga kerja IBS sebesar 1% akan meningkatkan kecenderungan suatu provinsi sebesar 4,34 kali untuk mengalami aglomerasi industri pada wilayahnya.

Keberadaan tenaga kerja yang tinggi di

suatu wilayah juga dapat memberikan keuntungan untuk para tenaga kerjanya. Sesuai dengan teori *New Economic Geography* (NEG) yang mengatakan bahwa perusahaan-perusahaan akan mendapatkan keuntungan dari penghematan lokalisasi (*economies of localization*) dengan berlokasi dekat dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Oleh karena itu, biaya transportasi yang dikeluarkan tenaga kerja lebih kecil karena jarak yang lebih dekat.

c. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi diukur dari pertumbuhan PDRB masing-masing provinsi. Variabel PDRB biasanya digunakan untuk menggambarkan capaian ekonomi antar waktu yang representatif, dengan asumsi semakin besar PDRB suatu daerah maka semakin besar pula aktivitas ekonomi di daerah tersebut. Industri manufaktur maupun kegiatan ekonomi lainnya akan mengalami peningkatan produksi dan berkonsentrasi dalam pasar yang besar dan berkembang. Nilai koefisien variabel pertumbuhan ekonomi sebesar 0,893. Menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap terjadinya aglomerasi pada suatu provinsi. Setiap kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 1% akan meningkatkan kecenderungan suatu provinsi sebesar 2,44 kali untuk mengalami aglomerasi industri pada wilayahnya.

bab

4



Kaitan antara Pola
Aglomerasi Industri
Manufaktur dengan
Pola Aglomerasi Usaha
Ekonomi Lainnya

Kaitan antara Pola Aglomerasi Industri Manufaktur dengan Pola Aglomerasi Usaha Ekonomi Lainnya

Pembangunan Industri manufaktur di Indonesia tentunya tidak akan terlepas dari pembangunan atau perkembangan sektor atau usaha ekonomi lainnya. Hal ini dikarenakan adanya keterkaitan atau saling membutuhkan antar sektor-sektor tersebut. Sebagai contoh, pembangunan dan perkembangan industri manufaktur sangat membutuhkan dukungan dari sektor keuangan, konstruksi, transportasi, dan sebagainya, serta produk-produk dari industri ini akan digunakan dalam transaksi kepada konsumen pada kegiatan perdagangan dibantu oleh sektor transportasi dan ditopang pembiayaan oleh sektor keuangan kepada para pelaku usaha.

Bila merujuk pada data dalam Tabel 4.1 mengenai sebaran usaha/perusahaan ekonomi menurut pulau, sekilas dapat diperoleh gambaran bahwa jumlah usaha perdagangan, transportasi, dan keuangan pada setiap pulau akan semakin besar seiring dengan peningkatan jumlah usaha industri manufaktur pada pulau tersebut. Sebagai contoh, di Pulau Jawa, jumlah usaha/perusahaan industri manufaktur paling banyak (64,29 persen) dibanding pulau-pulau lainnya. Ternyata jumlah usaha/perusahaan kegiatan perdagangan, transportasi, dan keuangan juga paling banyak terdapat di Pulau Jawa, dengan persentase sebesar 58,35 persen, 58,94 persen, dan 58,72 persen. Pola ini tampaknya bersifat umum, yang juga terjadi pada pulau-pulau lainnya.

Keterkaitan sebaran usaha/perusahaan di atas, dapat dipertegas dengan informasi besaran korelasi antar sektor-sektor tersebut, di mana korelasi yang terjadi sangat tinggi, lebih dari 98 persen. Sebagai contoh, korelasi antara Industri Manufaktur dengan perdagangan, transportasi, dan keuangan sebesar masing-masing 98,8 persen, 99,5 persen, dan 99,4 persen.

Menimbang adanya keterkaitan antara industri manufaktur dengan kegiatan usaha lain tersebut, maka timbul pertanyaan, apakah aglomerasi yang terjadi pada industri manufaktur pada suatu daerah juga dibarengi dengan aglomerasi pada kegiatan usaha-usaha lainnya? Untuk menjawab pertanyaan ini, maka pada bagian ini dibahas bagaimana gambaran pola aglomerasi industri

Sebaran usaha/perusahaan industri manufaktur memiliki korelasi yang sangat tinggi dengan sebaran kegiatan perdagangan, transportasi, dan keuangan pada suatu daerah. Sebaran pola aglomerasi industri dengan pola aglomerasi yang terjadi pada ketiga usaha tersebut menunjukkan pola yang berbeda antar pulau, namun tetap terkonsentrasi di Pulau Jawa.

Tabel 4.1
Sebaran Usaha Ekonomi menurut Pulau, 2016

No	Pulau	Industri Manufaktur	Perdagangan	Transportasi	Keuangan
1.	Sumatera	601.436 (13,62)	2.478.180 (20,09)	229.125 (17,17)	27.691 (18,41)
2.	Jawa	2.839.276 (64,29)	7.195.726 (58,35)	786.475 (58,94)	88.313 (58,72)
3.	Kalimantan	152.507 (3,45)	661.037 (5,36)	44.265 (3,32)	8.047 (5,35)
4.	Sulawesi	389.432 (8,82)	1.098.870 (8,91)	150.151 (11,25)	11.260 (7,49)
5.	Bali – Nusa Tenggara	368.355 (8,34)	667.229 (5,41)	82.748 (6,20)	12.661 (8,42)
6.	Papua - Kepulauan Maluku	65.283 (1,48)	231.619 (1,88)	41.521 (3,11)	2.433 (1,62)

Sumber: BPS

Tabel 4.2
Korelasi antar Empat Sektor Usaha Ekonomi

		Correlations			
		Industri	Perdagangan	Transportasi	Keuangan
Industri	Pearson Correlation	1	.988**	.995**	.994**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000
	N	6	6	6	6
Perdagangan	Pearson Correlation	.988**	1	.995**	.997**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000
	N	6	6	6	6
Transportasi	Pearson Correlation	.995**	.995**	1	.994**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000
	N	6	6	6	6
Keuangan	Pearson Correlation	.994**	.997**	.994**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	
	N	6	6	6	6

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

manufaktur pada suatu daerah ketika disandingkan dengan pola aglomerasi yang terjadi pada usaha ekonomi lainnya. Apakah terdapat pola aglomerasi yang bersandingan pada suatu wilayah tertentu?

Idealnya, pengamatan atas fenomena ini seharusnya menggunakan series data yang cukup panjang sehingga dapat diketahui perkembangan dari pola aglomerasi industri manufaktur dan pola aglomerasi usaha ekonomi lainnya antar waktu. Namun, mengingat keterbatasan data dan adanya perubahan-perubahan cakupan kegiatan usaha/perusahaan pada SE2016-L dibandingkan dengan Sensus Ekonomi sebelum-sebelumnya, maka ulasan pada bagian ini hanya memotret pola aglomerasi pada kondisi *cross section data* saja.

A. Pola Aglomerasi Industri Manufaktur dan Perdagangan

Sektor industri manufaktur merupakan

sektor ekonomi yang melakukan kegiatan mengolah bahan baku atau setengah jadi menjadi barang jadi. Barang jadi yang dihasilkan tersebut kemudian diperjualbelikan pada sektor perdagangan kepada para konsumen. Oleh karena itu, diasumsikan bahwa ketika aglomerasi industri manufaktur terjadi pada suatu wilayah, hal ini akan mendorong perkembangan usaha/perusahaan perdagangan sehingga dapat terwujud suatu aglomerasi perdagangan.

Gambar 4.1. menunjukkan sebaran pola aglomerasi industri manufaktur dan perdagangan antar pulau. Tampak bahwa sebaran aglomerasi perdagangan lebih merata di seluruh wilayah Indonesia dibanding industri. Aglomerasi perdagangan ini terjadi di 320 kabupaten/kota, sedangkan aglomerasi industri hanya tercatat di 129 kabupaten/kota terutama di Jawa. Dari kedua aglomerasi tersebut, terdapat 45 kabupaten/kota yang mengalami

Gambar 4.1
Sebaran Pola Aglomerasi Industri Manufaktur dan Perdagangan, 2016



irisan dari kedua aglomerasi tersebut.

Selain itu, tampak bahwa aglomerasi yang terjadi antar pulau menunjukkan pola-pola yang berbeda. Di Sumatera, aglomerasi industri hanya terjadi pada beberapa daerah tertentu, namun aglomerasi perdagangan menyebar hampir di seluruh wilayah. Sehingga hanya terdapat tujuh kabupaten/kota yang mengalami aglomerasi baik industri manufaktur maupun perdagangan, yaitu Kabupaten Nagan Raya (Aceh), Kabupaten Deli Serdang (Sumatra Utara), Kabupaten Lima Puluh Kota (Sumatra Barat), Kabupaten Indragiri Hilir (Riau), Kabupaten Ogan Ilir (Sumatra Selatan), serta Kabupaten Lampung Tengah dan Pringsewu di Provinsi Lampung. Jarak antar kabupaten/kota tersebut cukup berjauhan dan hanya terjadi pada daerah-daerah tertentu pada suatu provinsi.

Hal ini mirip dengan fenomena yang terjadi di Sulawesi. Pola yang cukup rumit terjadi di Jawa, di mana pola kedua-nya seperti bercampuran atau berhimpitan. Hal ini diakibatkan aglomerasi industri dan perdagangan paling banyak terjadi di Pulau Jawa .

Terdapat 27 kabupaten/kota yang beririsan antara kedua aglomerasi tersebut, seperti kabupaten Bogor dan Karawang di Jawa Barat, kabupaten Cilacap dan Purworejo di Jawa Tengah, dan sebagainya (informasi lengkap pada lampiran).

Di Kalimantan, aglomerasi kedua sektor tersebut tidak menyebar secara merata. Masih terdapat cukup banyak daerah yang tidak memiliki aglomerasi. Dibanding industri, sebaran aglomerasi perdagangan masih lebih merata. Bahkan aglomerasi

industri hanya berpusat di bagian barat Kalimantan. Kondisi ini hampir mirip dengan pola yang terjadi di Papua.

Bila ditinjau menurut Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI), sebaran aglomerasi di KBI cenderung mengelompok di Pulau Jawa, sebaliknya pola yang lebih menyebar terjadi di KTI.

B. Pola Aglomerasi Industri Manufaktur dan Transportasi

Munculnya aglomerasi industri manufaktur pada suatu wilayah sering kali berkaitan erat dengan kegiatan transportasi, karena salah satu tujuan aglomerasi industri manufaktur adalah untuk meminimumkan biaya transportasi agar dapat menekan biaya produksi yang harus dikeluarkan. Selain itu, sistem transportasi yang baik dan mudah di suatu wilayah dapat mendukung kelancaran proses distribusi barang sehingga mendorong terjadinya aglomerasi industri manufaktur pada wilayah tersebut.

Berbeda halnya dengan aglomerasi industri manufaktur yang sebagian besar terjadi di Pulau Jawa, aglomerasi transportasi justru lebih banyak terjadi di wilayah Sulawesi. Dari 196 kabupaten/kota yang teraglomerasi transportasi, sebanyak 46 kabupaten/kota merupakan kabupaten/kota di Sulawesi di mana 16 kabupaten/kota berada di Sulawesi Selatan, 12 kabupaten/kota berada di Sulawesi Utara, 8 kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara, 6 kabupaten/kota di Gorontalo, dan masing-masing 2 kabupaten/kota di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat.

Dari 129 kabupaten/kota yang mengalami aglomerasi industri manufaktur, 36 di antaranya mengalami aglomerasi

Gambar 4.2
Sebaran Pola Aglomerasi Industri Manufaktur dan Transportasi, 2016



transportasi, di mana 18 kabupaten/kota diantaranya terdapat di Jawa Seperti Jakarta Utara, Bandung Barat, Tegal, dan sebagainya dan 8 kabupaten/kota di Sulawesi seperti Minahasa Selatan dan Bintang. Selain kedua wilayah tersebut, kabupaten/kota yang mengalami kedua aglomerasi tersebut cenderung menyebar di berbagai wilayah.

C. Pola Aglomerasi Industri Manufaktur dan Keuangan

Banyaknya aktivitas industri di suatu daerah diindikasikan akan memacu pertumbuhan sektor keuangan di daerah tersebut. Kegiatan ekonomi yang cukup besar dari sektor industri manufaktur dapat meningkatkan penyebaran pembiayaan atau kredit perbankan. Akan tetapi, sebaran antara aglomerasi industri manufaktur dan aglomerasi keuangan di Indonesia masih belum seimbang.

Gambar 4.3 menunjukkan bahwa aglomerasi industri manufaktur yang

terjadi pada suatu wilayah kabupaten/kota, tidak sertamerta diikuti dengan aglomerasi keuangan. Hal ini diketahui dari sedikitnya kabupaten/kota yang mengalami aglomerasi industri manufaktur dan keuangan secara bersamaan. Dari 129 kabupaten/kota yang teraglomerasi industri, hanya 26 kabupaten/kota yang juga mengalami aglomerasi keuangan. Padahal jumlah kabupaten/kota yang mengalami aglomerasi keuangan cukup banyak (167 kabupaten/kota). Hal ini dapat dipahami bahwa keberadaan kegiatan sektor keuangan tidak hanya diperuntukkan bagi usaha industri manufaktur saja, tetapi juga bagi usaha ekonomi lainnya seperti pertanian, konstruksi, perdagangan, dan lainnya.

Daerah-daerah yang mengalami kedua aglomerasi tersebut secara bersamaan hanya terjadi di Batam (Sumatra), 16 kabupaten/kota di Jawa seperti Cimahi, Purworejo, Semarang, dan sebagainya, Bali (5 kabupaten/kota), Nusa Tenggara Timur (3 kabupaten/kota), dan Sulawesi

(1 kabupaten/kota). Selain daerah tersebut, tidak terdapat pola khusus yang menggambarkan irisan pola aglomerasi industri manufaktur dan keuangan. Dengan demikian, pulau Jawa masih menjadi pusat irisan antara aglomerasi industri manufaktur dan keuangan.

Gambar 4.3
Sebaran Pola Aglomerasi Industri Manufaktur dan Keuangan, 2016



bab

5



Kesimpulan

Kesimpulan

Sejak 1991, industri manufaktur telah memberikan kontribusi terbesar terhadap perekonomian Indonesia, meskipun mengalami penurunan kontribusi dalam beberapa tahun terakhir. SE2016-L mencatat industri ini mengambil porsi terbesar ketiga (16,53 persen) dari seluruh usaha/perusahaan non-pertanian di Indonesia, setelah Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil & Sepeda Motor (46,8 persen) dan Penyediaan Akomodasi & Penyediaan Makan Minum (16,72 persen).

Secara umum, sebaran industri manufaktur lebih teraglomerasi di Pulau Jawa, khususnya di Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, dan Banten dengan kategori lemah. Berdasarkan skala usaha, aglomerasi skala mikro paling luas menyebar pada 12 provinsi, diikuti skala besar (delapan provinsi), skala menengah (enam provinsi), dan kecil (lima provinsi). Variasi sebaran pola aglomerasi industri manufaktur juga terjadi ketika dirinci menurut sub-kategori.

Aglomerasi industri manufaktur juga terjadi pada wilayah MP3EI maupun kawasan KEK. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan industri manufaktur pada kedua wilayah tersebut telah menunjukkan progress, terutama munculnya kantung-kantung industri manufaktur baru di luar Pulau Jawa dengan jenis industri yang beragam. Hal ini sejalan dengan tujuan pemerintah untuk memperluas sebaran usaha/perusahaan industri manufaktur di luar Pulau Jawa, sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2015-2019

Berdasarkan analisis inferensia, diperoleh hasil bahwa ada tiga faktor yang mempengaruhi terjadinya aglomerasi industri manufaktur pada provinsi-provinsi di Indonesia, yaitu tingkat persaingan yang terjadi pada suatu wilayah yang ditunjukkan oleh indeks persaingan industri, ketersediaan tenaga kerja, dalam hal ini direpresentasikan oleh jumlah tenaga kerja pada industri manufaktur berskala besar dan sedang, serta faktor pertumbuhan ekonomi yang menggambarkan capaian perkembangan ekonomi pada suatu wilayah

Pembangunan atau perkembangan industri manufaktur di Indonesia tidak terlepas dari pembangunan atau perkembangan sektor atau usaha ekonomi lainnya, seperti perdagangan, transportasi, dan keuangan, dikarenakan adanya keterkaitan atau saling membutuhkan antar sektor-sektor tersebut. Keterkaitan ini ditunjukkan dengan suatu pola, di mana jumlah usaha/perusahaan industri manufaktur pada suatu pulau, berkorelasi sangat kuat dengan jumlah usaha/perusahaan perdagangan, transportasi, dan keuangan.

Keterkaitan tersebut juga ditunjukkan dengan adanya pola irisan aglomerasi antara industri manufaktur dengan ketiga kegiatan usaha tersebut pada suatu daerah-daerah tertentu. Irisan aglomerasi industri manufaktur dengan aglomerasi perdagangan terjadi pada 45 kabupaten/kota terutama terdapat di Jawa. Irisan dengan aglomerasi transportasi terjadi di 36 kabupaten/kota, separuhnya berada di Jawa. Sedangkan Irisan dengan aglomerasi keuangan lebih sedikit, hanya 26 kabupaten/kota. Padahal jumlah kabupaten/kota yang mengalami aglomerasi keuangan cukup banyak (167 kabupaten/kota). Hal ini dapat dipahami bahwa keberadaan kegiatan sektor keuangan tidak hanya diperuntukkan bagi usaha industri manufaktur saja, tetapi juga bagi usaha ekonomi lainnya seperti pertanian, konstruksi, perdagangan, dan lainnya.

Daftar Pustaka

- Amelia, Lola dkk. (2017). *Analisis Peta Industri Makanan dan Minuman*. Jakarta: *The Indonesia Institute*.
- Badan Pusat Statistik. (2015). *Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Capello, Roberto & Nijkamp, Peter. (2009). *Handbook of Regional Growth*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited
- Centre for Strategic and International Studies. (2015). *Kawasan Ekonomi Khusus & Strategi di Indonesia: Tinjauan atas Peluang dan Permasalahan*. Tersedia pada <http://beritasore.com/2015/09/11/csis-ungkap-8-masalah-pengembangan-kek/> diakses pada tanggal 20 Oktober 2017
- Cholis Rizal Fahmi. (2015). *Faktor-faktor yang Memengaruhi Aglomerasi Industri Besar Sedang di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2012*. Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
- Dahwilani, Dani M. (2017). *Peluang dan Tantangan Industri Farmasi di Indonesia 2017*. Tersedia pada <https://ekbis.sindonews.com/read/1190701/34/peluang-dan-tantangan-industri-farmasi-di-indonesia-2017-1490187954> diakses pada tanggal 4 Desember 2017.
- Kementerian Perindustrian. (2015). *Rencana Strategis Kementerian Perindustrian 2015-2019*. Jakarta: Kementerian Perindustrian
- Kementerian Perindustrian. *Pemerintah Andalkan Pertumbuhan Industri Pulau Jawa*. Tersedia pada <http://www.kemenperin.go.id/artikel/2806/PemerintahAndalkan%09Pertumbuhan-Industri-Pulau-Jawa> diakses pada tanggal 23 November 2017
- Kementerian Perindustrian. *Menakar Prospek Industri Makanan dan Minuman*. Tersedia pada <http://www.kemenperin.go.id/artikel/14292/Menakar-Prospek-Industri-Makanan-dan-Minuman> diakses pada tanggal 1 Desember 2017
- Kementerian Perindustrian. *Prospek Industri TPT Cerah*. Tersedia pada <http://www.kemenperin.go.id/artikel/5170/ghs> diakses pada tanggal 2 Desember 2017
- Kementerian Perindustrian. *Sumbang Devisa USD 12 Miliar, Industri TPT Ditargetkan Tumbuh – Sektor Riil*. Tersedia pada [http://www.kemenperin.go.id/artikel/17790/Sumbang-Devisa-US\\$-12-Miliar,-Industri-TPT-Ditargetkan-Tumbuh---Sektor-Riil](http://www.kemenperin.go.id/artikel/17790/Sumbang-Devisa-US$-12-Miliar,-Industri-TPT-Ditargetkan-Tumbuh---Sektor-Riil) diakses pada tanggal 2 Desember 2017.
- Kementerian Perindustrian. (2015). *Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035*. Jakarta: Kementerian Perindustrian.
- Kuncoro Mudrajad. (2002). *Adakah Perubahan Konsentrasi Spasial Industri Manufaktur di Indonesia, 1976-2001?* Yogyakarta: Journal of Indonesia Economy and Business
- Permana, Sony Hendra. (2017). *Meningkatkan Industri Sepatu/Alas Kaki Nasional*. *Buletin APBN Edisi 8 Vol.II*. Jakarta: Pusat Kajian Anggaran Badan Kehlian DPR RI.

Daftar Pustaka

- Ridwan. (2017), *Pertumbuhan Industri TPT Capai Tujuh Persen*. Tersedia pada <http://www.industry.co.id/read/7814/2017-pertumbuhan-industri-tpt-capai-tujuh-persen> diakses pada tanggal 2 Desember 2017
- Rini, Annisa Sulisty. (2016). *Kemenperin: Industri Tekstil Tumbuh Baik*. Tersedia pada <http://industri.bisnis.com/read/20170926/257/693248/kemenperin-industri-tekstil-tumbuh-baik> diakses pada tanggal 2 Desember 2017
- Saliem, Handewi P, et al. (2011). *Kajian Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian.
- Suara Pembaruan. *Industri Farmasi Kuasai 70% Pasar Domestik*. <http://sp.beritasatu.com/ekonomidanbisnis/industri-farmasi-kuasai-70-pasar-domestik/120310> diakses pada tanggal 3 Desember 2017
- Sutrisno, Debbie. (2016). *Industri Makanan dan Minuman Diprediksi Jadi Motor Pertumbuhan*. *Republika*. Tersedia pada <http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/16/12/22/oiknn3382-industri-makanan-dan-minuman-diprediksi-jadi-motor-pertumbuhan> diakses pada tanggal 1 Desember 2017
- Swardnidi, Yoka Ardoa. (2016). *Determinan Aglomerasi Industri Manufaktur di Provinsi Jawa Barat*. Bandar Lampung: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
- Warta Ekonomi. (2014). *MP3EI Dorong Pembentukan Kawasan Industri di Luar Pulau Jawa*. Tersedia pada <https://www.wartaekonomi.co.id/read31042/mp3ei-dorong-pembentukan-kawasan-industri-di-luar-pulau-jawa.html> diakses pada tanggal 5 Desember 2017
- Williams, Fellicity. (2004). *Profil Industri Kayu Indonesia*. Tersedia pada <https://www.wwf.or.id/?6040/Profil-> diakses pada tanggal 3 Desember 2017.

Tabel 1. Kontribusi PDB Sub-kategori Industri terhadap PDB, 2014-2016

Subkategori	2014	2015	2016
1. Industri Makanan dan Minuman	5,87	6,02	6,22
2. Industri Pengolahan Tembakau	0,92	0,93	0,90
3. Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	1,37	1,25	1,19
4. Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	0,27	0,27	0,27
5. Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	0,72	0,68	0,66
6. Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	0,83	0,79	0,76
7. Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	1,79	1,84	1,84
8. Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	0,85	0,85	0,74
9. Industri Barang Galian bukan Loga	0,73	0,74	0,74
10. Industri Logam Dasar	0,84	0,85	0,82
11. Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik	2,08	2,14	2,13
12. Industri Mesin dan Perlengkapan	0,31	0,31	0,31
13. Industri Alat Angkutan	2,08	2,03	2,02
14. Industri Furnitur	0,27	0,27	0,26
15. Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	0,19	0,19	0,17
Industri Pengolahan	21,65	21,54	21,39

Sumber : BPS

Tabel 2. Hasil Pengolahan SPSS

Omnibus Tests of Model Coefficients				
		Chi-square	df	Sig.
Step	Step	19,846	3	,000
1	Block	19,846	3	,000
	Mode	19,846	3	,000
	I			

Model Summary			
Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	17,255 ^a	,442	,666

a. Estimation terminated at iteration number 7 because parameter estimates changed by less than ,001.

Tabel 2. Hasil Pengolahan SPSS (lanjutan)

Hosmer and Lemeshow Test			
Step	Chi-square	df	Sig.
1	6,869	8	,551

Classification Table ^a					
Observed			Predicted		
			Ybiner		Percentage
			,00	1,00	Correct
Step	Ybiner	,00	26	0	100,0
1		1,00	2	6	75,0
Overall Percentage					94,1

a. The cut value is ,500
b.

Variables in the Equation							
Step		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
1 ^a	InIndeksPersaingan	1,455	,765	3,617	1	,057	4,285
	InTK_IBS	1,468	,617	5,660	1	,017	4,340
	PertumbuhanEkonomi	,893	,513	3,034	1	,082	2,443
	Constant	-22,336	8,661	6,651	1	,010	,000

a. Variable(s) entered on step 1: InIndeksPersaingan, InTK_IBS, PertumbuhanEkonomi.

Tabel 4.1. Kabupaten/Kota yang Mengalami Aglomerasi Industri Manufaktur dan Perdagangan

Provinsi	Kabupaten/Kota	SI	
		Industri	Perdagangan
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	Kabupaten Nagan Raya	1,1803	1,0283
Sumatra Utara	Kabupaten Deli Serdang	1,1051	1,0407
Sumatra Barat	Kabupaten Lima Puluh Kota	1,0543	1,0375
Riau	Kabupaten Indragiri Hilir	1,3767	1,0004
Sumatra Selatan	Kabupaten Ogan Ilir	1,2225	1,0011
Lampung	Kabupaten Lampung Tengah	1,0976	1,2443
	Kabupaten Pringsewu	1,0940	1,2233

Tabel 4.1. Kabupaten/Kota yang Mengalami Aglomerasi Industri Manufaktur dan Perdagangan (lanjutan)

Provinsi	Kabupaten/Kota	SI	
		Industri	Perdagangan
(1)	(2)	(3)	(4)
Jawa Barat	Kabupaten Bogor	1,3763	1,0181
	Kabupaten Sukabumi	1,2399	1,1928
	Kabupaten Garut	1,0441	1,1833
	Kabupaten Tasikmalaya	1,2127	1,1460
	Kabupaten Ciamis	1,1469	1,1844
	Kabupaten Majalengka	1,2459	1,0882
	Kabupaten Karawang	1,3635	1,1388
	Kabupaten Bandung Barat	1,1524	1,1938
	Kabupaten Pangandaran	1,5941	1,1246
	Kota Banjar	1,0494	1,0605
	Kabupaten Cilacap	1,3361	1,0821
Jawa Tengah	Kabupaten Banyumas	1,3076	1,0183
	Kabupaten Banjarnegara	1,1520	1,2620
	Kabupaten Purworejo	1,3796	1,0914
	Kabupaten Wonosobo	1,3737	1,0885
	Kabupaten Magelang	1,4199	1,1127
	Kabupaten Karanganyar	1,4975	1,0933
	Kabupaten Sragen	1,3449	1,0016
	Kabupaten Pati	1,1659	1,0402
	Kabupaten Kendal	1,1680	1,0015
	Kabupaten Pemalang	1,1074	1,0776
Kabupaten Tegal	1,0477	1,0861	
Jawa Timur	Kabupaten Trenggalek	1,4203	1,0389
	Kabupaten Malang	1,1615	1,0429
	Kabupaten Bondowoso	1,5798	1,1055
	Kabupaten Jombang	1,0041	1,0249
	Kabupaten Gresik	1,2005	1,0427
Bali	Kabupaten Jembrana	1,1106	1,1316
	Kabupaten Tabanan	1,0379	1,0639
Kalimantan Selatan	Kabupaten Hulu Sungai Utara	1,0645	1,2458
Sulawesi Utara	Kabupaten Kepulauan Sangihe	1,1686	1,1068
	Kabupaten Minahasa Selatan	1,3210	1,0764
Sulawesi Tengah	Kabupaten Morowali	1,0300	1,0658

Tabel 4.1. Kabupaten/Kota yang Mengalami Aglomerasi Industri Manufaktur dan Perdagangan (lanjutan)

Provinsi	Kabupaten/Kota	SI	
		Industri	Perdagangan
(1)	(2)	(3)	(4)
Sulawesi Utara	Kabupaten Kepulauan Sangihe	1,1686	1,1068
	Kabupaten Minahasa Selatan	1,3210	1,0764
Sulawesi Tengah	Kabupaten Morowali	1,0300	1,0658
Sulawesi Tenggara	Kabupaten Muna	1,0190	1,0781
	Kabupaten Konawe Selatan	1,0370	1,2579
	Kabupaten Bombana	1,0713	1,1620
	Kabupaten Buton Tengah	1,2906	1,0618
Maluku	Kabupaten Seram Bagian Barat	1,1703	1,0633

Tabel 4.2. Kabupaten/Kota yang Mengalami Aglomerasi Industri Manufaktur dan Transportasi

Provinsi	Kabupaten/Kota	SI	
		Industri	Transportasi
(1)	(2)	(3)	(4)
Sumatra Utara	Kabupaten Deli Serdang	1,1051	1,0200
Kepulauan Riau	Kota Batam	1,6040	1,0883
DKI Jakarta	Kota Jakarta Utara	1,0973	3,0627
Jawa Barat	Kabupaten Sukabumi	1,2399	1,4577
	Kabupaten Garut	1,0441	1,4117
	Kabupaten Ciamis	1,1469	1,2719
	Kabupaten Majalengka	1,2459	1,0157
	Kabupaten Sumedang	1,5746	1,0823
	Kabupaten Bandung Barat	1,1524	1,1323
	Kota Tasikmalaya	1,3301	1,0776
Jawa Tengah	Kabupaten Wonosobo	1,3737	1,0531
	Kabupaten Tegal	1,0477	1,2631
	Kota Semarang	1,2242	1,2497
Jawa Timur	Kabupaten Bondowoso	1,5798	1,0350
	Kabupaten Pasuruan	1,6814	1,0232
	Kabupaten Sampang	1,1969	1,7738
	Kota Probolinggo	1,1649	1,4971
	Kota Pasuruan	1,0441	1,0860

Tabel 4.2. Kabupaten/Kota yang Mengalami Aglomerasi Industri Manufaktur dan Transportasi (lanjutan)

Provinsi	Kabupaten/Kota	SI	
		Industri	Transportasi
(1)	(2)	(3)	(4)
Banten	Kota Tangerang	2,0168	1,6941
	Kota Cilegon	1,2547	1,8470
Nusa Tenggara Timur	Kabupaten Flores Timur	1,7030	1,4915
	Kabupaten Sikka	1,2666	1,6958
	Kabupaten Ende	1,3868	1,4664
	Kabupaten Malaka	1,5994	1,0723
Sulawesi Utara	Kabupaten Kepulauan Sangihe	1,1686	1,5096
	Kabupaten Kepulauan Talaud	1,8835	1,1446
	Kabupaten Minahasa Selatan	1,3210	1,5522
	Kota Bitung	1,2115	3,4530
Sulawesi Tengah	Kabupaten Buol	1,0519	1,0742
	Kabupaten Banggai Laut	1,6584	1,2385
Sulawesi Tenggara	Kabupaten Muna	1,0190	1,3178
	Kabupaten Buton Utara	1,1191	1,6250
Maluku	Kabupaten Maluku Tengah	1,1357	1,6898
	Kabupaten Seram Bagian Barat	1,1703	1,2760
Maluku Utara	Kota Tidore Kepulauan	1,0206	1,8764
Papua	Kabupaten Sorong	1,0482	1,3856

Tabel 4.3. Kabupaten/Kota yang Mengalami Aglomerasi Industri Manufaktur dan Keuangan

Provinsi	Kabupaten/Kota	SI	
		Industri	Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)
Kepulauan Riau	Kota Batam	1,6040	1,0114
Jawa Barat	Kota Cimahi	1,9162	1,5023
	Kota Tasikmalaya	1,3301	1,2049
	Kota Banjar	1,0494	1,1257

Tabel 4.3. Kabupaten/Kota yang Mengalami Aglomerasi Industri Manufaktur dan Keuangan (lanjutan)

Provinsi	Kabupaten/Kota	SI	
		Industri	Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)
Jawa Timur	Kabupaten Magetan	1,2348	1,1043
	Kota Kediri	1,0071	1,7487
	Kota Probolinggo	1,1649	2,1298
	Kota Pasuruan	1,0441	1,1115
	Kota Mojokerto	1,0360	2,3408
Bali	Kabupaten Jembrana	1,1106	1,7848
	Kabupaten Tabanan	1,0379	2,3943
	Kabupaten Gianyar	1,1288	2,1419
	Kabupaten Bangli	1,4451	1,7677
	Kabupaten Karang Asem	1,5051	1,2987
Nusa Tenggara Timur	Kabupaten Sikka	1,2666	1,0663
	Kabupaten Ende	1,3868	1,0010
	Kabupaten Rote Ndao	1,3307	1,0839
Sulawesi Tengah	Kabupaten Toli-Toli	1,3283	1,0002

Tabel 3. Indeks Spesialisasi Industri menurut Provinsi/Kabupaten/Kota, 2016

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks SI	Keterangan
1	[11] NANGGROE ACEH DARUSSALAM	0,73	Tidak Teraglomerasi
2	[01] Simeulue	0,53	Tidak Teraglomerasi
3	[02] Aceh Singkil	0,51	Tidak Teraglomerasi
4	[03] Aceh Selatan	0,64	Tidak Teraglomerasi
5	[04] Aceh Tenggara	0,33	Tidak Teraglomerasi
6	[05] Aceh Timur	0,60	Tidak Teraglomerasi
7	[06] Aceh Tengah	0,44	Tidak Teraglomerasi
8	[07] Aceh Barat	0,66	Tidak Teraglomerasi
9	[08] Aceh Besar	0,94	Tidak Teraglomerasi
10	[09] Pidie	0,89	Tidak Teraglomerasi
11	[10] Bireuen	0,86	Tidak Teraglomerasi
12	[11] Aceh Utara	0,92	Tidak Teraglomerasi
13	[12] Aceh Barat Daya	0,83	Tidak Teraglomerasi
14	[13] Gayo Lues	2,18	Teraglomerasi Sedang
15	[14] Aceh Tamiang	0,65	Tidak Teraglomerasi
16	[15] Nagan Raya	1,18	Teraglomerasi Lemah
17	[16] Aceh Jaya	0,53	Tidak Teraglomerasi
18	[17] Bener Meriah	0,28	Tidak Teraglomerasi
19	[18] Pidie Jaya	0,78	Tidak Teraglomerasi
20	[71] Banda Aceh	0,45	Tidak Teraglomerasi
21	[72] Sabang	0,67	Tidak Teraglomerasi
22	[73] Langsa	0,53	Tidak Teraglomerasi
23	[74] Lhokseumawe	0,49	Tidak Teraglomerasi
24	[75] Subulussalam	0,41	Tidak Teraglomerasi
25	[12] SUMATERA UTARA	0,68	Tidak Teraglomerasi
26	[01] Nias	0,40	Tidak Teraglomerasi
27	[02] Mandailing Natal	0,53	Tidak Teraglomerasi
28	[03] Tapanuli Selatan	0,61	Tidak Teraglomerasi
29	[04] Tapanuli Tengah	0,58	Tidak Teraglomerasi
30	[05] Tapanuli Utara	0,73	Tidak Teraglomerasi
31	[06] Toba Samosir	0,66	Tidak Teraglomerasi
32	[07] Labuhan Batu	0,47	Tidak Teraglomerasi
33	[08] Asahan	0,90	Tidak Teraglomerasi
34	[09] Simalungun	0,69	Tidak Teraglomerasi
35	[10] Dairi	0,35	Tidak Teraglomerasi
36	[11] Karo	0,37	Tidak Teraglomerasi

Tabel 3. Indeks Spesialisasi Industri menurut Provinsi/Kabupaten/Kota, 2016(lanjutan)

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks SI	Keterangan
37	[12] Deli Serdang	1,11	Teraglomerasi Lemah
38	[13] Langkat	0,63	Tidak Teraglomerasi
39	[14] Nias Selatan	0,57	Tidak Teraglomerasi
40	[15] Humbang Hasundutan	0,30	Tidak Teraglomerasi
41	[16] Pakpak Bharat	0,19	Tidak Teraglomerasi
42	[17] Samosir	0,54	Tidak Teraglomerasi
43	[18] Serdang Bedagai	0,97	Tidak Teraglomerasi
44	[19] Batu Bara	0,81	Tidak Teraglomerasi
45	[20] Padang Lawas Utara	0,49	Tidak Teraglomerasi
46	[21] Padang Lawas	0,54	Tidak Teraglomerasi
47	[22] Labuhan Batu Selatan	0,50	Tidak Teraglomerasi
48	[23] Labuhan Batu Utara	0,70	Tidak Teraglomerasi
49	[24] Nias Utara	0,38	Tidak Teraglomerasi
50	[25] Nias Barat	0,31	Tidak Teraglomerasi
51	[71] Sibolga	0,34	Tidak Teraglomerasi
52	[72] Tanjung Balai	0,41	Tidak Teraglomerasi
53	[73] Pematang Siantar	0,62	Tidak Teraglomerasi
54	[74] Tebing Tinggi	0,54	Tidak Teraglomerasi
55	[75] Medan	0,62	Tidak Teraglomerasi
56	[76] Binjai	0,60	Tidak Teraglomerasi
57	[77] Padangsidempuan	0,42	Tidak Teraglomerasi
58	[78] Gunungsitoli	0,46	Tidak Teraglomerasi
59	[13] SUMATERA BARAT	0,66	Tidak Teraglomerasi
60	[01] Kepulauan Mentawai	0,66	Tidak Teraglomerasi
61	[02] Pesisir Selatan	0,48	Tidak Teraglomerasi
62	[03] Solok	0,54	Tidak Teraglomerasi
63	[04] Sijunjung	0,45	Tidak Teraglomerasi
64	[05] Tanah Datar	0,73	Tidak Teraglomerasi
65	[06] Padang Pariaman	0,85	Tidak Teraglomerasi
66	[07] Agam	1,11	Teraglomerasi Lemah
67	[08] Lima Puluh Kota	1,05	Teraglomerasi Lemah
68	[09] Pasaman	0,42	Tidak Teraglomerasi
69	[10] Solok Selatan	0,64	Tidak Teraglomerasi
70	[11] Dharmasraya	0,42	Tidak Teraglomerasi
71	[12] Pasaman Barat	0,50	Tidak Teraglomerasi
72	[71] Padang	0,58	Tidak Teraglomerasi

Tabel 3. Indeks Spesialisasi Industri menurut Provinsi/Kabupaten/Kota, 2016(lanjutan)

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks SI	Keterangan
73	[72] Solok	0,39	Tidak Teraglomerasi
74	[73] Sawah Lunto	0,60	Tidak Teraglomerasi
75	[74] Padang Panjang	0,55	Tidak Teraglomerasi
76	[75] Bukittinggi	0,48	Tidak Teraglomerasi
77	[76] Payakumbuh	0,74	Tidak Teraglomerasi
78	[77] Pariaman	0,75	Tidak Teraglomerasi
79	[14] RIAU	0,64	Tidak Teraglomerasi
80	[01] Kuantan Singingi	0,40	Tidak Teraglomerasi
81	[02] Indragiri Hulu	0,43	Tidak Teraglomerasi
82	[03] Indragiri Hilir	1,38	Teraglomerasi Lemah
83	[04] Pelalawan	0,88	Tidak Teraglomerasi
84	[05] Siak	1,00	Teraglomerasi Lemah
85	[06] Kampar	0,49	Tidak Teraglomerasi
86	[07] Rokan Hulu	0,64	Tidak Teraglomerasi
87	[08] Bengkalis	0,50	Tidak Teraglomerasi
88	[09] Rokan Hilir	0,57	Tidak Teraglomerasi
89	[10] Kepulauan Meranti	0,78	Tidak Teraglomerasi
90	[71] Pekanbaru	0,43	Tidak Teraglomerasi
91	[73] Dumai	0,72	Tidak Teraglomerasi
92	[15] JAMBI	0,51	Tidak Teraglomerasi
93	[01] Kerinci	0,55	Tidak Teraglomerasi
94	[02] Merangin	0,44	Tidak Teraglomerasi
95	[03] Sarolangun	0,34	Tidak Teraglomerasi
96	[04] Batang Hari	0,57	Tidak Teraglomerasi
97	[05] Muaro Jambi	0,89	Tidak Teraglomerasi
98	[06] Tanjung Jabung Timur	0,60	Tidak Teraglomerasi
99	[07] Tanjung Jabung Barat	0,51	Tidak Teraglomerasi
100	[08] Tebo	0,42	Tidak Teraglomerasi
101	[09] Bungo	0,44	Tidak Teraglomerasi
102	[71] Jambi	0,45	Tidak Teraglomerasi
103	[72] Sungai Penuh	0,58	Tidak Teraglomerasi
104	[16] SUMATERA SELATAN	0,42	Tidak Teraglomerasi
105	[01] Ogan Komering Ulu	0,39	Tidak Teraglomerasi
106	[02] Ogan Komering Ilir	0,48	Tidak Teraglomerasi
107	[03] Muara Enim	0,56	Tidak Teraglomerasi
108	[04] Lahat	0,25	Tidak Teraglomerasi

Tabel 3. Indeks Spesialisasi Industri menurut Provinsi/Kabupaten/Kota, 2016(lanjutan)

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks SI	Keterangan
109	[05] Musi Rawas	0,69	Tidak Teraglomerasi
110	[06] Musi Banyuasin	0,51	Tidak Teraglomerasi
111	[07] Banyu Asin	0,62	Tidak Teraglomerasi
112	[08] Ogan Komering Ulu Selatan	0,37	Tidak Teraglomerasi
113	[09] Ogan Komering Ulu Timur	0,62	Tidak Teraglomerasi
114	[10] Ogan Ilir	1,22	Teraglomerasi Lemah
115	[11] Empat Lawang	0,31	Tidak Teraglomerasi
116	[12] Penukal Abab Lematang Ilir	0,20	Tidak Teraglomerasi
117	[13] Musi Rawas Utara	0,32	Tidak Teraglomerasi
118	[71] Palembang	0,26	Tidak Teraglomerasi
119	[72] Prabumulih	0,34	Tidak Teraglomerasi
120	[73] Pagar Alam	0,27	Tidak Teraglomerasi
121	[74] Lubuklinggau	0,35	Tidak Teraglomerasi
122	[17] BENGKULU	0,49	Tidak Teraglomerasi
123	[01] Bengkulu Selatan	0,60	Tidak Teraglomerasi
124	[02] Rejang Lebong	0,56	Tidak Teraglomerasi
125	[03] Bengkulu Utara	0,46	Tidak Teraglomerasi
126	[04] Kaur	0,44	Tidak Teraglomerasi
127	[05] Seluma	0,46	Tidak Teraglomerasi
128	[06] Mukomuko	0,44	Tidak Teraglomerasi
129	[07] Lebong	0,92	Tidak Teraglomerasi
130	[08] Kepahiang	0,45	Tidak Teraglomerasi
131	[09] Bengkulu Tengah	0,63	Tidak Teraglomerasi
132	[71] Bengkulu	0,38	Tidak Teraglomerasi
133	[18] LAMPUNG	0,72	Tidak Teraglomerasi
134	[01] Lampung Barat	0,25	Tidak Teraglomerasi
135	[02] Tanggamus	0,45	Tidak Teraglomerasi
136	[03] Lampung Selatan	0,91	Tidak Teraglomerasi
137	[04] Lampung Timur	0,82	Tidak Teraglomerasi
138	[05] Lampung Tengah	1,10	Teraglomerasi Lemah
139	[06] Lampung Utara	0,45	Tidak Teraglomerasi
140	[07] Way Kanan	0,59	Tidak Teraglomerasi
141	[08] Tulangbawang	0,73	Tidak Teraglomerasi
142	[09] Pesawaran	0,65	Tidak Teraglomerasi
143	[10] Pringsewu	1,09	Teraglomerasi Lemah
144	[11] Mesuji	0,53	Tidak Teraglomerasi

Tabel 3. Indeks Spesialisasi Industri menurut Provinsi/Kabupaten/Kota, 2016(lanjutan)

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks SI	Keterangan
145	[12] Tulang Bawang Barat	0,68	Tidak Teraglomerasi
146	[13] Pesisir Barat	0,40	Tidak Teraglomerasi
147	[71] Bandar Lampung	0,50	Tidak Teraglomerasi
148	[72] Metro	0,49	Tidak Teraglomerasi
149	[19] KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	0,48	Tidak Teraglomerasi
150	[01] Bangka	0,54	Tidak Teraglomerasi
151	[02] Belitung	0,71	Tidak Teraglomerasi
152	[03] Bangka Barat	0,39	Tidak Teraglomerasi
153	[04] Bangka Tengah	0,40	Tidak Teraglomerasi
154	[05] Bangka Selatan	0,34	Tidak Teraglomerasi
155	[06] Belitung Timur	0,39	Tidak Teraglomerasi
156	[71] Pangkal Pinang	0,49	Tidak Teraglomerasi
157	[21] KEPULAUAN RIAU	1,29	Teraglomerasi Lemah
158	[01] Karimun	0,86	Tidak Teraglomerasi
159	[02] Bintan	1,08	Teraglomerasi Lemah
160	[03] Natuna	0,53	Tidak Teraglomerasi
161	[04] Lingga	0,74	Tidak Teraglomerasi
162	[05] Kepulauan Anambas	0,50	Tidak Teraglomerasi
163	[71] Batam	1,60	Teraglomerasi Lemah
164	[72] Tanjung Pinang	0,41	Tidak Teraglomerasi
165	[31] DKI JAKARTA	0,61	Tidak Teraglomerasi
166	[01] Kepulauan Seribu	0,34	Tidak Teraglomerasi
167	[71] Jakarta Selatan	0,19	Tidak Teraglomerasi
168	[72] Jakarta Timur	0,75	Tidak Teraglomerasi
169	[73] Jakarta Pusat	0,26	Tidak Teraglomerasi
170	[74] Jakarta Barat	0,90	Tidak Teraglomerasi
171	[75] Jakarta Utara	1,10	Teraglomerasi Lemah
172	[32] JAWA BARAT	1,18	Teraglomerasi Lemah
173	[01] Bogor	1,38	Teraglomerasi Lemah
174	[02] Sukabumi	1,24	Teraglomerasi Lemah
175	[03] Cianjur	0,82	Tidak Teraglomerasi
176	[04] Bandung	1,59	Teraglomerasi Lemah
177	[05] Garut	1,04	Teraglomerasi Lemah
178	[06] Tasikmalaya	1,21	Teraglomerasi Lemah
179	[07] Ciamis	1,15	Teraglomerasi Lemah
180	[08] Kuningan	0,62	Tidak Teraglomerasi

Tabel 3. Indeks Spesialisasi Industri menurut Provinsi/Kabupaten/Kota, 2016 (lanjutan)

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks SI	Keterangan
181	[09] Cirebon	0,81	Tidak Teraglomerasi
182	[10] Majalengka	1,25	Teraglomerasi Lemah
183	[11] Sumedang	1,57	Teraglomerasi Lemah
184	[12] Indramayu	0,54	Tidak Teraglomerasi
185	[13] Subang	0,91	Tidak Teraglomerasi
186	[14] Purwakarta	1,65	Teraglomerasi Lemah
187	[15] Karawang	1,36	Teraglomerasi Lemah
188	[16] Bekasi	2,07	Teraglomerasi Sedang
189	[17] Bandung Barat	1,15	Teraglomerasi Lemah
190	[18] Pangandaran	1,59	Teraglomerasi Lemah
191	[71] Bogor	0,57	Tidak Teraglomerasi
192	[72] Sukabumi	0,52	Tidak Teraglomerasi
193	[73] Bandung	0,81	Tidak Teraglomerasi
194	[74] Cirebon	0,44	Tidak Teraglomerasi
195	[75] Bekasi	0,78	Tidak Teraglomerasi
196	[76] Depok	0,66	Tidak Teraglomerasi
197	[77] Cimahi	1,92	Teraglomerasi Lemah
198	[78] Tasikmalaya	1,33	Teraglomerasi Lemah
199	[79] Banjar	1,05	Teraglomerasi Lemah
200	[33] JAWA TENGAH	1,47	Teraglomerasi Lemah
201	[01] Cilacap	1,34	Teraglomerasi Lemah
202	[02] Banyumas	1,31	Teraglomerasi Lemah
203	[03] Purbalingga	2,20	Teraglomerasi Sedang
204	[04] Banjarnegara	1,15	Teraglomerasi Lemah
205	[05] Kebumen	1,66	Teraglomerasi Lemah
206	[06] Purworejo	1,38	Teraglomerasi Lemah
207	[07] Wonosobo	1,37	Teraglomerasi Lemah
208	[08] Magelang	1,42	Teraglomerasi Lemah
209	[09] Boyolali	1,72	Teraglomerasi Lemah
210	[10] Klaten	1,45	Teraglomerasi Lemah
211	[11] Sukoharjo	1,80	Teraglomerasi Lemah
212	[12] Wonogiri	1,80	Teraglomerasi Lemah
213	[13] Karanganyar	1,50	Teraglomerasi Lemah
214	[14] Sragen	1,34	Teraglomerasi Lemah
215	[15] Grobogan	0,84	Tidak Teraglomerasi
216	[16] Blora	0,66	Tidak Teraglomerasi

Tabel 3. Indeks Spesialisasi Industri menurut Provinsi/Kabupaten/Kota, 2016(lanjutan)

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks SI	Keterangan
217	[17] Rembang	1,46	Teraglomerasi Lemah
218	[18] Pati	1,17	Teraglomerasi Lemah
219	[19] Kudus	2,05	Teraglomerasi Sedang
220	[20] Jepara	2,14	Teraglomerasi Sedang
221	[21] Demak	1,53	Teraglomerasi Lemah
222	[22] Semarang	2,12	Teraglomerasi Sedang
223	[23] Temanggung	2,58	Teraglomerasi Sedang
224	[24] Kendal	1,17	Teraglomerasi Lemah
225	[25] Batang	1,48	Teraglomerasi Lemah
226	[26] Pekalongan	2,13	Teraglomerasi Sedang
227	[27] Pemalang	1,11	Teraglomerasi Lemah
228	[28] Tegal	1,05	Teraglomerasi Lemah
229	[29] Brebes	0,64	Tidak Teraglomerasi
230	[71] Magelang	0,69	Tidak Teraglomerasi
231	[72] Surakarta	0,84	Tidak Teraglomerasi
232	[73] Salatiga	1,08	Teraglomerasi Lemah
233	[74] Semarang	1,22	Teraglomerasi Lemah
234	[75] Pekalongan	1,43	Teraglomerasi Lemah
235	[76] Tegal	0,85	Tidak Teraglomerasi
236	[34] D I YOGYAKARTA	1,25	Teraglomerasi Lemah
237	[01] Kulon Progo	1,41	Teraglomerasi Lemah
238	[02] Bantul	1,38	Teraglomerasi Lemah
239	[03] Gunung Kidul	2,24	Teraglomerasi Sedang
240	[04] Sleman	0,88	Tidak Teraglomerasi
241	[71] Yogyakarta	0,60	Tidak Teraglomerasi
242	[35] JAWA TIMUR	1,05	Teraglomerasi Lemah
243	[01] Pacitan	1,39	Teraglomerasi Lemah
244	[02] Ponorogo	0,84	Tidak Teraglomerasi
245	[03] Trenggalek	1,42	Teraglomerasi Lemah
246	[04] Tulungagung	1,50	Teraglomerasi Lemah
247	[05] Blitar	0,83	Tidak Teraglomerasi
248	[06] Kediri	0,96	Tidak Teraglomerasi
249	[07] Malang	1,16	Teraglomerasi Lemah
250	[08] Lumajang	0,95	Tidak Teraglomerasi
251	[09] Jember	0,83	Tidak Teraglomerasi
252	[10] Banyuwangi	0,84	Tidak Teraglomerasi

Tabel 3. Indeks Spesialisasi Industri menurut Provinsi/Kabupaten/Kota, 2016 (lanjutan)

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks SI	Keterangan
253	[11] Bondowoso	1,58	Teraglomerasi Lemah
254	[12] Situbondo	1,46	Teraglomerasi Lemah
255	[13] Probolinggo	1,63	Teraglomerasi Lemah
256	[14] Pasuruan	1,68	Teraglomerasi Lemah
257	[15] Sidoarjo	0,73	Tidak Teraglomerasi
258	[16] Mojokerto	1,47	Teraglomerasi Lemah
259	[17] Jombang	1,00	Teraglomerasi Lemah
260	[18] Nganjuk	0,54	Tidak Teraglomerasi
261	[19] Madiun	0,70	Tidak Teraglomerasi
262	[20] Magetan	1,23	Teraglomerasi Lemah
263	[21] Ngawi	0,75	Tidak Teraglomerasi
264	[22] Bojonegoro	0,89	Tidak Teraglomerasi
265	[23] Tuban	0,46	Tidak Teraglomerasi
266	[24] Lamongan	1,08	Teraglomerasi Lemah
267	[25] Gresik	1,20	Teraglomerasi Lemah
268	[26] Bangkalan	0,57	Tidak Teraglomerasi
269	[27] Sampang	1,20	Teraglomerasi Lemah
270	[28] Pamekasan	2,73	Teraglomerasi Sedang
271	[29] Sumenep	1,82	Teraglomerasi Lemah
272	[71] Kediri	1,01	Teraglomerasi Lemah
273	[72] Blitar	0,66	Tidak Teraglomerasi
274	[73] Malang	0,66	Tidak Teraglomerasi
275	[74] Probolinggo	1,16	Teraglomerasi Lemah
276	[75] Pasuruan	1,04	Teraglomerasi Lemah
277	[76] Mojokerto	1,04	Teraglomerasi Lemah
278	[77] Madiun	0,61	Tidak Teraglomerasi
279	[78] Surabaya	0,77	Tidak Teraglomerasi
280	[79] Batu	0,23	Tidak Teraglomerasi
281	[36] BANTEN	1,59	Teraglomerasi Lemah
282	[01] Pandeglang	0,62	Tidak Teraglomerasi
283	[02] Lebak	0,63	Tidak Teraglomerasi
284	[03] Tangerang	2,02	Teraglomerasi Sedang
285	[04] Serang	2,15	Teraglomerasi Sedang
286	[71] Tangerang	2,02	Teraglomerasi Sedang
287	[72] Cilegon	1,25	Teraglomerasi Lemah
288	[73] Serang	0,44	Tidak Teraglomerasi

Tabel 3. Indeks Spesialisasi Industri menurut Provinsi/Kabupen/Kota, 2016(lanjutan)

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks SI	Keterangan
289	[74] Tangerang Selatan	0,72	Tidak Teraglomerasi
290	[51] BALI	0,86	Tidak Teraglomerasi
291	[01] Jembrana	1,11	Teraglomerasi Lemah
292	[02] Tabanan	1,04	Teraglomerasi Lemah
293	[03] Badung	0,47	Tidak Teraglomerasi
294	[04] Gianyar	1,13	Teraglomerasi Lemah
295	[05] Klungkung	0,99	Tidak Teraglomerasi
296	[06] Bangli	1,45	Teraglomerasi Lemah
297	[07] Karang Asem	1,51	Teraglomerasi Lemah
298	[08] Buleleng	0,91	Tidak Teraglomerasi
299	[71] Denpasar	0,64	Tidak Teraglomerasi
300	[52] NUSA TENGGARA BARAT	1,21	Teraglomerasi Lemah
301	[01] Lombok Barat	0,63	Tidak Teraglomerasi
302	[02] Lombok Tengah	1,85	Teraglomerasi Lemah
303	[03] Lombok Timur	2,02	Teraglomerasi Sedang
304	[04] Sumbawa	0,46	Tidak Teraglomerasi
305	[05] Dompu	0,54	Tidak Teraglomerasi
306	[06] Bima	0,65	Tidak Teraglomerasi
307	[07] Sumbawa Barat	0,31	Tidak Teraglomerasi
308	[08] Lombok Utara	0,52	Tidak Teraglomerasi
309	[71] Mataram	0,47	Tidak Teraglomerasi
310	[72] Bima	0,70	Tidak Teraglomerasi
311	[53] NUSA TENGGARA TIMUR	0,93	Tidak Teraglomerasi
312	[01] Sumba Barat	0,97	Tidak Teraglomerasi
313	[02] Sumba Timur	0,87	Tidak Teraglomerasi
314	[03] Kupang	0,61	Tidak Teraglomerasi
315	[04] Timor Tengah Selatan	0,56	Tidak Teraglomerasi
316	[05] Timor Tengah Utara	0,80	Tidak Teraglomerasi
317	[06] Belu	0,55	Tidak Teraglomerasi
318	[07] Alor	0,68	Tidak Teraglomerasi
319	[08] Lembata	0,79	Tidak Teraglomerasi
320	[09] Flores Timur	1,70	Teraglomerasi Lemah
321	[10] Sikka	1,27	Teraglomerasi Lemah
322	[11] Ende	1,39	Teraglomerasi Lemah
323	[12] Ngada	0,77	Tidak Teraglomerasi
324	[13] Manggarai	0,97	Tidak Teraglomerasi

Tabel 3. Indeks Spesialisasi Industri menurut Provinsi/Kabupaten/Kota, 2016 (lanjutan)

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks SI	Keterangan
325	[14] Rote Ndao	1,33	Teraglomerasi Lemah
326	[15] Manggarai Barat	0,59	Tidak Teraglomerasi
327	[16] Sumba Tengah	0,38	Tidak Teraglomerasi
328	[17] Sumba Barat Daya	2,00	Teraglomerasi Sedang
329	[18] Nagekeo	0,79	Tidak Teraglomerasi
330	[19] Manggarai Timur	0,48	Tidak Teraglomerasi
331	[20] Sabu Raijua	0,95	Tidak Teraglomerasi
332	[21] Malaka	1,60	Teraglomerasi Lemah
333	[71] Kupang	0,39	Tidak Teraglomerasi
334	[61] KALIMANTAN BARAT	0,59	Tidak Teraglomerasi
335	[01] Sambas	0,78	Tidak Teraglomerasi
336	[02] Bengkayang	0,40	Tidak Teraglomerasi
337	[03] Landak	0,34	Tidak Teraglomerasi
338	[04] Mempawah	0,73	Tidak Teraglomerasi
339	[05] Sanggau	0,80	Tidak Teraglomerasi
340	[06] Ketapang	0,54	Tidak Teraglomerasi
341	[07] Sintang	0,27	Tidak Teraglomerasi
342	[08] Kapuas Hulu	0,35	Tidak Teraglomerasi
343	[09] Sekadau	0,39	Tidak Teraglomerasi
344	[10] Melawi	0,28	Tidak Teraglomerasi
345	[11] Kayong Utara	0,77	Tidak Teraglomerasi
346	[12] Kubu Raya	1,32	Teraglomerasi Lemah
347	[71] Pontianak	0,39	Tidak Teraglomerasi
348	[72] Singkawang	0,44	Tidak Teraglomerasi
349	[62] KALIMANTAN TENGAH	0,48	Tidak Teraglomerasi
350	[01] Kotawaringin Barat	0,66	Tidak Teraglomerasi
351	[02] Kotawaringin Timur	0,85	Tidak Teraglomerasi
352	[03] Kapuas	0,32	Tidak Teraglomerasi
353	[04] Barito Selatan	0,55	Tidak Teraglomerasi
354	[05] Barito Utara	0,32	Tidak Teraglomerasi
355	[06] Sukamara	0,70	Tidak Teraglomerasi
356	[07] Lamandau	0,84	Tidak Teraglomerasi
357	[08] Seruyan	0,97	Tidak Teraglomerasi
358	[09] Katingan	0,31	Tidak Teraglomerasi
359	[10] Pulang Pisau	0,34	Tidak Teraglomerasi
360	[11] Gunung Mas	0,17	Tidak Teraglomerasi

Tabel 3. Indeks Spesialisasi Industri menurut Provinsi/Kabupaten/Kota, 2016 (lanjutan)

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks SI	Keterangan
361	[12] Barito Timur	0,40	Tidak Teraglomerasi
362	[13] Murung Raya	0,15	Tidak Teraglomerasi
363	[71] Palangka Raya	0,35	Tidak Teraglomerasi
364	[63] KALIMANTAN SELATAN	0,55	Tidak Teraglomerasi
365	[01] Tanah Laut	0,57	Tidak Teraglomerasi
366	[02] Kota Baru	0,60	Tidak Teraglomerasi
367	[03] Banjar	0,61	Tidak Teraglomerasi
368	[04] Barito Kuala	0,70	Tidak Teraglomerasi
369	[05] Tapin	0,50	Tidak Teraglomerasi
370	[06] Hulu Sungai Selatan	0,72	Tidak Teraglomerasi
371	[07] Hulu Sungai Tengah	0,53	Tidak Teraglomerasi
372	[08] Hulu Sungai Utara	1,06	Teraglomerasi Lemah
373	[09] Tabalong	0,40	Tidak Teraglomerasi
374	[10] Tanah Bumbu	0,38	Tidak Teraglomerasi
375	[11] Balangan	0,36	Tidak Teraglomerasi
376	[71] Banjarmasin	0,41	Tidak Teraglomerasi
377	[72] Banjar Baru	0,51	Tidak Teraglomerasi
378	[64] KALIMANTAN TIMUR	0,46	Tidak Teraglomerasi
379	[01] Paser	0,37	Tidak Teraglomerasi
380	[02] Kutai Barat	0,33	Tidak Teraglomerasi
381	[03] Kutai Kartanegara	0,45	Tidak Teraglomerasi
382	[04] Kutai Timur	0,40	Tidak Teraglomerasi
383	[05] Berau	0,39	Tidak Teraglomerasi
384	[09] Penajam Paser Utara	0,61	Tidak Teraglomerasi
385	[11] Mahakam Hulu	0,18	Tidak Teraglomerasi
386	[71] Balikpapan	0,39	Tidak Teraglomerasi
387	[72] Samarinda	0,52	Tidak Teraglomerasi
388	[74] Bontang	0,75	Tidak Teraglomerasi
389	[65] KALIMANTAN UTARA	0,56	Tidak Teraglomerasi
390	[01] Malinau	0,36	Tidak Teraglomerasi
391	[02] Bulungan	0,36	Tidak Teraglomerasi
392	[03] Tana Tidung	0,28	Tidak Teraglomerasi
393	[04] Nunukan	0,27	Tidak Teraglomerasi
394	[71] Tarakan	0,87	Tidak Teraglomerasi
395	[71] SULAWESI UTARA	0,76	Tidak Teraglomerasi
396	[01] Bolaang Mongondow	0,67	Tidak Teraglomerasi

Tabel 3. Indeks Spesialisasi Industri menurut Provinsi/Kabupaten/Kota, 2016(lanjutan)

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks SI	Keterangan
397	[02] Minahasa	0,61	Tidak Teraglomerasi
398	[03] Kepulauan Sangihe	1,17	Teraglomerasi Lemah
399	[04] Kepulauan Talaud	1,88	Teraglomerasi Lemah
400	[05] Minahasa Selatan	1,32	Teraglomerasi Lemah
401	[06] Minahasa Utara	0,88	Tidak Teraglomerasi
402	[07] Bolaang Mongondow Utara	0,99	Tidak Teraglomerasi
403	[08] Siau Tagulandang Biaro	0,30	Tidak Teraglomerasi
404	[09] Minahasa Tenggara	0,76	Tidak Teraglomerasi
405	[10] Bolaang Mongondow Selatan	0,66	Tidak Teraglomerasi
406	[11] Bolaang Mongondow Timur	1,17	Teraglomerasi Lemah
407	[71] Manado	0,26	Tidak Teraglomerasi
408	[72] Bitung	1,21	Teraglomerasi Lemah
409	[73] Tomohon	0,52	Tidak Teraglomerasi
410	[74] Kotamobagu	0,74	Tidak Teraglomerasi
411	[72] SULAWESI TENGAH	1,24	Teraglomerasi Lemah
412	[01] Banggai Kepulauan	2,15	Teraglomerasi Sedang
413	[02] Banggai	1,66	Teraglomerasi Lemah
414	[03] Morowali	1,03	Teraglomerasi Lemah
415	[04] Poso	0,86	Tidak Teraglomerasi
416	[05] Donggala	1,63	Teraglomerasi Lemah
417	[06] Toli-Toli	1,33	Teraglomerasi Lemah
418	[07] Buol	1,05	Teraglomerasi Lemah
419	[08] Parigi Moutong	1,60	Teraglomerasi Lemah
420	[09] Tojo Una-Una	1,67	Teraglomerasi Lemah
421	[10] Sigi	0,84	Tidak Teraglomerasi
422	[11] Banggai Laut	1,66	Teraglomerasi Lemah
423	[12] Morowali Utara	0,64	Tidak Teraglomerasi
424	[71] Palu	0,42	Tidak Teraglomerasi
425	[73] SULAWESI SELATAN	0,67	Tidak Teraglomerasi
426	[01] Kepulauan Selayar	1,41	Teraglomerasi Lemah
427	[02] Bulukumba	0,69	Tidak Teraglomerasi
428	[03] Bantaeng	0,70	Tidak Teraglomerasi
429	[04] Jeneponto	0,77	Tidak Teraglomerasi
430	[05] Takalar	0,85	Tidak Teraglomerasi
431	[06] Gowa	0,88	Tidak Teraglomerasi
432	[07] Sinjai	0,60	Tidak Teraglomerasi

Tabel 3. Indeks Spesialisasi Industri menurut Provinsi/Kabupaten/Kota, 2016(lanjutan)

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks SI	Keterangan
433	[08] Maros	0,67	Tidak Teraglomerasi
434	[09] Pangkajene Dan Kepulauan	0,70	Tidak Teraglomerasi
435	[10] Barru	0,46	Tidak Teraglomerasi
436	[11] Bone	0,67	Tidak Teraglomerasi
437	[12] Soppeng	0,50	Tidak Teraglomerasi
438	[13] Wajo	0,92	Tidak Teraglomerasi
439	[14] Sidenreng Rappang	0,70	Tidak Teraglomerasi
440	[15] Pinrang	0,60	Tidak Teraglomerasi
441	[16] Enrekang	0,46	Tidak Teraglomerasi
442	[17] Luwu	0,63	Tidak Teraglomerasi
443	[18] Tana Toraja	0,43	Tidak Teraglomerasi
444	[22] Luwu Utara	0,60	Tidak Teraglomerasi
445	[25] Luwu Timur	0,44	Tidak Teraglomerasi
446	[26] Toraja Utara	0,70	Tidak Teraglomerasi
447	[71] Makassar	0,61	Tidak Teraglomerasi
448	[72] Parepare	0,36	Tidak Teraglomerasi
449	[73] Palopo	0,40	Tidak Teraglomerasi
450	[74] SULAWESI TENGGARA	0,80	Tidak Teraglomerasi
451	[01] Buton	0,74	Tidak Teraglomerasi
452	[02] Muna	1,02	Teraglomerasi Lemah
453	[03] Konawe	0,91	Tidak Teraglomerasi
454	[04] Kolaka	0,63	Tidak Teraglomerasi
455	[05] Konawe Selatan	1,04	Teraglomerasi Lemah
456	[06] Bombana	1,07	Teraglomerasi Lemah
457	[07] Wakatobi	0,93	Tidak Teraglomerasi
458	[08] Kolaka Utara	0,82	Tidak Teraglomerasi
459	[09] Buton Utara	1,12	Teraglomerasi Lemah
460	[10] Konawe Utara	0,94	Tidak Teraglomerasi
461	[11] Kolaka Timur	0,57	Tidak Teraglomerasi
462	[12] Konawe Kepulauan	1,55	Teraglomerasi Lemah
463	[13] Muna Barat	0,87	Tidak Teraglomerasi
464	[14] Buton Tengah	1,29	Teraglomerasi Lemah
465	[15] Buton Selatan	0,70	Tidak Teraglomerasi
466	[71] Kendari	0,39	Tidak Teraglomerasi
467	[72] Baubau	0,50	Tidak Teraglomerasi
468	[75] GORONTALO	0,73	Tidak Teraglomerasi

Tabel 3. Indeks Spesialisasi Industri menurut Provinsi/Kabupaten/Kota, 2016(lanjutan)

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks SI	Keterangan
469	[01] Boalemo	0,93	Tidak Teraglomerasi
470	[02] Gorontalo	0,90	Tidak Teraglomerasi
471	[03] Pohuwato	0,79	Tidak Teraglomerasi
472	[04] Bone Bolango	0,65	Tidak Teraglomerasi
473	[05] Gorontalo Utara	0,68	Tidak Teraglomerasi
474	[71] Gorontalo	0,39	Tidak Teraglomerasi
475	[76] SULAWESI BARAT	0,72	Tidak Teraglomerasi
476	[01] Majene	0,66	Tidak Teraglomerasi
477	[02] Polewali Mandar	0,93	Tidak Teraglomerasi
478	[03] Mamasa	0,46	Tidak Teraglomerasi
479	[04] Mamuju	0,48	Tidak Teraglomerasi
480	[05] Mamuju Utara	0,93	Tidak Teraglomerasi
481	[06] Mamuju Tengah	0,54	Tidak Teraglomerasi
482	[81] MALUKU	0,94	Tidak Teraglomerasi
483	[01] Maluku Tenggara Barat	2,21	Teraglomerasi Sedang
484	[02] Maluku Tenggara	0,44	Tidak Teraglomerasi
485	[03] Maluku Tengah	1,14	Teraglomerasi Lemah
486	[04] Buru	0,42	Tidak Teraglomerasi
487	[05] Kepulauan Aru	1,08	Teraglomerasi Lemah
488	[06] Seram Bagian Barat	1,17	Teraglomerasi Lemah
489	[07] Seram Bagian Timur	0,72	Tidak Teraglomerasi
490	[08] Maluku Barat Daya	1,47	Teraglomerasi Lemah
491	[09] Buru Selatan	1,88	Teraglomerasi Lemah
492	[71] Ambon	0,37	Tidak Teraglomerasi
493	[72] Tual	0,28	Tidak Teraglomerasi
494	[82] MALUKU UTARA	0,53	Tidak Teraglomerasi
495	[01] Halmahera Barat	0,51	Tidak Teraglomerasi
496	[02] Halmahera Tengah	0,41	Tidak Teraglomerasi
497	[03] Kepulauan Sula	0,33	Tidak Teraglomerasi
498	[04] Halmahera Selatan	0,68	Tidak Teraglomerasi
499	[05] Halmahera Utara	0,37	Tidak Teraglomerasi
500	[06] Halmahera Timur	0,91	Tidak Teraglomerasi
501	[07] Pulau Morotai	0,38	Tidak Teraglomerasi
502	[08] Pulau Taliabu	0,28	Tidak Teraglomerasi
503	[71] Ternate	0,34	Tidak Teraglomerasi
504	[72] Tidore Kepulauan	1,02	Teraglomerasi Lemah

Tabel 3. Indeks Spesialisasi Industri menurut Provinsi/Kabupaten/Kota, 2016(lanjutan)

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks SI	Keterangan
505	[91] PAPUA BARAT	0,47	Tidak Teraglomerasi
506	[01] Fakfak	0,13	Tidak Teraglomerasi
507	[02] Kaimana	0,30	Tidak Teraglomerasi
508	[03] Teluk Wondama	0,19	Tidak Teraglomerasi
509	[04] Teluk Bintuni	0,70	Tidak Teraglomerasi
510	[05] Manokwari	0,62	Tidak Teraglomerasi
511	[06] Sorong Selatan	0,19	Tidak Teraglomerasi
512	[07] Sorong	1,05	Teraglomerasi Lemah
513	[08] Raja Ampat	0,63	Tidak Teraglomerasi
514	[09] Tambrau	0,14	Tidak Teraglomerasi
515	[10] Maybrat	0,26	Tidak Teraglomerasi
516	[11] Manokwari Selatan	0,28	Tidak Teraglomerasi
517	[12] Pegunungan Arfak	0,00	Tidak Teraglomerasi
518	[71] Sorong	0,25	Tidak Teraglomerasi
519	[94] PAPUA	0,29	Tidak Teraglomerasi
520	[01] Merauke	0,39	Tidak Teraglomerasi
521	[02] Jayawijaya	0,21	Tidak Teraglomerasi
522	[03] Jayapura	0,30	Tidak Teraglomerasi
523	[04] Nabire	0,32	Tidak Teraglomerasi
524	[08] Kepulauan Yapen	0,91	Tidak Teraglomerasi
525	[09] Biak Numfor	0,43	Tidak Teraglomerasi
526	[10] Paniai	0,19	Tidak Teraglomerasi
527	[11] Puncak Jaya	0,15	Tidak Teraglomerasi
528	[12] Mimika	0,10	Tidak Teraglomerasi
529	[13] Boven Digoel	1,85	Teraglomerasi Lemah
530	[14] Mappi	0,17	Tidak Teraglomerasi
531	[15] Asmat	0,09	Tidak Teraglomerasi
532	[16] Yahukimo	0,05	Tidak Teraglomerasi
533	[17] Pegunungan Bintang	0,03	Tidak Teraglomerasi
534	[18] Tolikara	0,07	Tidak Teraglomerasi
535	[19] Sarmi	0,77	Tidak Teraglomerasi
536	[20] Keerom	0,52	Tidak Teraglomerasi
537	[26] Waropen	0,24	Tidak Teraglomerasi
538	[27] Supiori	0,32	Tidak Teraglomerasi
539	[28] Mamberamo Raya	0,08	Tidak Teraglomerasi
540	[29] Nduga	0,07	Tidak Teraglomerasi

Tabel 3. Indeks Spesialisasi Industri menurut Provinsi/Kabupaten/Kota, 2016(lanjutan)

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks SI	Keterangan
541	[30] Lanny Jaya	0,05	Tidak Teraglomerasi
542	[31] Mamberamo Tengah	0,00	Tidak Teraglomerasi
543	[32] Yalimo	0,01	Tidak Teraglomerasi
544	[33] Puncak	0,01	Tidak Teraglomerasi
545	[34] Dogiyai	0,06	Tidak Teraglomerasi
546	[35] Intan Jaya	0,00	Tidak Teraglomerasi
547	[36] Deiyai	0,91	Tidak Teraglomerasi
548	[71] Jayapura	0,15	Tidak Teraglomerasi

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. dr. Sutomo No. 6-8, Jakarta 10710

Telp.: 021 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax: 021 3857046

Homepage: <http://www.bps.go.id> E-mail: bpsdq@bps.go.id